

Negor
And



Dr. Emmanuel Subarman

NEGARA ANARKHI

Emmanuel Subandono

© Emmanuel Subandono dan LKiS, 2004

xxxvi + 340 halaman, 18 cm

1. Negara-Bangsa 2. Nasionalisme

3. Ekonomi politik 4. Globalisasi

ISBN: 979-98451-1-4

Pengantar: Joko Widodo, Haryo Jacobo, dan Rizal Panggabean

Editor: Fuad Mas'ud

Rancang Sampul: Widhie Jawa

Gambar sampul diambil dan diolah dari www.kompas.com

Setting/Layout: Santo

Penerbit:

LKiS Yogyakarta

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp/Faks.: (0274) 419924/7472110

e-mail: elkis@indosat.net.id

Cetakan I: Oktober 2004

Percetakan dan distribusi:

LKiS Yogyakarta

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp/Faks.: (0274) 419924/7472110

e-mail: elkis@indosat.net.id

Terima kasih kepada
Hasyim Wahid

Pengantar Redaksi

Setelah sekian lama bangsa Indonesia merdeka, keinginan untuk mewujudkan negara yang demokratis, adil, dan sejahtera ternyata belum juga bisa tercalisir. Bahkan sekarang ini, kecenderungan yang muncul dan tampak bukanlah kemajuan, melainkan justru sebaliknya, kemunduran dan keterpurukan. Satu kondisi yang sungguh sangat ironis dan menyedihkan. Hal ini karena tiadaknya adanya kemampuan dari seluruh warga bangsa untuk bersama-sama membangun negeri ini. Padahal, dalam upaya membangun bangsa yang kuat dan demokratis, dibutuhkan partisipasi masyarakat dan keseriusan seluruh warga bangsa. Akan tetapi kenyataannya, selama ini peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa sering kali diabaikan atau bahkan mungkin memang sengaja dinafikan.

Proses pembangunan yang dijalankan Orde Baru, meskipun "mungkin" secara ekonomi membawa kemajuan, akan tetapi secara umum belum mampu menghantarkan bangsa ini ke arah

kemajuan yang berarti. Bahkan ada kecenderungan bahwa pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh Orde Baru justru memunculkan banyak persoalan, seperti kesenjangan sosial, baik antarindividu, antarkelompok, dan juga antarkawasan, tidak adanya penegakan hukum, dan juga terjadinya pengebiran terhadap demokrasi itu sendiri. Selain itu, pembangunan ekonomi yang terlalu mengandalkan dana pinjaman dari negara-negara maju ternyata juga membawa dampak yang sangat serius bagi Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia tidak saja menjadi sangat tergantung terhadap negara-negara maju, akan tetapi ia juga terjerat hutang yang sangat luar biasa banyaknya. Kondisi ini diperparah dengan badai krisis yang melanda negeri ini sejak 1997, yang hingga kini juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Terjadinya reformasi yang dimulai sejak 1998, ternyata juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Bahkan korupsi yang pada masa Orde Baru hanya dilakukan oleh elite penguasa yang ada di pusat, sekarang ini justru meluas ke seluruh wilayah. Dalam hal ini, korupsi bahkan sudah menjadi gaya hidup para elite penguasa, baik yang ada di pusat maupun daerah. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak kondusif bagi sebuah bangsa yang sedang

menata diri dan merancang masa depannya. Ia bukan saja akan menghambat proses pembangunan, akan tetapi lebih jauh lagi, ia justru akan menghancurkan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu sangat wajar apabila penulis buku ini, Dr. Emmanuel Subangun, cenderung bersikap pesimis terhadap kemampuan bangsa Indonesia untuk bisa bangkit dari keterpurukannya.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan kajian kritis atas Indonesia masa kini dan juga telaah penulisnya terhadap masa depan bangsa ini. Sebuah kajian yang tidak hanya memberikan informasi tentang kondisi Indonesia yang sebenarnya, akan tetapi juga menyadarkan kita akan pentingnya membangun kebersamaan demi melawan apa yang oleh penulisnya sebut *anarkhi*, yang tidak lain adalah sebuah kegagalan dan ketidakmampuan seluruh warga bangsa untuk bangkit dan menegakkan harga dirinya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Emmanuel Subangun yang telah mempercayakan penerbitan naskah buku ini kepada kami. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tom Jacobs (rohaniawan), Teuku Jacob (dosen UGM), dan juga Bapak Rizal Panggabean (dosen UGM), yang telah memberikan pengantar yang kritis dan juga cukup

panjang sehingga memudahkan para pembaca
untuk memahami isi buku ini. Selamat Membaca.

Soalnya Apa?

Oleh Tom Jacobs

Menjengkelkan - membingungkan, itulah reaksi saya ketika membaca buku *Negara Anarkhi*, karya Emmanuel Subangun.

Menjengkelkan, karena kalimatnya yang panjang (seperti Immanuel Kant),

karena kosa kata yang amat khusus,

karena pikiran yang terpotong-potong,

karena interpretasi yang tampaknya subjektif,

karena jawaban yang hanya berupa insinuasii,

karena diandaikan pembaca sudah tahu sendiri,

karena banyak tuntutan dan sedikit petunjuk jawaban,

karena akhirnya tidak tahu apa sebetulnya pokok persoalan yang mau dibahas. Dan itu membingungkan.

Setiap pasal baru pembaca punya harapan: "Oh, sekarang datang".

Dan akhirnya tetap tidak jadi datang.

Tentu, datang juga. Kalau tahan sampai akhir, jelaslah bahwa soalnya adalah kompleksitas persoalan, yang memang tidak dapat ditangkap dengan satu kata saja. Tetapi justru kompleksitas itu, dan pendekatan dari aneka sudut, telah mempersulit pembacaan, dan terutama pemahaman. Mungkin kesulitan itu terasa lebih oleh orang yang bidang studinya lain, dan juga metode serta cara berpikir lain. Tetapi akhirnya buku ini ditulis untuk umum. Bukan hanya untuk ahli ekonomi, sosiologi, atau politik. Dan yang sebetulnya menjengkelkan adalah bahwa seorang awam di bidang-bidang itu kurang mendapat bantuan.

Apa yang saya maksud mau saya jelaskan pada dua contoh yang saya pilih, juga secara subjektif saja, yakni *paradoks* dan *Uni Eropa*. Kiranya kedua contoh itu juga tidak seluruhnya terpilih secara subjektif, karena kesan saya kedua contoh itu cukup representatif untuk mewakili isi buku *Negara Anarkhi*.

Paradoks

Tampaknya soal "paradoks" memang cukup penting, dilihat dari sudut metode.

Setelah diuraikan secara khusus (hlm. 15-19), masih ditunjuk dua kali (hlm. 24 dan 118) sebagai unsur khusus dan spesifik dalam proses pemikiran. Dimulai dengan “definisi” yang diberikan pada halaman 15-16:

Dalam kamus paradoks diartikan sebagai ‘pengertian yang bertentangan dengan pandangan umum’. Tetapi setia pada pengertian Yunani, maka di sini yang dimaksud dengan paradoks adalah sebuah keadaan di mana pengertian akan satu hal tidak akan dapat diperoleh semata dari amatan indriawi atas suatu hal seperti kebanyakan orang, tetapi pengetahuan hanya akan muncul dari kejelian mengamati arus makna yang justru sebaliknya, bergerak atau tak sesuai dengan cermatan indriawi pertama dan langsung.

Boleh-boleh saja membuat definisi sendiri. Tetapi kata “paradoks” bukanlah istilah baru. Dan karenanya pembaca akan memahami istilah itu pertama-tama sebagaimana yang lazim dimengerti. Kalau memang mau menekankan kata Yunani *para*, maka paradoks adalah pandangan yang bertentangan (*para*) dengan opini (*doxa*) yang lazim diterima. Namun hal itu tidak mengatakan apa-apa mengenai *cara bagaimana* opini itu diperoleh. Paradoks (menurut pemahaman umum) tidak menyangkut proses atau metode berpikir, akan tetapi melihat

hasilnya, yaitu suatu pandangan, ajaran, keyakinan, konsep, dan paham yang bertentangan dengan pendapat umum, atau bahkan bertentangan dengan dirinya sendiri, suatu "kontradiksi semu". Singkatnya, paradoks - dalam bahasa umum - menyangkut *buah* pikiran dan bukan *proses*-nya. Dan kita bicara mengenai suatu paradoks logis, kalau ada dua pernyataan yang sama-sama benar, namun tampaknya bertentangan satu sama lain. Maka akan sesuai dengan pikiran umum andaikata "ilmu" dan "kawruh" dipandang sebagai suatu paradoks. Tetapi Subangun mencari jalan tengah di antara keduanya ('Meretas jalan').

Uni Eropa

Subangun antusias untuk Uni Eropa, banyak orang Eropa tidak begitu. Subangun mengagumi "elite Eropa yang baru-baru ini mengukuhkan masyarakat Eropa berwarga 450 juta menghadapi Amerika" (hlm. 26). Justru itu masalahnya, baik yang 450 juta maupun sikap terhadap Amerika. Kalau UE hanya mau bersaing dengan Amerika, maka ia akan kehilangan peranannya dalam sejarah dunia. Tetapi Eropa belajar bersaing tanpa menjadi musuh, dan dengan menghargai pesaingnya, khususnya Amerika yang untuk sebagian besar berakar dalam kebudayaan Eropa. Tetapi justru kebudaya-

an Eropa sendiri sekarang menjadi problem. Dimulai pada tahun 1950 dengan enam negara: Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Belgia, dan Luxemburg. Kemudian menjadi lima belas, dan sekarang dua puluh lima. Pada tahun 1957 tiga negara besar itu - Jerman, Perancis, Italia - masih merupakan 90% dari *Common Market*, sekarang 44%. Bisa dikatakan, bahwa kelompok pertama, dan mungkin juga yang kedua, dipersatukan oleh sejarah. Sekarang yang menentukan adalah ekonomi dan hukum (politik). Gerakan kesatuan sesudah Perang Dunia II timbul dari kesadaran bahwa perang tidak menguntungkan siapa-siapa. Tetapi hampir 40 tahun, sampai 1989, mereka hidup dalam "perang dingin" dengan Rusia. Dan justru perang dingin itu (secara paradoks!) mempersatukan mereka. Apakah terorisme Al-Qaeda akan memainkan peranan yang sama terhadap Uni Eropa yang baru? Tidak jelas. Eropa baru adalah sebuah "proyek", cita-cita yang masih harus dibenarkan. Eropa lama adalah hasil sejarah, yang muncul dari kristianisme dan *le miracle grecque*, Plato dan Aristoteles. Tetapi kristianisme menjadi sekularisme, dan filsafat Yunani diganti oleh teknik dan *enra*.

Itulah Eropa. Yang penting adalah perbandingan dengan Indonesia. Indonesia pun, dari 79 juta pada tahun 1949, sekarang sudah menjadi 220 juta.

Indonesia bukan perserikatan, melainkan negara kesatuan. Namun unsur-unsurnya banyak suku, yang bedanya sering tidak lebih kecil daripada perbedaan Jerman dan Prancis, atau Portugal dan Belanda. Adakah sejarah sumber kesatuan sebelum 1945? Kiranya boleh berkata: Tidak. Batas-batas negara Indonesia adalah perbatasan Hindia Belanda. Tetapi kesatuan Hindia Belanda bukanlah sejarah dan kebudayaan, melainkan penjajahan dan kerja paksa. Dan sekarang, apa yang mempersatukan Indonesia? Ini merupakan pertanyaan besar. Yang jelas, agama dan filsafat bukanlah faktor pemer-satu yang utama. Dan kalau syarat-syarat keanggo-taan untuk Eropa baru adalah damai, hak-hak manusia dan demokrasi, lantas apa syarat-syarat-nya bagi Indonesia sekarang? Bukankah perbedaan-dan persatuan-suku dan kelompok perlu diberi per-hatian yang lebih besar dalam sebuah tinjauan me-ngenai negara Indonesia? Tidakkah soal agama dan filsafat perlu diperhatikan juga? Mana masalah intern yang mempersulit kesatuan Indonesia? Apa akar-akar kesatuannya? Seperti di Eropa, di Indonesia, masalah masa depan juga bukan hanya soal tempat dalam percaturan dunia. Subangun menulis: "Gerak mundur terus-menerus itu bukan disebabkan oleh para pelaku politik yang kurang cakap atau kurang berbakat" (hlm. 132). Mungkin betul. Tetapi tanpa Monnet dan Adenauer, Perancis

dan Jerman tidak pernah akan keluar dari *chauvinisme* nasional mereka. Dan tanpa Schuman (Luxemburg) dan De Gasperi (Italia) persaingan Perancis - Jerman tidak pernah akan terintegrasi dalam kesatuan Eropa. Memang amat perlu "kesadaran bahwa sebuah struktur akan ikut berkembang bersama tindakan politik". Tetapi apakah tidak adanya kesadaran itu menjadi "sebab utama" gerakan mundur itu, dan bukan kekurangan inspirasi dari para pemimpin? Itu dapat dipersoalkan.

Barangkali boleh dikatakan, bahwa di situ terletak masalah pokok buku *Negara Anarkhi*, bahwa tidak berhasil menunjuk persoalan pokok. Diberi interpretasi dan tafsir dari aneka aspek dan kejadian. Mungkin itu tepat, tetapi mungkin juga tidak. Interpretasi lain mungkin juga. Tetapi, bagaimanapun dengan interpretasi, unsur-unsurnya yang kurang tampak adalah pandangan *keseluruhan*, atau bahkan persoalan *menyeluruh*. Apa soalnya, dengan Indonesia. Di mana terletak dasar penghambatan perkembangan? Benarkah negara sedang menuju anarkhi atau "afrikanisasi"? Mana unsur-unsur positif dalam analisa ini? Kiranya yang paling positif ialah bahwa buku ini membuat orang berpikir mengenai persoalan, bahwa negara kita mungkin menjadi anarkhi.

Masa Depan Indonesia

Oleh Teuku Jacob

Dalam buku ini, *Negara Anarkhi*, Saudara Emmanuel Subangun berusaha meninjau negara dan bangsa kita di masa sekarang dan masa depan dalam kaitannya yang luas sehingga memberi gambaran multidimensional tentang kenyataan dan harapan. Penulisnya membagi tulisannya dalam lima Bab dengan mengupas masalah nasionalisme dan pimpinan nasional, kerapuhan struktural, kelas penghisap dan neoliberalisma, geopolitik, hambatan struktural dan globalisasi, soal bumiputera, serta pilihan, model politik dan reformasi, semuanya ditelusuri dalam alur sejarah, memakai kerangka bahasa dari zaman simbolisma, melalui eufemisma ke metafora.

Masalah-masalah penting itu dibicarakan dengan serius dan kritis teredam, yang membuat kita sadar akan posisi kita yang tidak begitu menguntungkan dalam perubahan dan arus geopolitik dan geoekonomi, yang menghanyutkan kita tanpa

arah pilihan sendiri menuju cita-cita perjuangan kemerdekaan kita. Situasi kedalam mana kita terjepit, sebagian, kalau tidak sebagian besar, adalah karena kelemahan dan kesalahan kita sendiri, yang berjuang dengan lebih banyak keributan daripada tindakan, tidak taat pada prinsip dan cita-cita semula, mentalitas egoistis dan materialistis, serta ketidaksadaran akan mekanisme sosial politik dalam kehidupan nyata.

Yang saya rasa sangat penting adalah pengaruh globalisme pada bangsa, terutama pimpinan bangsa kita, dari segi eksploitasi sumber daya, mediatisasi kecenderungan yang didikte, privatisasi, serta dereglementasi ekonomi dan desentralisasi administrasi negara. Pengaruh globalisme termanifestasi pula dalam ideologi yang berfungsi sebagai topeng, seperti demokrasi liberal, hak-hak manusia, feminisme lanjutan, organisasi nir-pemerintah yang tidak swadaya serta pelestarian lingkungan. Tekanan piutang melahirkan investasi asing yang dianggap syarat mutlak untuk pembangunan, pimpinan nasional yang ramah terhadap negara dominan dan perusahaan transnasional, sistem dunia berasaskan Pax Americana, penafian ideologi konvensional dan penyelinapan ideologi pasar ultra-bebas sebagai penggantinya, ancaman-ancaman militer, politis dan ekonomis untuk mem

batasi kita berjalan di garis yang ditentukan dan memberi kesempatan kepada parasit-parasit dalam negeri untuk berpesta pora di atas rusuk-rusuk ter-depan lapisan melarat.

Welfare state yang menjadi idam-idaman seusai Perang Dunia II dengan tidak terasa dilupakan, dengan penguntungan pembayar pajak lapisan atas, dan di tempatnya didirikanlah *welfare state*, yang mengatur gerak dan pertumbuhan negara-negara yang tidak seiring, yang dianggap *rogue nations*. Diktator dan militerisme yang bersahabat dengan kekuatan hegemoni ditenggang, tetapi yang membangkang ditekan dengan instrumen-instrumen PBB, IMF, World Bank, dan WTO, ataupun dengan tindakan unilateral, yang menghancurkan kemanusiaan, pusaka budaya, lingkungan hidup, serta pusat produksi, pangan dan populasi.

Rakyat yang menderita tidak mempunyai corong bicara dan dilelapkan dengan berbagai macam hiburan ringan dan dangkal, massal, elektronik, dan global. Di samping globalisasi budaya pop, globalisme berlangsung pada beberapa peringkat, yaitu planeter, nasional, dan sektoral dalam bidang-bidang teknologi, ekonomi, moneter, transportasi dan komunikasi, politik dan pemahaman modernitas. Tiga kutub sedang bertarung global, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, yang

sebelum akhir abad ini akan diikuti oleh Cina dan India, dengan Amerikanisasi memegang peranan utama.

Sementara itu, kekuatan-kekuatan baru yang sekarang tidak berarti bersiap mendaki lereng kemajuan, sedangkan kekuatan-kekuatan lama mulai menuruni lereng. Mendaki dan turun lereng, apalagi yang licin, sama-sama sulit dan berbahaya. Tetapi waktu selalu berada di pihak yang baru. Oleh karena itu, kita menyaksikan globalisasi oleh kekuatan lama tidak berhasil sebab anti-demokrasi, anti perdamaian, anti hak-hak manusia dan anti pelestarian lingkungan. Berbagai macam penderitaan dalam berbagai skala telah ditimbulkan di Palestina, Irak, dan Afghanistan. Kalau Bush terpilih kembali sebagai *war president* maka akan ditimbulkan lagi kekerasan di Iran, Korea Utara, dan lain-lain. Amerika akan terus mempertahankan *edgenya* dalam militer, ekonomi, teknologi, pangan, farmasi, dan informasi.

Ada tiga faktor utama yang melahirkan kemiskinan rakyat di dunia, termasuk negeri maju, yang dapat dilihat pada index kualitas hidup, index kemiskinan manusia, dan kesenjangan dalam alokasi kekayaan sumber daya alam antara 20% lapisan atas dan 20% lapisan bawah, yaitu korupsi yang sudah merupakan gaya hidup, jerat hutang, dan globalisme neoliberal. Maritunisasi hanya me-

nyebabkan penggunaan lautan dunia dengan gratis oleh negara terkuat, mediatisasi menyebabkan lebih dari 3/4 media informasi dikuasai hanya oleh kurang dari 10 negara, anti terorisma global hanya berarti penentangan pembangkangan dan protes terhadap *status quo* oleh koalisi paksaan, teknologi dan farmasi dikuasai oleh perusahaan multinasional negara-negara kuat dan sehat (triad tadi), dan dunia disandera oleh monopoli senjata destruksi massal oleh klub atom yang eksklusif.

Harus diperhatikan khusus peranan konglomerat *huaqiao* (warga Cina seberang lautan) sekarang dan di masa depan. Kita berayun ke kutub ekstrem yang lain, sesudah merasa kita banyak mendiskriminasi mereka. Acara TV sekitar Tahun Baru Cina penuh acara berbau Cina yang terasa berlebihan. Malahan ada yang merasa tidak enak menyebut Cina dalam media, sehingga diganti *China* (media cetak) dan *Caina* (media elektronik) yang sebetulnya adalah bahasa Inggeris, bukan *putonghua*. Kita bingung bagaimana menghadapi *taipan* yang lari dengan berbilion dolar ke negara jiran. Tetangga yang hidup dari uang singgah, barang singgah, dan orang singgah tentu saja menerima mereka dengan tangan terbuka dan melindunginya. Di masa depan pada pertengahan abad ini dengan ekspansi Cina (ekonomi, populasi, budaya, dan mungkin yang

Negara Anarkhi

lain-lain lagi) kalangan *huaqiao* dan *xinke* (pendatang baru) akan memegang peranan penting, yang merupakan kelebihan dari Jepang dan Amerika dalam persaingan.

Negeri-negeri lemah, seperti Indonesia, harus belajar dari sejarah hewan menyusu yang mulai bermunculan pada zaman dinosaurus menurun lereng. Untuk ini kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang cerdas, berani dan mempunyai visi untuk membayangkan *destiny*-nya di masa depan. Dan jangan terpukau oleh kompetisi bebas neokapitalistis, tetapi perlu menerapkan semangat *koopetitif* (kooperatif dan kompetitif) dalam mendapatkan relungnya yang pantas dalam masyarakat dunia. Pemimpin harus dapat memilih pembantu-pembantu dan kawan-kawannya yang tepat dalam melaksanakan mimpi-mimpi yang seolah-olah mustahil menjadi kenyataan.

Yogyakarta, 14-8-2004

Menemukan Kemungkinan

Oleh Rizal Panggabean

Dapatkah demokrasi berkembang di Indonesia dan bagaimana melihat kemungkinan-kemungkinannya di negeri yang sedang dilanda berbagai masalah ini? Buku ini, antara lain, membahas pertanyaan di atas dan melakukannya dengan nada yang pesimistis. Titik pangkal yang pesimistis ini, tentu saja, dapat dibenarkan karena alasan yang sederhana: Sejarah Indonesia memang tidak begitu menjanjikan.

Setelah lahir dari reruntuhan kolonialisme dan imperialisme, negara Indonesia mewarisi praktik negara kolonial dan kerajaan-kerajaan lama, khususnya di Jawa, yang struktur dan budayanya tidak memadai untuk menopang negara yang baru berdiri tersebut. Sudah begitu, negara Indonesia yang masih berusia balita langsung dihantam gejolak Perang Dingin yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar geostrategis dan geopolitik ketika itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Rezim Orde Baru yang menggantikan Orde Lama mengubah Indonesia menjadi negara pembangunan. Indonesia memasuki arus besar perekonomian dan perdagangan dunia dengan mengembangkan kapitalisme yang semu di dalam negeri sembari menuruti kehendak aktor dan badan ekonomi dan keuangan global. Langkah ini belakangkan membawa Indonesia ke krisis dan instabilitas di bidang ekonomi, finansial, dan politik yang akhirnya merobuhkan Orde Baru itu sendiri.

Lebih lanjut lagi, rezim reformasi yang muncul sejak kejatuhan Soeharto pada 1998 tidak mengubah ciri pokok yang sudah melekat pada rezim-rezim sebelumnya, yaitu ketidakstabilan. Malahan, perkembangan dalam beberapa tahun setelahnya semakin menegaskan ciri tersebut, yang ditandai dengan munculnya anarkhi yang datang susul-menyusul.

Pada tingkat warga negara, perkembangan yang menggembirakan juga sulit didapat. Warga negara pada umumnya tidak peduli politik dan malas mengikuti proses pengambilan kebijakan nasional. Akibatnya, negara menjadi semakin otonom dan asyik sendiri. Rasa rendah diri, atau lebih tepatnya "minderwardigheid-complex", masih mendominasi mentalitas mereka. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat sering kali tidak

bersikap kritis terhadap kekuatan-kekuatan utama di masyarakat, seperti neoliberalisme dan konsumtivisme, sementara media massa menjadi kepanjangan tangan pasar dan penyebar virus konsumtivisme.

Satu pertanyaan dapat diajukan di sini: Apakah dalam kondisi yang mengengaskan, yang mewarnai setiap halaman buku ini, demokrasi yang menjadi cita-cita reformasi bisa bertahan hidup dan bertambah kuat? Jawabnya adalah, "hampir mustahil". Kritik tajam yang diterakan di dalam buku ini mengarah pada kesimpulan yang serba buruk. Penggunaan perbendaharaan kata yang hebat dan kurang-lebih bombastis semakin menonjolkan kekelaman uraian, seperti kejatuhan, anarkhi yang membakar bangsa, kelas menengah yang berpesta pora tanpa henti dan tidak tahu malu, proses menuju keterbelakangan yang semakin menguat, gelombang penghancuran dan kesia-siaan, kepemimpinan nasional yang rapuh dan keropos, benalu *boakian* yang menghisap, negeri yang gagal, dunia politik yang centang perenang, dan lain-lain.

Dengan kata-kata dan pengungkapan seperti di atas, masa depan Indonesia paling-paling hanya dihadapkan kepada neraka. Disebutkan, misalnya, bahwa keadaan kita sekarang seakan sedang berada dalam keadaan yang tidak bisa dimengerti lagi (hlm. 93).

Pembangunan ekonomi yang dijalankan Indonesia telah menerbitkan kebijakan yang bermuara pada bunuh diri total... (hlm. 104). Juga disebutkan ciri paradoks politik Indonesia: Semakin kita dalam politik merasa bergerak maju dan modern, ternyata semakin kita bergerak ke belakang, ke dasar peradaban yang paling kurang beradab (hlm. 116). Yang tidak kalah gawatnya adalah reformasi di Indonesia yang setali tiga uang dengan beranak-pinaknya anarkhi. Akhirnya, proses pembusukan pada segala sudut kehidupan sedang berkecamuk sehingga negara dan bangsa sedang tenggelam di bawah dominasi pasar dan toko kelontong (hlm. 119).

Secara sambil lalu dan tergesa-gesa, sebenarnya ada beberapa syarat yang disebutkan dapat membebaskan Indonesia dari pintu neraka tersebut. Termasuk di dalamnya adalah menegakkan harga diri bangsa Indonesia; menerima sejarah secara objektif; menyimak tata dunia yang bergerak cepat; menggunakan perspektif yang menyeluruh dan sistemik, dan menghindari ideologi pasar bebas dan neo-liberalisme. Juga disebutkan perlunya mengembangkan inti pimpinan nasional yang baru dan belum tercemar yang akan meletakkan ulang dasar-dasar negara yang modern dan demokratis serta adil.

Akan tetapi, apabila ditempatkan di bawah sorotan keseluruhan uraian di dalam buku ini,

syarat-syarat tersebut tampak mustahil dipenuhi Indonesia. Supaya syarat-syarat itu dapat dipenuhi, maka kita harus mengubah segala sesuatu yang menurut uraian di dalam buku ini telah berurat-berakar sebagai ciri-ciri pokok Indonesia dan sejarahnya. Oleh karenanya, syarat-syarat tersebut tampak seperti utopia, dan usaha memenuhinya sama dengan menengiyahkan apa yang, sekali lagi, menurut buku ini, sudah menjadi tabiat masyarakat dan negara Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya yang dapat diajukan di sini ialah yang berhubungan dengan perspektif ilmu sosial dan humaniora yang diterapkan di dalam buku ini: Apakah cara berpikir ilmu sosial dan humaniora hanya akan menghasilkan inferensi berupa visi kelam dan *a counsel of despair*? Tidak dapat disangkal lagi bahwa sebagai suatu kritik, buku ini telah memaparkan perkembangan-perkembangan historis di Indonesia yang merosot, menerangkan konstelasi gejala dan peristiwa yang merugikan, dan kemunduran-kemunduran di dalam politik dan kebudayaan di Indonesia dalam berbagai periode kesejarahan.

Kendati demikian, dan supaya tidak hanya berfungsi menakut-nakuti masyarakat yang sudah berada dalam kesulitan yang menakutkan, ilmu sosial perlu mengkaji perkembangan historis di Indonesia

yang positif walaupun tidak lazim, menunjukkan konstelasi peristiwa yang mendukung perbaikan kendati langka, dan menunjukkan peluang-peluang meskipun peluang-peluang itu sempit. Dengan kata lain, ilmu sosial perlu mempertajam penginderaan terhadap kemungkinan-kemungkinan, bukan hanya menerapkan nalar probabilistik yang pada ujungnya menghasilkan kepastian yang tak terbantahkan, dan tidak dapat menawarkan emansipasi.

Supaya visi kelam yang bersumber dari nalar probabilistik yang dikedepankan di dalam buku ini dapat dihindari, beberapa hal berikut dapat dipertimbangkan. Yang pertama adalah penggunaan kuas yang jauh lebih kecil. Ini perlu dikedepankan karena penggunaan kuas besar di dalam buku ini telah gagal menggambarkan berbagai nuansa halus namun penting dalam masyarakat dan negara Indonesia. Dalam keadaan yang digambarkan sebagai anarkhi, para nelayan terus melaut, abang becak tetap menghela becaknya, dan penjual sayur masih menawarkan dagangannya. Ketika Indonesia dipimpin elite yang rakus dan korup, masinis kereta api tetap berangkat menjalankan lokomotif dengan lebih-kurang tepat waktu, pilot pesawat komersial tetap mengudara pada waktunya walaupun frekuensi dan tujuannya sempat dikurangi, dan orang tua masih terus mengantarkan anak-anaknya ke sekolah.

Penggunaan kuas yang lebih kecil niscaya akan memungkinkan tampilnya mekanisme-mekanisme mikro di dalam masyarakat kita, yang akan sulit kelihatan jika yang digunakan adalah kuas besar. Mekanisme ini sebenarnya amat besar peranannya dalam menciptakan ketertiban, memicu kerja sama sosial, menjalankan roda perekonomian, dan memungkinkan *governance*. Akan tetapi, mekanisme mikro tersebut jarang dibahas. Padahal, berbagai mekanisme mikro inilah yang berada di balik kenyataan bahwa keadaan di Indonesia sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkan atau yang seharusnya menurut uraian buku ini dan banyak analisis lainnya. Alangkah banyaknya kota dan kabupaten yang selamat dari konflik komunal serupa yang di Ambon, Poso, atau Kotawaringin Timur.

Kedua, selain menggunakan kuas kecil, cara berpikir yang lebih jitu dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan juga perlu dikedepankan sebagai pertimbangan. Salah satu di antara cara berpikir itu adalah melihat bahwa kondisi ekonomi dan kondisi politik tidak otomatis dan selamanya terkait. Sebagai contoh, suatu negara mungkin saja dilanda krisis ekonomi tetapi demokrasiya tetap berjalan normal, atau demokrasiya mengalami kemerosotan drastis akan tetapi perekonomiannya tidak ikut melorot tajam. Dengan kata lain, gejala

dan kondisi yang biasanya dilihat sebagai hal-hal yang terkait erat satu sama lain dapat dan mungkin saja terpisah di dalam kenyataan.

Cara berpikir yang lain lagi adalah yang dapat menerima ketidakselarasan dalam arti banyak fenomena bisa saja berlangsung dengan tidak sinkron. Seorang presiden, misalnya Abdurrahman Wahid, bisa menunjukkan kecenderungan otoriter dan demokratis sekaligus, walaupun dalam kasus dan waktu yang berlainan. Suatu masyarakat bisa saja maju di bidang politik tetapi mundur di bidang ekonomi, dan sebaliknya. Atau, masyarakat tersebut mengalami kemajuan di sektor politik tertentu dan mengalami kemunduran atau stagnasi di sektor politik lainnya. Apabila kecenderungan dan praktik yang otoriter masih tampak di kalangan pemimpin di tingkat pusat dan daerah, penolakan masyarakat yang meluas terhadap otoriterisme dapat ditemukan dengan mudah.

Begitu pula, pengungkapan dan penyidikan kasus korupsi di DPRD memang dapat melumpuhkan kinerja lembaga penting tersebut. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, hal itu membuktikan bahwa penolakan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang sudah dapat menjelma menjadi kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Dengan kata lain, mata rantai penyalahgunaan

kekuasaan bukanlah takdir suatu masyarakat, melainkan sesuatu yang bisa diputuskan.

Dalam konteks seperti ini, tugas analisis dan kritisisme sosial adalah menemukan kemungkinan-kemungkinan dan menggagas jalan keluar dari berbagai kerumitan, betapapun sempitnya peluang yang tersedia. Buku ini telah memaparkan bahaya dan krisis yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan yang diterakan dengan singkat di atas menunjukkan bahwa di balik bahaya dan krisis itu ada kemungkinan dan jalan keluar. Bukanlah di mana ada bahaya di situ ada keselamatan?

Daftar Isi

Pengantar Redaksi ♦ vii

Pengantar:

1. Tom Jacobs ♦ xi
2. Teuku Jacob ♦ xix
3. Rizal Panggabean ♦ xxv

Pendahuluan ♦ 1

Bab I - Dari Eufemisme ke Metafora ♦ 7

Bab II - Anarkhi ♦ 15

1. Landasan berpikir ♦ 15
2. Nasionalisme ♦ 20
3. Pimpinan nasional ♦ 24
4. Kerapuhan struktural ♦ 26
5. Alur sejarah ♦ 29
6. Kelas penghisap ♦ 32
7. Geo-Politik ♦ 37
8. Hambatan struktural ♦ 43
9. Virus neo liberalisme ♦ 46
10. Pilihan yang mungkin ♦ 49

Bab III – Tata Dunia ♦ 53

1. Bumiputra ♦ 54
2. Pragmatisme ♦ 67
3. Dalam Mitologi ♦ 76

Bab IV – Makna Politik ♦ 83

1. Model Politik ♦ 83
2. Globalisasi Ganda ♦ 99

Bab V – Jeda Pengetahuan ♦ 113

1. Paradoxa ♦ 113
2. Reformasi ♦ 118
3. Meretas jalan ♦ 121

Penutup ♦ 131

Indeks ♦ 135

Biodata Penulis ♦ 139

Pendahuluan

Sudah sejak beberapa tahun ini, yang di Indonesia dikenal dan akan dikenang sebagai masa reformasi, dunia kita seperti sedang demam dengan kegusaran akan segala rupa yang bersifat rampung. Seperti "the end of millenium", "the end of history" atau "the end of ideology". Atau kadang kala demam akhir itu dibingkai dalam sebuah perasaan lain yang tidak terlalu berbeda, tetapi dengan tekanan pada kesan sebuah jaman sudah lewat, tapi jaman baru tak kunjung tampak. Ada "post colonial" seperti juga ada "post modern".

Aneka penyifatan keadaan seperti itu bukan hal yang dapat dilewatkan begitu saja, karena dalam aneka ragam sifat yang disebutkan mengalir keadaan yang sesungguhnya tak lain dari telah sampainya peradaban itu dalam sebuah titik balik. Jaman modern yang sudah bergerak selama empat abad itu sudah sampai pada sebuah titik, dimana kemajuan dan perubahan tidak lagi berarti sebagai lebih baik, lebih bermakna dan lebih manusiawi.

Karena ekonomi yang menciptakan kelimpahan tidak dengan sendirinya menghilangkan rasa kemiskinan, ilmu dan teknologi yang semakin hebat juga tidak memberikan berkah yang diharapkan, politik yang semakin baik organisasi dan mutu orang-orangnya tidak semakin memberikan rasa aman bagi semua warga, dan malahan agama yang dikenal murah hati dan dermawan itu juga semakin menawarkan aneka ragam fundamentalisme yang keras.

Titik balik seperti ini lalu memaksa banyak orang mulai berpikir ulang mengenai sejarah dan kenyataan sehari-hari yang semakin menjauh dari tampang yang bisa langsung diserap oleh indera dan pengalaman. Semakin lama semakin menjadi jelas bahwa tampak luar dan tampang adalah suatu hal yang lain dari kenyataan yang kita duga atau kita cari, karena tampang dan tampak luar sudah semakin lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri, seperti anda dapat temukan disemua produk informatik dan hiburan. Jarak antara kenyataan dan tampangnya sudah semakin kabur!

Karena kenyataan masyarakat sudah berubah sedemikian, maka dalam titik balik yang terjadi, segenap persoalan yang jika di masa silam dapat langsung ditangani di situs, sekarang sudah menjadi semakin nyata bahwa masyarakat bukan saja

semakin cair, tetapi juga semakin bertali temali dengan masyarakat lain. Semua orang adalah warga masyarakat, dan sebagai warga tidak ada kemungkinan untuk memberi arah pada gerak masyarakat. Paling jauh warga yang baik adalah warga yang patuh, dan kepatuhan itu tidak lagi terarah pada pimpinan ini dan itu, tetapi kepada mekanisme yang semakin berkembang di tengah masyarakat itu sendiri. Padahal apa yang disebut mekanisme itu adalah produk dari interaksi warga, produk dari tingkah laku, pikiran dan niat. Mekanisme inilah yang disebut dengan nama "struktur" sebagai suatu hal yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri yang kemudian justru mengatur serta mengarahkan masyarakat itu, dan walaupun perubahan dikehendaki, hal tersebut harus lewat struktur itu juga. Struktur atau mekanisme inilah yang memungkinkan masyarakat itu bergerak tanpa harus setiap kali berpikir, karena struktur tak lain adalah dunia maya dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam arti ini masyarakat semakin mandiri dan warga semakin terkurung.

Keadaan titik balik yang ditandai oleh perubahan struktural seperti inilah yang kemudian memaksa politik atau kemampuan masyarakat untuk menentukan dirinya sendiri kembali harus ditinjau ulang. Jika kawasan politik adalah masya-

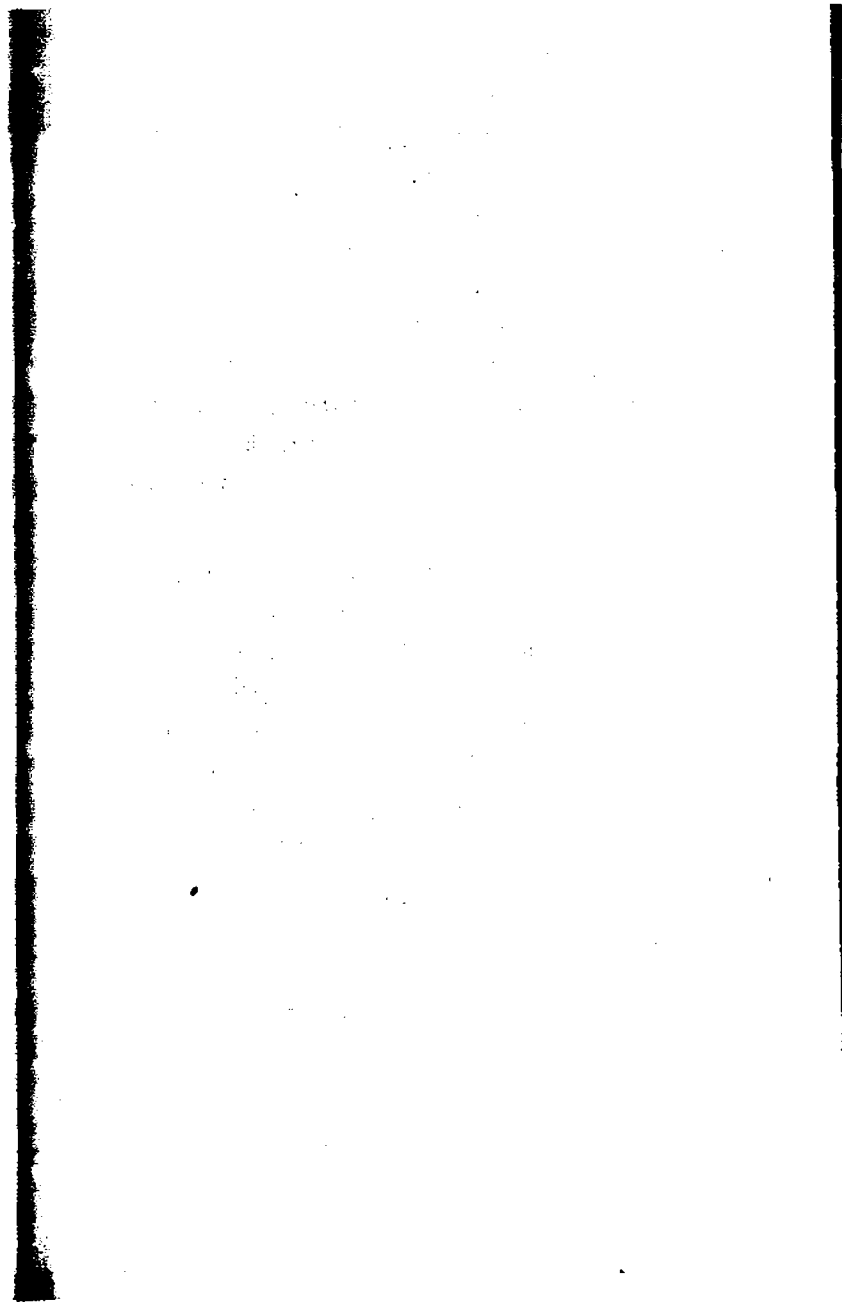
rakat pada tingkat bangsa dan negara, dengan sendirinya keadaan menjadi lebih rumit karena negara dan bangsa juga semakin tali temali dalam sistem internasional, dan bertemu dengan aneka arus pada tingkat nasional akhirnya membentuk sebuah arus raksasa yang semakin menjadikan warga negara sebagai unsur yang tidak mampu berbuat apapun karena nasib dan hari depan semakin lepas dari jangkauan tangan sendiri.

Tekanan struktural seperti ini yang semakin mendorong upaya untuk melakukan pemikiran ulang mengenai politik. Dan segera dorongan ini menemukan daya tolaknya di tengah masyarakat kita, karena hidup sehari-hari sebagai warga sudah terlalu berat untuk dapat dijalani. Politik hanya menambah beban, dan tampaknya juga tidak ada manfaatnya waktu dan pikiran dicurahkan untuk hal tersebut.

Terjepit antara jebakan struktural yang menekan dan rasa enggan yang menyebar luas dalam masyarakat kita itulah sesungguhnya yang merupakan proses yang mengantarkan masyarakat bangsa untuk bergerak semakin meninggalkan arus kemajuan ke depan, dan menjadikan Indonesia semakin lemah dan tak berdaya untuk bertarung di pentas dunia sekarang ini.

Berkisah dan menggambarkan proses yang terjadi tersebut, pada hakikatnya tidaklah terlalu berbeda dengan mengisahkan detik-detik akhir dari sebuah kematian bangsa. Dan walaupun kisah menuju kematian itu dituliskan, hal tersebut dilakukan, karena mungkin sekali menulis adalah hal terakhir yang masih mungkin dan pantas dilakukan, agar walaupun suatu saat nanti bangsa Indonesia padam dalam kelaparan, kesengsaraan dan kenistaan, catatan menuju maut dapat berguna sebagai sebuah tonggak ingatan.

Atau sebaliknya, catatan itu dapat dimanfaatkan sebagai awal dari perlawanan total melawan nasib buruk yang memalukan, atau sebuah akhir yang durjana. Pikiran yang benar atau paling tidak, tidak sepenuhnya salah, dapat dijadikan pijakan untuk melawan anarkhi yang tak lain adalah sebuah kegagalan dan ketidak mampuan seluruh warga bangsa untuk bangkit dan menegakkan harga dirinya.



Bab I

Dari Eufemisme ke Metafora

Rezim politik bukan saja dapat disimak dan dirasakan dari apa yang dilakukan, tetapi dapat juga dilihat pada gaya bahasa atau cara bertutur-sapa yang biasa dilakukan untuk mengungkapkan masalah politik. Ketika seorang penguasa melukiskan dirinya sebagai “penyambung lidah rakyat” artinya dia berbahasa dalam sebuah bahasa simbol. Dan kita tahu bahwa dalam bahasa simbolik, fungsi pokok yang dijalankan adalah kemampuannya untuk menggantikan hal yang disimbolkan yang mungkin hanya ada dalam khayal, atau berada di masa silam. Simbol juga dapat bertindak atas nama sebuah kenyataan, seperti bendera merah putih adalah simbol bangsa. Jika pemegang simbol itu adalah manusia -dia adalah pengejawantahan dari yang disimbolkan- maka manusia itu dapat bertindak atas nama hal atau khayalan yang jauh dan bertindak sebagai wakil yang nyata dengan hak dan kewajiban, sifat dan watak seperti yang disimbolkan itu. Sang penyambung lidah dapat berbuat

leluasa, sesuai dengan tafsir pribadinya atas simbol, dan karenanya suatu saat dapat berlaku seperti raja dalam sebuah monarki, laksana diktator dalam sebuah rezim otoriter atau mungkin sebagai presiden dalam sebuah republik.

Kemungkinan lain bagi seorang yang kuat dalam rezim politik dapat diteliti dari banyaknya teknik dalam menguasai aneka segi masyarakat dengan teknik yang lain yang tak lain adalah teknik "merendah untuk meninggi". Seperti kalau seorang penguasa melukiskan diri sebagai "anak desa", ungkapan yang sederhana ini tidak dapat diterima atau dimengerti secara harafiah begitu saja seperti pengertian umum bahwa sang pemimpin itu adalah orang yang tak terdidik, sederhana, bodoh dan miskin. Sebaliknya dari itu, lukisan diri yang sederhana dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dendam desa/kota, mancanegara/nagara-gung sedang dalam pergulatannya, dan anak desa bukan saja sedang mengambil peran seperti lajimnya sebagai kuli musiman, buruh atau pekerjaan rendah yang lain. Anak desa sekarang adalah seorang Ken Arok yang sedang duduk di singgasana! Ungkapan "anak desa" adalah bentuk yang amat kuat untuk menyatakan sebuah keadaan yang sesungguhnya keras dan kelam dengan bentuk lain yang lebih halus yang mungkin akar maknanya dijumpai dari

tata-bahasa Jawa yang mengambil bentuk *kromo*, sehingga objek pembicaraan tidak pernah disentuh langsung, dan ketepatan pengertian digantikan dengan bentuk yang lebih sopan dan halus yang dalam linguistik disebut eufemisme.

Dalam bahasa simbol, diri pengucap masih ada, hadir dan sedang berkhayal. Tetapi dalam eufemisme, seakan subjek itu menghilang, tersipu dan untuk mengangkat sebutir pasir saja, tidak ada tenaga yang menopangnya. Sementara bagi pendengar, eufemisme dapat menjadi sarana penuh kemungkinan salah tafsir, karena kalau dikatakan "anda sedang diamankan", artinya seseorang itu sedang ditangkap, diculik dan mungkin dituntaskan dalam waktu tidak lama lagi!

Dan akhirnya, jika hubungan kuasa-menguasai sedang bergerak ke arah dataran lain, tentu saja gaya bahasa juga akan bergerak. Jika kekuasaan yang ditangan itu bukan hasil perjuangan yang berdarah, atau bukan pula awal dari nafsu berkuasa yang amat kuat, tetapi kekuasaan itu hanya mirip harta karun yang diwariskan dan pewaris itu juga hanya kebetulan saja menerima testamen waris, maka jauh dalam hati penguasa baru itupun tahu bahwa tanpa baju kuasa orang juga akan ber"lu-gua" saja, tidak akan berbahasa *kromo*, tidak akan bersapa dalam simbol dan bahasa halus, cukup

dengan *ngoko*. Tetapi, demi upaya mewibawakan diri dan seakan mampu berwibawa, maka penguasa baru sejenis itu, yang bukan lagi orang kuat, tapi sekedar orang kebanyakan yang sedang menang undian, akan secara bersungguh berusaha untuk berbicara dalam bahasa normatip, atau kalau bisa sedekat mungkin dengan bahasa agama. Tidak mungkin penguasa itu menanggung beban kekuasaan di pundaknya sambil berteriak mengenai “penyambung lidah rakyat” atau sekedar “anak desa”. Beban politik digeser agar menjadi beban masyarakat, dan untuk mudahnya jika kesulitan dalam kancah itu sudah sedemikian tak mampu dia kuasai, maka berserulah dia bahwa masyarakat sedang “sakit” atau kalau mau lebih sakti lagi berkhotbah bahwa masyarakat itu sedang “rusak moral” dan “jatuh akhlak”nya. Gaya berbahasa seperti ini disebut metafora.

Dalam pertarungan politik kita, bahasa simbolik dan eufemisme masih bergerak dalam dataran manusia, karena penguasa itu sadar atau tidak mengambil kekuasaan dan bertanggung-jawab atas tindakannya itu, tetapi bahasa metafora adalah upaya untuk menggeser tanggung-jawab manusia yang biasa dan minta tolong kepada dunia setengah manusia setengah dewa, yang memungkinkan dihidupkannya kembali tradisi tua di Jawa yang disebut dewa-raja. Kekuasaan tidak didapatkan

dari pergulatan dan perjuangan, tetapi sepenuhnya adalah sebuah titah dewata, atau dunia supra-natural lain, apapun juga nama yang diberikan. Dan penguasa itu lalu digambarkan sebagai tidak mempunyai ambisi pribadi, *sepi ing pamrih*, hanya menjalankan perintah mutlak dari sumber segala kehidupan. Jabatan kekuasaan adalah amanah!

Post factum, gambaran politik di Indonesia akan jauh lebih mudah dipahami kalau kita simak gaya bahasa dalam setiap rezim. Sebab, ketika simbol Karno (dari wayang) menjadi simbol utamanya, maka seluruh gerak revolusioner yang bergolak itu akan lebih indah sosoknya kalau diletakkan dalam pola pemikiran wayang itu pula, yang mungkin mitologis, tapi mengendap jauh dalam ingatan sehingga ada keyakinan bahwa yang benar akan selalu menang, dan medan pertempuran digambarkan diam-diam sebagai Kurusetra, Pandawa-Kurawa, kiri-kanan, baik-buruk. Perang selalu bermula dengan perang kembang, dan dalam pertarungan di Kurusetra, pihak pemegang kebenaran akan selalu menang. Lalu untuk keperluan tersebut seribu satu kisah wayang diciptakan, dan ribuan versi akan tetap dapat diterima dan dinikmati sejauh tetap setia pada pakem. Epos dari India menjadi saluran roh nenek moyang diteruskan dari satu abad ke abad yang lain

Lalu ketika simbol eufemisme itu adalah “anak desa” menjadi tidak terlalu sukar untuk mengerti makna pembangunan, yang dalam arti program tak lain adalah pergeseran struktural atas bangunan ekonomi. Jika keadaan awal sektor pertanian mempunyai bobot paling besar, maka dengan akselerasi pembangunan bobot itu dikurangi, industri manufaktur semakin besar volumenya menyumbang kekayaan nasional. Artinya, dua hal serentak dapat dicapai, yakni masyarakat tradisional di-modernkan, tanpa dislokasi apapun, dan kemudian dengan program pembangunan seperti itu arah dan bobot pemikiran “anak desa” dari sebuah negara tertinggal akan memungkinkan bangsa dan negaranya naik kelas setara dengan negara industrial yang disebut maju dan modern, jika *take off* terjadi di-ujung sebuah rancangan pembangunan yang disusun oleh kaum cerdik pandai lulusan luar negeri, lengkap dengan konsultan asing dengan model model pembangunan yang rumit.

Sementara jika unsur utama dalam rezim itu adalah dewa-raja, dapat dipastikan bahwa kisah kawula dihidupkan lagi, dan disebut *wong cilik*, lalu para gusti itu boleh berfoya-foya dan mengembangkan kebudayaan dan moral yang tinggi dengan mengurangi sebanyak mungkin harta negara, seperti kebiasaan para raja Jawa di Mataram awal. Seperti tahta Mataram, khususnya sejak perpecahan Solo-

Yogya dalam perjanjian Ganti tahun 1755, yang disebut *palihan nagari*, maka tahta hanya dapat bertahan dengan menggadaikan atau menyewakan tanah dan pelabuhan kepada Belanda, mengundang orang asing sebagai peleraikan dalam pertaruhan suksesi yang tiada henti, menyerahkan pemecahan kerumitan politik kepada Belanda dan mereka hidup berfoya-foya dengan gaji dari pemerintah kolonial. Sistem itu dikenal dalam sejarah sebagai model unik dalam kolonialisme yang disebut *indirect rule*.

Nalar berkuasa selama jaman Mataram akhir ini tak mustahil akan ditempuh oleh para dewaraja baru yang muncul dari proses reformasi. Mereka akan melangsungkan hal yang sama, yakni menggadaikan kekayaan bangsa dan harga diri negara kepada para pemodal, dan penguasa uang dari manca negara, setelah negeri itu tercabik-cabik dalam kesengsaraan yang tidak ada jalan keluarnya. Dan semua ini dapat dijalankan dalam bahasa hukum, politik dan ekonomi yang super modern.

Jika rezim simbolik itu sudah tutup, dan rezim eufemistik juga sudah lewat, dan karena itu kita hanya dapat menyimpan itu dalam kenangan. Sebenarnya rezim metaforiklah yang sedang dalam proses konsolidasi kekuasaannya. Rezim metaforik sedang akan dimulai.

Dan karena itu tak bolehlah kita hanya memandang dan menatap, karena bagi mereka yang bukan anak keturunan dan kaum kerabat dewa raja, ada keharusan sejarah bahwa *blue print* tak sadar dari tradisi Mataram ini haruslah diperlakukan sebagai masalah pokok dalam politik hari ini dan akan datang.

Dua rezim yang silam—simbolik dan eufemistik—sudah jelas menjauhkan masyarakat politik dari watak republik yang demokratik dan adil. Dan jangan sampai terjadi rezim mutakhir yang metaforik ini akan mengulang kisah yang sama dengan pelaku dan korban yang berbeda, tetapi juga akan bertemu di detik akhirnya pada kajatuhannya serta kehancuran.

Hal yang harus dipertanyakan, secara teknis, adalah kenyataan bahwa demi sebuah *post factum*, cara pandang dan menyimak medan politik lewat langgam bahasa memang dapat menyumbang pengertian tertentu mengenai yang sudah terjadi, alur peristiwa dan titik runtuhnya. Dapatkah kita, dengan tetap tinggal pada dataran bahasa, medan politik yang *hic et nunc* (disini dan sekarang) dapat dijelaskan nafas dan nafsu dasarnya, alur kejadiannya dan nasib yang harus diterimanya ?

Jika keadaan politik sekarang dapat dirumuskan sebagai peralihan dari rezim yang eufemistik bergerak ke rezim metaforik, bagaimana kisah itu akan membuka diri dan berlanjut?

Bab II

Anarkhi

Setiap warga negara Indonesia yang dewasa tidak akan terlalu sulit untuk merasakan bahwa keadaan sekarang, dalam segala hal, adalah lebih sulit dan berat dihadapi dari keadaan lima tahun yang silam. Perasaan mudah ditemui, tapi pengertian sulit didapat. Pengertian mengenai masalah selalu memerlukan sejumlah perangkat gagasan, dan gagasan memerlukan keteraturan serta kejelasan agar pada akhirnya pengertian dapat diraih. Untuk tujuan itulah serumpun gagasan berikut disampaikan, semata untuk lebih baik mengerti keadaan yang harus kita hadapi bersama.

1. Landasan berpikir

Bermula dari paradoks. Dari istilah bahasa Yunani, *paradoxa*, kata kerjanya *dokein*, artinya berpikir, bernalar secara biasa. Maka *paradoxa* adalah berpikir dengan cara lain. Kata lain adalah *heterodoxa*, berpikir secara baru. Dalam kamus

paradoks diartikan sebagai “pengertian yang bertentangan dengan pandangan umum”. Tapi setia pada pengertian Yunani, maka disini yang di maksud dengan paradoks adalah sebuah keadaan dimana pengertian akan suatu hal tidak akan dapat diperoleh semata dari amatan inderawi atas suatu hal seperti kebanyakan orang, tetapi pengetahuan hanya akan muncul dari kejelian mengamati arus makna yang justru sebaliknya, bergerak atau tak sesuai dengan cermatan inderawi pertama dan langsung.

Suatu keadaan tidak dapat dimengerti secara langsung, karena keadaan selalu dalam keadaan bergerak, seperti juga amatan inderawi selalu se-fihak, tak menyeluruh. Dan akhirnya dengan paradoks yang dimaksudkan adalah membentuk pengertian dalam tiga langkah terus menerus, di awal selalu mulai dengan amatan, dan pada langkah berikutnya menerima amatan sebagai kurang lengkap, tak sesuai atau bahkan salah. Untuk itu pada langkah berikutnya haruslah mulai dibangun pengertian dasar yang menyentuh kenyataan, dan kemudian bergerak lebih lanjut dengan membangun kerangka berpikir itu sendiri, yang setiapak demi setiapak lebih lengkap.

Dan hal itu artinya kita harus dapat keluar dari sikap hanya menerima fakta sebagai fakta yang

disebut empirisme, yang hukum pokoknya berbunyi *adequatio rei et intellectus*, dimana otak dibayangkan sebagai cermin yang selalu akan mampu merekam kenyataan secara memadai (*adequatio*) atau sebaliknya kita juga harus keluar dari kesulitan yang mengatakan bahwa karena indera selalu bergerak maka pengetahuan itu tidak ada yang “benar”, karena hanya kesan saja. Dengan jalan berpikir paradoks, pengertian hanya akan lahir di ujung penjelajahan. Dan hal ini diperlukan untuk memahami keadaan kita, karena semua model cara berpikir dan bertindak yang dapat berjalan wajar ditempat lain-disebut teori dalam dunia akademik-, tiba-tiba saja, entah mengapa, di sini segalanya selalu berjalan terbalik!

Apalagi, karena pengertian adalah rekatan gagasan yang tali temali satu sama lain, maka pengertian memerlukan disiplin yang harus ditempuh. Malah lebih penting lagi, disiplin pengertian dikejar bukan semata demi mengerti, tetapi sepenuhnya selalu diarahkan demi membangun kemampuan dan kesadaran eksistensial bahwa “kita” adalah bagian dari proses itu, dan tidak mungkin untuk membiarkan proses itu berjalan menurut alurnya sendiri, tanpa campur tangan dari “kita”. Pengetahuan adalah bagian dari proses, dan hanya akan menjadi pengetahuan kalau semakin memungkinkan kita

mampu memberi arah pada proses, memberi bentuk dan makna yang manusiawi, bukan semata pada dunia sekitar, tapi juga pada kemanusiaan kita sendiri. Artinya, membangun pengetahuan bukan hanya menangkap bentuk, atau formal, tapi berusaha menangkap tenaga yang menggerakkan perubahan dan pertumbuhan, dan menjadikan diri sendiri bagian dari gerak sejarah itu. Pengetahuan hanya menjadi pengetahuan yang benar dalam arti yang lengkap kalau usaha tersebut dapat membuka "the condition of possibilities", sebuah kelahiran kembali terus menerus dari masyarakat dan diri kita yang adalah warga dari masyarakat tersebut.

Garis berpikir paradoksal, warnanya seperti warna asing, padahal jika kita cermati dengan baik akar bernalar seperti yang sedang ditempuh ini sesungguhnya dapat dirunut pada kebiasaan lama dari tradisi kita yang mengenal jenjang pengetahuan yang diberi nama antara lain syariat, hakikat dan makrifat. Jenjang seperti itu seakan hanya dapat dijadikan dasar penggolongan, atau langkah dalam perguruan, padahal jika ketiga penamaan itu dijalankan dalam satu nafas, yang akan ditemukan adalah garis bernalar yang di sini disebut paradoks itu juga. Artinya, berkat pendidikan modern, kita sudah semakin tidak memiliki daya rekat yang diperlukan dalam hidup. Kita hanya mampu ber-

nalar sepotong demi sepotong, serpih demi serpih, yang disebut dengan sebutan ilmiah dan objektif. Paradoxa adalah para ilmiah.

Melintasi tuntutan penalaran yang ilmiah nan modern, maka berikut disampaikan serumpun gagasan yang dibangun atas nafas tradisional itu. Sejumlah gagasan berikut yang akan disampaikan, dimulai dengan nasionalisme, karena nasionalisme adalah udara dan lingkungan alam kita sebagai warga negara. Kemudian akan diteruskan dengan pimpinan nasional, yang dalam aneka masalahnya secara lebih baik akan dapat dipahami kalau dikaitkan dengan struktur ekonomi, yang mendapatkan wujud sosialnya dalam birokrasi dan kelompok masyarakat yang menjadi pemilik sumberdaya ekonomi terbanyak, yakni kapitalis cina, hoakiau khususnya, tetapi meliputi juga semua "ersatz capitalist" yang ada. Perilaku kelompok sosial yang disebut *leisure class* adalah pokok lanjutannya, dan akhirnya bermuara pada keroposnya seluruh bangunan kelembagaan di tempat kita, termasuk rapuhnya inti pimpinan nasional yang dirangkum dalam kerapuhan struktural, yang untuk memahaminya lebih lengkap perlu menyimak tatanan supra nasional, sistem dunia.

2. Nasionalisme

Inilah tangkapan awal mengenai carut marut nasionalisme kita. Nasionalisme kita secara historis adalah sebuah akibat sampingan dari runtuhnya kolonialisme dalam bentuk negara kolonial yang dibangun Belanda di awal abad XIX yang lalu. Sedang kolonialisme itu sendiri adalah buah karya imperialisme yang akarnya adalah nasionalisme barat yang lahir dari pergulatan politik yang panjang sejak abad XVII. Karena itu, nasionalisme kita secara ideologi adalah jenis nasionalisme pramodern, yang lahir dalam konflik internal imperialisme. Sedangkan praktek kenegaraan nasional dijalankan dalam bingkai kepentingan nasional yang amat diwarnai keadaan dunia sejak tahun 50-an yang sarat dengan konflik ideologi barat kontemporer, kiri/kanan, yakni ideologi barat yang muncul abad XX. Pergulatan politik panjang – dari abad XVII sampai XX- yang melahirkan ideologi tidak kita kenali sehingga sejak awal republik. Kita hidup dalam adonan ideologis yang tidak pernah baik senyawanya. Karena itu kita tidak pernah bisa mengukur seberapa jauh kita sudah keluar dari model negara kolonial, atau seberapa jauh kita berhasil keluar dari bingkai konflik dunia abad XX, dan bergerak menuju negara kesejahteraan.

Apalagi, karena proses yang paradoksal tidak pernah disadari, maka sesungguhnya kita belum pernah mampu merumuskan dan memikirkan nasionalisme kita secara memadai, dan mewujudkannya dalam praktek kenegaraan. Atau dengan kata lain selama ini kita belum menangani "civic mentality" secara berarti, karena hanya dirangkum dan dipaket dalam lambang, simbol dan jargon seperti negara kesatuan, masyarakat majemuk atau ideologi nasional, Pancasila.

Rapuhnya ideologi ini lalu berakibat pada tidak menentunya langkah kenegaraan yang diambil. Politik sebagai pengaturan volume kekuasaan yang ada di sebuah negara selalu berjalan dari satu percobaan ke percobaan yang lain, dari satu temuan ke temuan lain, dari satu gaya demokrasi yang satu ke jenis demokrasi lain. Dan akhir dari percobaan hanyalah selalu kota yang terbakar, pimpinan yang dinista dan rakyat yang tidak tahu akan bergerak kemana sebagai manusia Indonesia. Warga negara belum pernah dapat lahir sejak jaman "revolusi belum selesai" sampai dengan jaman "pembangunan". Jutaan manusia yang hadir itu tetap bersikukuh sebagai rakyat, dan pimpinan negara bergerak dalam mimpi mereka masing-masing.

Dalam arti geo-strategi, keadaan semacam itu menjadikan kita sebagai negara tidak pernah

mampu meletakkan garis pertahanan yang handal, dan menyusun strategi bergerak yang tangguh. Ketahanan nasional tidak mungkin bertumbuh tanpa kewarga-negaraan, karena rakyat, juga dalam pertempuran, hanya akan menemukan bentuk bersamanya dalam laskar, dan bukan dalam tentara reguler yang mendapat gaji dari negara. Dalam peta dunia, kita selalu terlalu rapuh terhadap gejolak sistem dunia, seperti Soekarno yang jatuh, salah satunya, adalah karena arah politiknya tak sesuai dengan *national interest* Amerika, dan Soeharto yang lengser diterima akibat gelombang pasar uang dunia.

Kesemuanya itu terjadi karena rakyat belum pernah naik derajat menjadi warga yang utuh dari sebuah negara yang nasionalis dan modern.

Seperti kita alami selama ini, ideologi dan kesadaran warga yang tidak pernah digarap secara utuh dan matang ini hanya dilakukan secara indoktrinasi saja, seakan hal itu sudah ada, matang dan tinggal diwariskan, seperti dalam pelajaran kewiraan atau kursus P4. Dan akibatnya sudah barang tentu adalah rapuhnya dasar-dasar bernegara itu, karena ideologi sepenuhnya tergantung pada rezim, dan dengan sendirinya hal yang begitu penting akan ikut lenyap atau lahir bersama dengan rezim politik yang roboh dan datang. Kesadaran warga hanya dijadikan alat legitimasi *regime* dan bukan

dasar kesepakatan strategis seluruh unsur bangsa. Indoktrinasi sebagai bentuk kurang pantas dari penggarapan ideologi segera juga bisa dilihat akibat lebih nyata pada sejumlah kebijakan strategis yang mudah berbelok arah, seperti kebijakan ekonomi konglomerasi, misalnya, yang jelas tidak mudah dicerna dalam nalar kita, karena bersandar pada konsep garis lurus *infant industry*, berlanjut dengan pemenuhan konsumsi dalam negeri, dan berakhir di dalam mimpi *take-off* dan *trickle-down*. Konglomerasi juga setali tiga uang wataknya dengan rezim politik yang melahirkan dan mendukungnya, dan serta merta roboh sempurna, ketika rezim induknya juga roboh. Dan selanjutnya konglomerasi langsung menjadi beban yang menguras seluruh energi ekonomi bangsa, sehingga semua segi kehidupan disandera oleh bekas-bekas konglomerasi. Dan bentuk ekonomi seperti ini pada gilirannya berpengaruh pada pola hubungan elite nasional. Artinya elite nasional menjadi korban pola struktur ekonomi yang ada.

Sebuah lingkaran mematikan yang dapat terjadi karena rakyat belum pernah menjadi warga negara yang penuh dalam sebuah negara.

3. Pimpinan nasional

Pola hubungan elite nasional yang keropos sebagai wujud sosial politik dari dasar-dasar ekonomi itu terus berjalan sampai hari ini. Sehingga menjadikan sejarah kita selama ini sebagai sejarah kegagalan pembentukan elite dan inti pimpinan nasional yang mampu meletakkan masalah bangsa dalam kompleksitas yang penuh seirama dengan sejarah bangsa dan dinamik *world system* yang berkecamuk sekarang ini. Di tengah keadaan dunia yang amat terbuka, elite dan pimpinan nasional kita akan cenderung lepas tangan, dalam bentuk atau ikut pada arus yang ada yang disebut liberalisme baru, atau menolak dominasi asing itu, tapi dalam pola xenophia terselubung. Keduanya adalah cermin dari *kecerobohan* inti pimpinan nasional kita sekarang ini.

Kecerobohan itu mengambil bentuk paling mencolok pada kebencian kita pada sejarah bangsa yang objektif dan kesukaan berlebih pada *hagiographia* yang selalu menyanjung dan membesarkan berlebih peranan masing-masing kelompok dalam keberhasilan dan kehebatan perjuangan, yang bentuk umumnya adalah otobiografi yang selalu terlalu indah seandainya hal itu adalah kenyataan. Kita tidak ada yang mampu dan bahkan tidak mungkin belajar dari kegagalan bersama, sehingga

sampai hari ini kita tak sepenuhnya paham makna kejatuhan Soekarno dalam badai perang dingin, seperti juga lengsernya Soeharto dalam badai pasar finansial global. Kedua peristiwa itu dianggap saja sebagai kejadian yang telah lewat. Dan sebagai akibatnya elite nasional yang tersisa selalu mengalami degradasi mutu kepemimpinan nasional mereka, dan serta merta berubah menjadi raja kecil mengulang sindrom jatuh bangunnya kerajaan Mataram! Artinya kemandirian dan kemampuan strategis itu semakin pudar dan semua unsur dalam bidang politik, ekonomi dan sosial bertali temali satu dengan yang lain dalam hubungan saling menyandera yang semakin mengunci diri dan semakin menjauh dari beban kesengsaraan rakyat. Terjadi proses paradoksal, dimana politik yang terhormat diganti politik dagang sapi, ekonomi yang terhormat diganti ekonomi "black market" dan masyarakat yang beradab diganti dengan masyarakat yang pemarah, mudah tersinggung dan saling membunuh untuk hal yang sia-sia.

Keruntuhan mutu pimpinan nasional seperti itu semakin diperparah dan semakin kehilangan makna di tengah dunia sekarang yang semakin hari semakin sistemik. Mereka akan selalu dan selamanya menjadi boneka permainan gelombang sistem dunia yang semakin kompleks dan bergerak dengan

cepat. Tidak seperti tindak elite Eropa yang baru-baru ini mengukuhkan masyarakat Eropa berwarga 450 juta menghadapi Amerika yang semakin gamang selalu bermain salah di pentas dunia. Tidak seperti pimpinan Cina atau Jepang yang selalu mampu meletakkan diri mereka sebagai komandan satuan-satuan formasi perang dalam bidang ekonomi, teknologi, militer atau politik. Mereka mereguk seluruh kekuatan dalam batas teritorial mereka untuk maju bersama di pentas global secara bersama dan terkoordinasi, serta terarah sesuai dengan visi strategis mereka di tengah *world system* itu. Pimpinan nasional kita amat *myopic* dan sibuk mengurus kekuasaan saja.

Nasionalismenya masih berada pada jaman pramodern. Mental pulau masih jauh lebih kuat dari mental Nusantara, dan amat jauh wataknya dari mental benua yang dijalankan oleh orang Eropa, atau mental kepulauan (*archipelago*) yang dijalankan oleh Jepang.

4. Kerapuhan struktural

Bagi anak-anak bangsa Indonesia yang belum tersapu punah bersama pimpinan yang ada itu, apakah yang dapat mereka sumbangkan untuk negeri agar tidak terjadi proses kemunduran terus

menerus yang dalam bahasa umum disebut sebagai afrikanisasi? (Afrikanisasi adalah proses nasionalisme dan demokrasi di sebagian besar negeri Afrika yang berakhir dengan menguatnya tabiat suku dan raja kecil, yang tak lain adalah gerak retrograd dari ketidakmampuan sebuah bangsa menghadapi tantangan jaman. Secara ekonomi tetap tergantung pada pertanian, secara politik amat tribal, dan secara sosial menumbuhkan kembangkan radikalisme segala rupa, sehingga ujungnya adalah selalu *ethnic cleansing* seperti terjadi di Rwanda atau Sudan atau Nigeria). Untuk menahan gerak retrograd alias afrikanisasi dan anarkhi yang lajimnya disertai dengan kelaparan nasional dan perang suku, hal apa yang dapat dan harus dikerjakan? Sambil melakukan persiapan untuk mampu melangkah ke depan, hal apakah yang harus mulai dipikirkan dan dirancang?

Paling tidak terdapat tiga kelompok masalah yang harus secara lebih baik dicermati:

- (1) Setelah kita saksikan betapa rapuhnya negeri disapu oleh badai perang dingin (Soekarno) dan badai ekonomi global (Soeharto), hal apakah yang mampu kita pahami sebagai *kerapuhan struktural* kita? Mengapa kedua pimpinan nasional itu bersama inti elitnya tiba-tiba saja sekedar jatuh sebagai korban tak berdaya, dan kita ramai bersorak kegirangan untuk kekalahan

nasional kita itu? Mengapa tidak pernah tumbuh keyakinan dan kesadaran bahwa kejatuhan mereka adalah kejatuhan kita semua, sehingga tidak sedikitpun kita bisa belajar dari sejarah?

(2) Atau jika kehancuran kita sekarang belum sampai pada titik nadirnya sejak 1998 itu, lalu langkah strategis apa yang mungkin dilakukan, sehingga jika titik nadir itu tersentuh, kita tak akan dikejutkan oleh kenyataan bahwa negeri kita hanyalah sekedar sejenis negeri Uganda (Idi Amin), Zimbabwe (Robert Mugabe) atau Haiti (Aristide) yang tak lain adalah negeri yang gagal total, hanya kumpulan orang biadab dan tidak mengerti sopan santun berkuasa? Kalau kita tidak membuang waktu yang tersisa untuk terjun dalam politik pentas yang ada sekarang dengan seluruh *time scheduleny*, lalu hal apa yang dapat dilakukan, agar kehancuran itu tidak mutlak? Mungkinkah dibangun sebuah *kekuatan cakungan* (*tergugal basis*) yang hanya akan berfungsi jika nantinya ternyata seluruh bangunan formal itu roboh dan masih tersisa kemungkinan kepada siapa pimpinan dapat diharapkan datang?

(3) Dan akhirnya dalam hal apa saja kewaspadaan harus tetap maksimal untuk menjaga agar bangsa tidak semakin terjerat dalam rawa-rawa masalah yang semakin ruwet dan menutup kemungkinan

jalan keluar? Dalam hal apa saja kesepakatan akan kepentingan nasional harus dibangun dan dikembangkan, sehingga rekatan baru inti pimpinan tetap terjaga dan kecerdasan mengelola bangsa yang kompleks semakin bertumbuh?

5. Alur sejarah

Seluruh pemikiran yang disampaikan dan gerak ke depan yang disarankan sesungguhnya berdasar atas kenyataan sudah mengalir dalam sejarah dan kesadaran kita yang intinya dapat disederhanakan seperti berikut:

- (1) Secara objektif, sekarang ini sumberdaya kita sudah semakin habis, sementara masalah nasional beranak pinak dan tidak ada yang diselesaikan secara tuntas. Keadaan tidak bergolak, tapi suatu saat badai pasti akan tiba.
- (2) Konstelasi dunia abad XXI semakin menjauh dari dunia yang selama ini kita kenali. Sehingga *de facto* kemampuan kita untuk meletakkan kepentingan nasional kita secara lebih baik juga semakin sempit kemungkinannya. Peluang kita sebagai *late starter* sudah tertutup.
- (3) Kesadaran warga yang menjadi prasyarat hidup berbangsa semakin menipis, apalagi dengan

tambahan menyebarnya gagasan semakin mengaburnya batas negara dan kebangsaan yang muncul dari pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Nasionalisme seakan sudah harus masuk sejarah dan bukan kenyataan yang masih relevan dewasa ini.

- (4) Seluruh sistem kelembagaan kita sudah tidak mampu menjalankan fungsi dasarnya sebagai unsur kebangsaan. Konglomerasi yang gagal menjadi beban untuk semua pihak. Media yang bebas dan berkembang hanya menjadi alat penyebaran *life style* konsumeristik. Lembaga agama yang utama belum berhasil mendarat secara utuh diantara model hubungan agama dan negara, yang selama ini mengenal pola hubungan identik, dimana hukum agama identik dengan hukum positif, seperti dipraktekkan dinasti Ibn Saud, atau pimpinan agama melakukan kontrol langsung atas praktek politik lewat pemikiran Velayat Al-faqih, seperti dijalankan oleh Republik Iran, atau jenis lain yang sedang menjadi ajang pergulatan di Irak, dimana agama memiliki tugas dan tanggungjawab moral terhadap politik, tetapi tidak ikut campur dalam *power politics*. Masalah yang tak kunjung selesai ini, lalu membuat pimpinan agama kita juga sangat menderita ketika harus berhadapan dengan remeh temeh

politik harian yang sarat dengan perlombaan kekuasaan. Sementara dalam perlombaan kekuasaan itu sendiri, politik perwakilan juga tidak memperlihatkan kemungkinan terjadinya demokratisasi substansial, karena semua masih belajar, tetapi lebih banyak lagi yang saling mencuri kesempatan. Dan malah pendidikan tinggi yang harus menjadi topangan kemajuan bagi kadar keilmuan dan teknologi semakin berubah fungsi menjadi pusat kursus yang menjual gelar akademik. Dan distribusi gelar akademik itu dapat dilihat pada hampir semua nama pimpinan daerah yang dalam menjalankan tuntutan distribusi kewenangan politik, mereka hanya sibuk dengan desentralisasi administratif, yang berakhir dengan lahirnya raja kecil di banyak daerah, dan pada gilirannya selalu menjadi ancaman bagi kesatuan nasional.

Berhadapan dengan keadaan yang secara objektif hadir di depan kita, dengan sendirinya pilihan yang termudah bagi diri sendiri adalah sikap angkat tangan alias menyerah dan tidak peduli.

Tetapi memang sudah sedemikian sempurnakah demoralisasi kita, sehingga mengetahui keadaan ibu pertiwi yang sakit lalu membiarkan saja agar sang ibu menemui ajalnya secara tak terhormat?

Atau dengan tidak membiarkan diri termakan oleh sindrom menjadi penyelamat bangsa, kita membangun terugval basis, dan berupaya melakukan hal yang bisa dilakukan dalam keadaan krisis semakin berkembang. Artinya, *kita berupaya agar titik balik krisis nasional harus tetap berada dalam keadaan yang terkelola, dan tidak dilepaskan pada kekuatan liar* yang pasti hanya akan menjadikan kita semua sekedar sebagai korban, yang tidak mengerti mengapa semua hal bisa terjadi dan mengapa harus terjadi dalam kenestapaan seperti itu.

Menerima sejarah secara objektif adalah syarat awal dari kemampuan berpikir secara paradoksal, dan kemampuan menyimak tata dunia yang bergerak cepat adalah tuntutan yang berikut. Selanjutnya mengerti bahwa kita bermula dan akan berlanjut dalam arah yang selalu terbalik adalah menerima bahwa keadaan sekarang sudah memasuki tahap kompleksitas yang penuh dan hanya akan mungkin ditangani dari perspektif keseluruhan dan sistemik, dan tidak mungkin dimengerti secara serpih demi serpih dan dirampungkan bagian per bagian seperti selama ini dijalankan.

6. Kelas penghisap

Sejumlah masalah berikut dapat dijadikan pijakan awal untuk memungkinkan kita memahami

mengapa negeri kita menjadi negeri ajaib dan tak kunjung mampu keluar dari lingkaran setan yang menarik mundur gerak perubahan. Seakan ada mekanisme dalam hubungan kekuasaan dan moral yang khusus dan tidak bisa dimengerti secara wajar.

- (1) Jika di masa silam sudah terjadi privatisasi *national interest*, maka sekarang adalah lanjutan alamiah dari proses tersebut, yakni privatisasi struktur ekonomi nasional yang dijalankan atas tekanan dari lembaga dunia dan dijalankan secara terburu dan asal jalan. Wujud konkrit yang pertama adalah rusaknya birokrasi kita karena menganggap bahwa harta negara adalah harta nenek moyangnya, sehingga praktek lama yang disebut sistem upeti dijalankan penuh secara harafiah. Dan birokrasi menjadi busuk oleh korupsi. Sedang akibat dari hal yang kedua adalah kelumpuhan daya intervensi negara dalam membela kepentingan nasional. Sumber daya alam dan ekonomi dikuasai oleh pihak asing, dan orang-orang profesional kita sekedar menjadi alat mereka. Malahan lebih jauh lagi, para kerabat birokrat yang koruptip dan mereka yang selama beberapa tahun terakhir ini melakukan privatisasi struktur ekonomi nasional, semakin lama semakin memperlihatkan dan menegaskan proses sedang munculnya kelas sosial yang baru

yang berbeda dengan atau jauh lebih buruk dari kelakuan buruk kaum plutokrat Filipina yang menguasai "Makati area", atau kelompok India yang sangat maju dengan IT di kawasan Bombay. Kelas baru ini lahir dari kapitalis palsu (*ersatz capitalist*), yang mengumpulkan kekayaannya berkat hubungan khusus dengan penguasa, atau anak turun penguasa yang merampok harta negara, bersandar pada kebiasaan kesukuan yang semakin menebal, dan tak peduli bahwa praktek semacam itu melanggar aturan hukum modern. Perilaku mereka dapat dilukiskan sebagai hanya tahu berfoya-foya setelah perampokan tidak menjadi urusan hukum atau tidak dapat disentuh hukum karena hukum juga sedang dirampok! Kelas ini adalah kelas parasit yang lajim disebut *leisure class*.

- (2) Dalam bidang politik dan pengelolaan kekuasaan negara sudah menjadi semakin jelas bahwa desentralisasi politik tidak terjadi, tetapi hanya tercipta desentralisasi administrasi, sehingga tampak seperti mengalihkan saja kesempatan untuk korupsi. Di samping itu sistem pemerintahan yang presidential, tetapi dengan parlemen yang multi partai, sejumlah masalah tentu akan timbul. Kemungkinan politik semakin bersifat dagang sapi dan kompromi yang semakin

menjauh dari kepentingan nasional semakin terbuka.

- (3) Dalam bidang sosial dan budaya, semakin terbukanya masyarakat dan kebebasan yang mereka nikmati tidak akan dengan sendirinya tidak berarti sejumlah masalah strategis akan menemukan jalan keluarnya. Semisal masalah keadilan, antar kelompok, antar suku atau antar pulau. Dan khususnya masalah Cina yang menguasai sumber-sumber ekonomi secara berlebihan dan berakibat pada pola hubungan elite kita, visi masa depan macam apa yang dapat disampaikan agar semuanya dapat dirampungkan dengan adil dan benar? Masalah Cina bukanlah soal rasialisme, karena secara historis Cina di Indonesia selalu terletak dalam sektor ekonomi dan dikucilkan dari politik. Artinya di kalangan Cina selalu terjadi hubungan berbanding terbalik antara akumulasi modal dan kuasa, sehingga menciptakan struktur sandera menyandera. Tersandera di Indonesia, kapitalis Cina menemukan rasa aman jika mereka pulang ke negeri asal, bukan sebagai Cina tapi sebagai investor. Dan kemudian hubungan hoakiau ini dengan negeri induk semakin tersamar pokok masalahnya karena pemerintah Cina sedang mengembangkan *blue print* politik luar-negeri yang menghidupkan

ulang *tributary system*, tapi dalam pola terbalik. Semakin dekat ke perbatasan Cina surplus dagang akan diusahakan semakin tinggi, dan semakin jauh dari daerah pengaruh surplus semakin kecil. Maka, ketika kebijakan sejenis ini bertemu dengan perilaku Cina Indonesia, menjadi semakin rumitlah masalah Cina yang hanya disederhanakan dalam soal pribumi dan non pribumi itu.

- (4) Dalam bidang geo-strategi, hal apa yang dapat dijadikan pijakan tindakan berhadapan dengan sejumlah lembaga dunia yang selama ini mendikte dan menjadikan kita semata sebagai pasien? Seberapa jauh kita akan masuk dalam WTO, misalnya. Seberapa luas kita akan masuk pasar bebas? Dan apa yang dapat dilakukan untuk kontrol devisa, atau paling tidak menjadikan kita tak semata menjadi korban spekulasi valas dunia?

Dalam keadaan yang semakin memburuk dan serba tidak menguntungkan ini, dapatkah kita membangun sebuah visi masa depan yang mencakup semua bidang strategis, mengidentifikasi tenaga dan sumberdaya yang tersisa, dan menyusun dasar-dasar strategi yang akan memungkinkan bangsa kita semakin mampu meletakkan semua masalah dalam keterkelolaan yang memadai?

Tanpa kesediaan mengerjakan itu semua dan menggalang kekuatan di antara semua anak bangsa, hal yang paling jelas hanyalah satu: kita akan terbakar oleh anarkhi! Dan kita semua akan menjadi korban yang tidak mengerti serta merasa tak bersalah.

7. Geo-politik

Di masa lalu upaya seperti yang hendak dijalankan itu jauh lebih mudah untuk dimulai karena inti pimpinan nasional masih cukup tersedia dan dipermudah oleh masih kokohnya *remote control system* dalam geopolitik waktu itu, yang akan siap menyediakan keahlian, bantuan teknis atau juga dana yang diperlukan. Sedangkan keadaan sekarang sangat diwarnai sudah tipisnya *collective leadership* yang dibutuhkan baik dari kalangan sipil maupun militer, dan kebutuhan kekuatan luar untuk menjaga atau memperluas *sphere of influence* mereka juga sudah mengalami perubahan besar. Urusan menggarap elite nasional diserahkan pada tangan swasta, perusahaan yang lintas negara yang tidak mau berurusan dengan politik.

Pemecahan masalah strategis sekarang tidak mungkin lagi hanya disentuh dan dirampungkan pada tingkat negara atau pemerintah, tetapi sema-

kin berada di tangan kaum pengusaha dan pemilik modal yang amat menyebar. Sementara bagi bangsa Indonesia, masalah negara atau pemerintah justru sedang dalam kemelut, dan perusahaan yang ada justru menjadi beban dan *liability* bagi pemerintah.

Dalam peta dunia seperti itu, kekuatan nasional kita tidak berada dalam kondisi *prima*, dan justru karena keadaan terus memburuk, sejumlah tindakan darurat sudah mulai harus dirembug, dicari jalan keluar. Akan tetapi sebelum langkah itu dimulai, ada baiknya dimengerti keadaan dunia kita sekarang yang sudah berbeda dengan keadaan berapa dekade terakhir ini. Dalam ilmu perang sejak awal sudah dikenal pertarungan dua kekuatan seperti permainan olah raga. Dan doktrin seperti itu, jelas kawan/lawan, jelas aturan dan bobot kekuatan, ditutup ketika *Maginot line* digempur habis oleh Jerman dalam perang dunia pertama. Teknologi perang cepat segera lahir dalam serangan kilat, dan dibuktikan dalam perang dunia kedua oleh Jepang dengan menyerbu Pearl Harbour sampai perang Arab/Israel. Sementara jenderal Giap di tahun 70-an berhasil membuktikan strategi perang yang lain, yang dikenal dengan perang gerilya, yakni rakyat (bukan hanya tentara) yang menghadapi musuh dengan keunggulan apa saja. Dan Bush yang ingin melupakan Vietnam mencoba *virtual war*

di Irak, dengan hasil semu. Konflik dunia sekarang, dalam segala seginya masih berada di dataran Giap/Bush.

Untuk kita di Indonesia, keadaan dunia seperti itu memberi arah sendiri pada hal-hal strategis yang dapat atau mungkin ditempuh. Musuh sekarang ini tidak pernah hadir, tampak, terukur dan jelas sosoknya. Musuh atau bentuk ringannya halangan atau hambatan selalu mengambil wujud sebagai struktur, artinya sebuah bentukan yang hanya hadir bersama jika tindakan dilakukan. *Structural constraint* tidak pernah tampak, tetapi siapa saja yang masuk ke daerah pertempuran segera dia akan dijerat seperti kupu-kupu masuk jaring laba-laba. Artinya, jika struktur tak dikenali maka kekalahan adalah niscaya. Selama ini kita tak terbiasa mengenali hambatan struktural yang menghadang nasib bangsa. Dan mengingat betapa berlapis-lapisnya hambatan struktural sementara kaum *leisure class* tak habis-habisnya ber *carpe diem* dan membuang dana yang amat diperlukan oleh orang banyak, tak pernah dapat dibayangkan sekarang ini tindakan apa yang harus diambil untuk menghindarkan negeri kita jatuh dalam anarkhi yang memalukan di kelak kemudian hari.

Gambaran hambatan struktural itu sekarang ini yang paling baik dapat diperoleh jika kita simak

perang Irak yang "storm and awe" itu. Dimana alasan resminya adalah menegakkan demokrasi di Timur Tengah, dengan cara menjatuhkan Saddam Hussein yang menyimpan persenjataan berbahaya. Padahal gerak politik yang sesungguhnya tak lain adalah hendak ditegakkannya *New World Order* dibawah pimpinan Amerika, yang slogan utamanya adalah pasar bebas dan *civil society*. Lebih jelas lagi: hegemoni hendak dibangun berdasar masyarakat terbuka, yang tak lain ada masyarakat pasar, yang *de facto* adalah membatalkan perolehan kemajuan politik rakyat yang dijalankan dalam negara kesejahteraan. Karena itu Bush bersama gerombolannya disebut neo konservatif, atau hendak memutar balik jarum sejarah.

Dan apa yang terjadi di Irak?

Tirai neokon inilah yang membutuhkan Amerika akan hambatan struktural yang harus dihadapi, sehingga ketika perang secara militer diakhiri oleh kemenangan resmi Amerika, sesungguhnya perang dalam arti yang sepenuhnya sedang dimulai. Segera setelah perang berakhir awal perang yang baru diletakkan:

- (1) Pasukan garda republik dan fedayen yang merupakan inti kekuatan militer Irak tidak pernah dipatahkan, bersama seluruh kekuatan persenjataan

- (2) Bush buru-buru memutuskan bahwa perusahaan yang berhak ikut dalam tender pembangunan kembali Irak hanyalah mereka yang berasal dari mitra perangnya saja
- (3) Selain tentara reguler (sekitar 130.000), juga ikut dalam perang dan penanganan paska perang sejumlah *private security guard* (sekitar 30.000) yang segera muncul di media setelah skandal Abu Ghraib terbuka, sebagai kontraktor keamanan dibawah inteligen Amerika.

Artinya, doktrin perang Irak adalah doktrin baru. Bukan lagi perang adalah ujung manakala diplomasi gagal. Tapi perang adalah bentuk terselubung dari usaha pembukaan dan perluasan pasar dunia yang disebut *New World Order* itu, atas nama demokrasi. Sejak perang dimulai perusahaan swasta bekas tempat kerjanya menhan Rumsfeld sudah dilibatkan sebagai pemasok logistik, dan setelah perang resmi berakhir privatisasi dijalankan lebih jauh dengan mengikut-sertakan perusahaan swasta Amerika dalam posisi privilege untuk bidang pengamanan di satu pihak dan perusahaan swasta di bidang konstruksi, telekomunikasi, perminyakan dan sejenisnya. Artinya perang yang terjadi antara negara, oleh pihak Amerika sedang diprivatisasikan.

Hambatan struktural yang dihadapi Amerika yang sama sekali tidak akan tampak dalam *virtual war* ini paling tidak beberapa hal ini:

- (1) Inti pertahanan militer membaur dengan rakyat banyak sehingga garis batas perang dan tidak perang menjadi kabur.
- (2) Rakyat banyak yang tetap hidup dalam nasionalisme Irak dan/atau Arab terdiri dari aneka macam arus yang tidak mudah dikenali dan dipetakan, sehingga Amerika selalu salah memilih kolaboratornya. Kekuatan suku tetap sangat menentukan dan bangsa selalu terlalu lemah berhadapan dengannya.
- (3) Identifikasi Amerika dengan Israel berdasar atas ikatan ideologis membuat garis perlawanan itu meluas dan menyebar ke seluruh dunia Arab, dalam bentuk perlawanan hadang di tempat yang secara baik sekali ditampilkan oleh Al Qaeda.

Ketiga jenis hambatan struktural, yang timbul di tiga ranah –militer, politik dan ideologi– tidak dapat diramal oleh siapapun sebelum Amerika selangkah demi selangkah masuk dalam jebakannya. Sehingga dapat dipastikan bahwa gagasan besar neo konservatisme untuk merubah doktrin perang, lewat teknologi perang dan diplomasi yang tak

tertandingi, untuk membuka pasar baru di Timur Tengah setelah Arab Saudi, sepenuhnya dapat dipastikan akan berakhir dalam sebuah *attritional war*, perang berkepanjangan yang hanya dapat diselesaikan secara wajar yakni politik dan tidak mungkin dirampungkan secara militer.

Mereka yang di Indonesia berpikir tentang soal militerisme dalam dikotomi sipil/militer atau yang sibuk dengan *civil society* dalam pola pemerintah/LSM dan masih percaya bahwa pasar adalah mekanisme yang paling mujarab untuk menangani ekonomi nasional, sebaiknya mereka belajar dari benturan Amerika dengan hambatan strukturalnya dalam perang Irak ini.

Hal paling penting adalah kenyataan bahwa ideologi pasar (bebas) selalu akan buta terhadap ketiga hambatan struktural tersebut, yang secara sistemik memang berada di luar cakupan ranah pasar. Dan mampukah kita mendeteksi dalam hal apa saja ideologi nasionalis kita akan buta secara struktural terhadap hambatan yang harus dilampauinya?

8. Hambatan struktural

Seluruh uraian yang disampaikan ini adalah upaya awal yang harus dikerjakan lebih lanjut

dalam upaya menjawab pertanyaan terakhir itu. Dan langkah awal yang dilakukan sifatnya selalu mendasar, dan garis besar tetapi harus diikat erat dalam sebuah jalur pemikiran yang bergerak atas kesadaran mengenai keadaan alam pikiran dan praktek politik yang berkembang selama ini.

Secara konseptual, alur itu dapat disederhanakan dalam tiga tahap yang mencakup pergeseran paradigma yang berjalan seperti berikut:

- (1) Tahap awal politik adalah upaya penyelesaian konflik, entah lewat perundingan atau lewat perang. Konflik artinya adalah keadaan di mana terjadi benturan kepentingan pada tingkat yang sama, sehingga akhir konflik, di mana dan kapanpun, selalu berbentuk kompromi, konsensus atau perundingan perdamaian, pampasan perang atau kontrak. Konflik jaman kolonial kita berakhir tahun 1949 dengan konperensi meja bundar (KMB). Cara berpikirnya adalah positivistik, legal dan formal. Tokohnya Moh Hatta.
- (2) Tingkatan penting pada skala dunia dalam bidang politik di awal abad XX adalah munculnya pengertian kontradiksi. Hubungan kontradiksi lahir dari ragam kepentingan yang selalu berbeda watak, nilai dan kandungan ideologisnya. Sekarang yang bertarung adalah makhluk yang berlainan speciesnya, tak semata berlainan

jenis kelaminnya. Makhluk yang berlainan species ini dirumuskan dari doktrin Marx yang dilanjutkan oleh gerakan komunis internasional seperti Lenin, Mao atau Ho Chi Min. Kali ini hukum konflik adalah *Auseinandersvernichtung*, atau harus saling melenyapkan satu sama lain secara total. Bentuk global konflik jenis ini mewarnai peta dunia pada sebagian besar abad XX, dalam perang dingin. Dan skala mikro atau nasional kita mengurai dalam tragedi 65 beserta seluruh proses pembersihan dan sapu hangusnya. Nalar yang mengatur kontradiksi dalam skala dunia adalah dialektik. Tetapi karena dalam skala nasional nalar dialektik itu tak bersambung dengan kenyataan politik, maka korban yang berjatuhan akhirnya hanyalah mirip daun kering yang terbang tertiuip angin, dengan luka dan sedih yang sukar disembuhkan. Tokohnya adalah Soekarno

- (3) Dan sejak sekitar seperempat abad terakhir ini dunia politik sedang bergegas meninggalkan cara berpikir yang lama. Masalah dilihat, dirumuskan dan dicari jalan keluarnya dengan cara berpikir yang meninggalkan positivisme maupun dialektik itu. Cara berpikir dan bertindak dalam politik yang terkait rapat dengan kemajuan ekonomi dan teknologi (termasuk

teknologi militer) tak lain adalah garis berpikir yang disebut virtual, atau kompleks atau sistemik. Batas lama antar sektor seperti ekonomi, teknologi, militer, budaya dan seterusnya semakin kabur. Dan salah satu konsep pokok dari alam berpikir seperti itu adalah apa yang ditampilkan sebagai soal hambatan struktural. Korban hambatan struktural itu namanya Soeharto, yang tunduk takluk, akhirnya, terhadap IMF, sebuah lembaga dunia yang tak ubahnya seekor serigala berbulu domba.

Tak pernah terpikirkan dan terbayangkan bahwa dunia sudah bergerak secara lain, maka kita masuk dalam perangkat yang disediakan oleh kaum pemilik modal yang amat berkepentingan dengan tata dunia ekonomi baru maupun stabilitas pasar finansial. Musuh tidak dapat lagi dikenali dalam posisi berhadap-hadapan, karena kawan atau lawan semua membaur dalam sistem, sistem aliansi yang baru, sistem informasi yang berkembang terus menerus, dan *world system* yang tidak memiliki pusat fisiknya lagi.

9. Virus neo liberalisme

Lalu bagaimana kita tidak akan terus menerus tersungkur jika bergerakanya alam dunia dan alam

kekuasaan serta politik beserta langgam berpikir dan bertindak itu tidak mampu kita cerna?

Paling tidak, dengan cara analisa yang dilakukan sepanjang tulisan ini kita dapat menemukan sejumlah masalah strategis yang dapat diuji kenyataan dan bobot masalahnya, yakni:

- *Nation and state building* masih tetap dalam proses, dan mengabaikan hal ini kita akan terus menerus melakukan salah langkah dalam tindakan kenegaraan. Masalah ideologi dalam arti rekatan dasar semua unsur bangsa belum selesai, tetapi malah memburuk.
- Inti pimpinan nasional—baik militer maupun sipil semakin keropos—sehingga masalah bangsa tidak mampu dirampungkan dengan tuntas.
- Struktur negara secara amat berarti dihancurkan oleh birokrasi yang korup dan inti elite nasional semakin turun mutu kepemimpinannya karena sistem ekonomi yang salah arah. Mereka tidak mampu menjadi pimpinan nasional, dan terbatas sebagai pimpinan golongan saja.
- Dalam tampilan sosial, proses privatisasi kepentingan nasional dan diteruskan dengan privatisasi struktur ekonomi telah menghasilkan *leisure class* dan hoakiau yang berwatak menghisap seperti benalu yang berbahaya bagi

masyarakat luas, disebabkan oleh *life style* mereka yang konsumeristik.

- Dan akhirnya, karena terus menerus ditindas oleh ketidakseimbangan antara beban masalah dan daya serta kemungkinan menyelesaikannya, kecerdasan sosial masyarakat terus menerus tergerus, sehingga jarak antara negara dan masyarakat semakin melebar. Negara semakin tidak relevan bagi kebanyakan orang karena pimpinan politik hanya sibuk dengan *vested interest* mereka.

Artinya, pada tingkat negara, masyarakat dan politik, bangsa Indonesia sepenuhnya terus menerus masih dalam keadaan meluncur ke bawah, menuju titik akhirnya yang disebut anarkhi, afrikonisasi dan kematian bangsa, seperti bintang yang padam karena kehabisan energinya.

Energi bangsa itu padam karena terkena virus yang menyebar luas sekarang ini, menyentuh pada seluruh jaringan sistem dunia, termasuk kita. Dan dalam genangan kesadaran kita yang centang perenang, ikon virus itu dapat kita kenali sebagai bernama neo-liberalisme. Virus itu tidak tampak, tapi dia bergerak secara giat melalui segala rupa jaringan: informasi, pendidikan tinggi, perusahaan, elite bangsa, LSM atau bahkan agama.

10. Pilihan yang mungkin

Untuk mampu meletakkan gerakan politik yang mengakar dan tangguh, hal mutlak yang harus diselidiki, dipahami dan dirasakan akibat lanjutannya adalah proses kerusakan yang terjadi secara menyeluruh pada tubuh bangsa yang wujudnya adalah pada kerusakan tata lembaga pokok. Lembaga pokok mulai dari agama, pendidikan, usaha dan sampai dengan sistem pengaturan politik semuanya dalam kondisi disfungsi.

Dan negara yang fungsinya adalah demi menjaga ketangguhan semua unsur dalam tubuh bangsa sesungguhnya adalah mirip dengan tugas beton cor dalam ilmu bangunan. Mulai dengan tentara yang memiliki daya paksa fisik, lewat birokrasi yang menopang hidup berbangsa dalam keseharian sampai dengan ikatan yang paling tak tampak tapi paling menentukan, yakni ideologi yang tak semata berfungsi untuk melestarikan rezim, tetapi diarahkan untuk merekat semua unsur agar tetap satu padu. Bentuk nyatanya adalah hadirnya inti pimpinan nasional yang meliputi seluruh warga.

Pimpinan nasional inilah yang harus menjaga agar semua orang yang berada dalam batas teritorial RI mungkin, mampu dan harus menjadi warga negara dan tidak menyempit dalam warga lembaga seperti agama, suku atau kelompok ekonomi.

Setelah masa reformasi diselesaikan satu babak, berikut muncul pilihan tindakan yang dapat diambil:

- (1) Inti pimpinan nasional harus dibangun ulang.

Jika pimpinan itu hanya mengambil, menggeser atau menghancurkan pimpinan yang ada dan muncul sesuai dengan prosedur demokrasi, yang terjadi bukan membangun pimpinan nasional, tetapi merusak proses demokrasi yang berjalan amat lambat dan menuntut kesabaran serta ketangguhan politik. Arah yang diambil adalah membangun terugval basis, titik pertahanan yang menyiapkan landasan baru.

- (2) Unsur-unsur parasit di tengah masyarakat harus dijinakkan, dibersihkan atau kalau perlu dihancurkan demi kepentingan semua warga yang bekerja. Khususnya birokrasi yang korup dan merusak diri serta hoaikau yang sudah terbukti tidak mampu menggeser diri dari kapitalis jualan hasil bumi menjadi kapitalis industrial. Kelas parasit dalam bentuk *ersatz capitalist* dan *leisure class* adalah dua kelompok strategis yang harus dapat ditata kembali dalam negara kesatuan RI.

- (3) Penghisapan atas keringat rakyat yang terjadi secara struktural seperti *terms of trade* yang selalu menguntungkan sektor industrial dan orang kota atau kebijakan ekonomi makro yang menjadikan

sektor pertanian sebagai penyangga surplus yang diharapkan untuk investasi industrial harus dihentikan. Di samping itu, kebijakan untuk tetap menengadahkan tangan dengan mematu-matut diri di tengah sistem dunia yang ada demi utang dan investasi asing harus dihentikan. Uang tidak datang ke negeri yang cantik dan ramah, uang akan mencari tempat dimana saja untung dapat memperanak untung, sekalipun di neraka!

- (4) Tali temali antara struktur ekonomi, inti pimpinan nasional dan sistem dunia yang selama ini berbentuk sinergi yang terbalik atau hubungan sandera menyandera harus secara lebih jelas dan tuntas dipahami dan dipatahkan.
- (5) Media massa yang terkait dalam teknologi informasi dunia yang dalam praktek keseharian hanya menjadi alat perluasan pasar yang mewujudkan dalam rangsangan akan konsumsi berlebih harus ditertibkan. Erosi yang diakibatkan oleh praktek pengejaran keuntungan semata seperti ini sepenuhnya berlawanan dengan tuntutan ideologi nasional yang harus spartan dan sederhana di tengah keadaan di mana sumber daya kita semakin kering dan tidak dapat diperoleh dengan mudah.
- (6) Ideologi nasional harus dipahami ulang bukan sebagai sarana pembenar atau legitimasi rezim

politik yang berkuasa, tetapi harus menjadi dataran bersama yang merekat, mempersatukan dan memberi tenaga pada gerakan politik yang merangkum, merengkuh dan memanfaatkan seluruh tenaga dan sumberdaya yang terkandung dalam batas teritorial negara kesatuan RI.

- (7) Lembaga internasional yang menjadi perpanjangan tangan gerak dunia yang disebut neo liberalisme tidak mungkin lagi diletakkan di singgasa terlalu tinggi, sehingga mereka menempatkan sebagai tuan yang terus menerus berhak mengawasi, mendikte dan memaksa kita tunduk takluk pada mereka harus diatur ulang pola kerja dan hubungan kita.

Dan akhirnya, prioritas di atas segala prioritas, adalah disatukannya, direkat, dibangun dan dikembangkan inti pimpinan nasional yang baru yang tidak mudah terjat dalam kerumitan struktural yang ditimbulkan oleh hubungan tali temali dengan struktur ekonomi yang salah arah dan salah bentuk. Tugas pokoknya adalah meletakkan ulang dasar-dasar negara yang modern dan demokratis serta adil, dan tidak sekedar mencari, merebut dan memanfaatkan kekuasaan politik di tengah perlombaan politik yang juga salah bentuk.

Bab III

Tata Dunia

Sudah disampaikan gambaran sekilas mengenai keadaan dalam negeri kita yang sedang bergerak menuju anarkhi. Seberapa kelam dan senyap keadaan, harus disadari bahwa keadaan sekarang dan akan datang sangatlah ditentukan arahnya oleh keadaan sejarah dan ruang lingkup kita bergerak dalam masyarakat internasional. Dan karena masyarakat internasional sekarang amat diwarnai oleh kiprah luar negeri Amerika, sedikit banyak patutlah disampaikan watak negeri raksasa itu dalam sosok dasar, dan sifat-sifatnya.

Seirama dengan cara pendekatan yang sudah diterapkan pada keadaan kita sendiri, hal berikut akan disampaikan dalam dataran linguistik yang lain yang disebut ikon. Ikon, seperti dikenal dalam senirupa yang adalah ikon Rusia, atau ikon alam komputer yang lajim itu, artinya adalah sebuah bentuk yang tidak saja dia mewakili hal yang lain seperti simbol, tapi dia hampir dapat dikatakan sebagai setali tiga uang dengan yang diwakili itu,

sehingga ikon dapat menjalankan tugas bahasa yang hampir mustahil, di mana hal yang hendak disampaikan sudah datang dengan alat untuk menyampaikan itu. Ikon dalam bahasa orang kristen adalah "roh sudah menjadi daging".

Gambaran tata dunia secara ikonik dimaksudkan agar keadaan internasional yang sesungguhnya amat majemuk, rumit dan terlampau amat luas cakupannya itu, hendak disampaikan dalam cara yang seringkas mungkin, tapi mengandung hal pokok yang ada sangkut pautnya dengan keprihatinan yang menjadi pokok masalah. Dua ikon yang diambil adalah bumi putra untuk bahasan dalam negeri dan pragmatisme untuk uraian kekuatan dominan sekarang ini yang adalah Amerika.

1. Bumi Putra

Sejak Suwardi Suryaningrat menulis artikel protes terhadap perayaan ulang tahun ratu Belanda Wilhelmina yang bertitel "Als Ik een Nederlander was", di kalangan kaum pergerakan ikon Inlander sudah berkembang menjadi salah satu kekayaan perjuangan. Inlander adalah lawan Nederlander, kaum bumiputra melawan kaum penjajah.

Dalam kaitan dengan aneka masalah bumiputra itu, di dalam pembicaraan orang-orang di jaman

yang lewat, sering terdengar keluhan yang panjang mengenai *minderwaardigheids-complex*. Sebuah istilah dalam bahasa Belanda yang sarat dengan psikologisme, dan lajimnya yang dimaksudkan adalah watak warga kita yang tetap sebagai *inlander*, dan bentuk seperti ini dikaitkan dengan pola stratifikasi jaman kolonial, di mana orang kulit putih adalah manusia mulia dan penduduk penuh dari Hindia Belanda, lalu orang Asia non Indonesia disebut *vreemde Oosterlingen*, alias timur asing, dan yang berada paling bawah di tangga sosial adalah kaum *inlander*, alias pribumi.

Secara politik, soal rendah diri ini dapat dikatakan sebagai akibat dari tunduk takluknya penguasa pribumi menjadi alat kolonial, sehingga tidak pernah tumbuh perlawanan dari penguasa tradisional itu. Dan, jika diteliti lebih jauh, akan tampak bahwa watak orang terjajah seperti itu, memang harus dimengerti baik dari segi nyatanya di masa itu, tetapi juga harus diletakkan dalam arus panjangnya, karena sebetulnya sistem kasta kolonial ini tidak terlalu jauh dengan keadaan struktur sosial di masa silam yang disebut dengan caturwangsa yang dapat ditemukan di daerah yang pengaruh agama Hindhu masih kuat, yang pelapisan sosialnya adalah seperti berikut ini. Kelas brahmana, ksatria, waisya dan sudra, kemudian dari

empat lalu menjadi tiga karena ada mobilitas horisontal di antara ketiga kelas awal, tetapi tidak terjadi gerak vertikal antara sudra dengan yang lain, inlander dengan yang lain, pribumi dengan yang asing. Sehingga sesungguhnya, sudah sejak masa yang lama masyarakat kita hanya mengenali dua kelompok masyarakat, penguasa dan yang dikuasai, pribumi dan asing. Pihak penguasa terdiri atas kaum agama, militer dan pengusaha. Artinya stratifikasi sosial dalam proses politik dan kolonialisme dengan segera berubah menjadi klasifikasi politik, dan klasifikasi politik itu lalu yang kemudian diteruskan di jaman kemerdekaan dengan menggunakan nalar yang sama. Bumi putra dalam langgam yang lain!

Apa yang kemudian disebut sebagai bangsa Indonesia sesungguhnya adalah hasil dari wacana politik seperti itu, yang bergerak penolakan dan perlawanan awal, lalu diteruskan dengan pertarungan militer dan politik selama masa revolusi, kemudian diteruskan oleh revolusi yang belum selesai, dan diputar kembali sehingga membentuk gerak putar dikhotomis seperti pri/non pri, sipil/militer, Jawa/luar Jawa, asing/ bumiputra, timur/barat dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya terlihat sekarang ini, desakan dari rendah diri itu semakin mewujud dalam seluruh lingkaran politik,

budaya dan bahkan segala rupa dan wujud masyarakat, *een natie van koelie!* Hanya saja kuli kolonial itu ada yang bermobil Jaguar, ada yang naik metro mini, ada yang berumah di *hacienda*, tapi banyak yang tinggal di bantaran sungai. Kebanyakan tetap senang dangdut, campur sari dan apalagi, karaoke!

Warisan kolonial ini kemudian mendapatkan kedudukan terhormatnya ketika seluruh kompleks gagasan dan struktur ingatan itu diangkut dan dipindahkan ke dalam ilmu sosial yang tumbuh pesat dalam beberapa waktu ini, tanpa diadakan kritik dan paling tidak tinjauan ulang. Dalam ilmu politik diajukan dan diperdebatkan pengertian kelas menengah yang ditunjuk untuk memainkan peran sebagai batu sandungan demokrasi. Dan hal ini dimaklumkan dengan kesungguhan politik yang amat mendasar karena terbukti (begitu istilahnya) perubahan dan kemajuan ke sistem politik yang lebih maju alias demokratis tidak mungkin dilakukan oleh massa rakyat, yakni kaum buruh dan petani, tetapi hanya oleh kelas menengah saja, kaum *entrepreneur*, kaum wiraswasta. Jadi negara kita tidaklah seperti Perancis yang menemukan demokrasi karena *tiers-monde*, atau rakyat, menyerbu dan menghancurkan penjara Bastille, atau bukan oleh *working class* di Inggris yang menggertak kaum tuan tanah dan majikan lewat revolusi industri. Dan

jelas bukan seperti orang Rusia dimana kaum *bolshevik* menghancurkan negeri *predator* dan menegakkan Marxisme dan memperkenalkan demokrasi sentralistik.

Ringkas kata, Indonesia adalah negeri yang unik, tiada duanya di dunia. Sehingga segala rupa konflik yang di dunia lain dengan amat susah payah jalan keluar itu harus dicari dan dijalankan tahap demi tahap, di tanah air, sebuah mantra cukup merampungkan segala urusan. Namanya *political goodwill*, alias maksud baik, yang hanya mungkin dimiliki oleh kelas menengah yang sudah terdidik, maju dan tercerahkan. Dan kemudian karena niat dan keikhlasan kelompok disetarakan dan ditinggikan ke dalam kancah kelas dalam ranah politik, dengan sendirinya kesemrawutan mudah menular ke tempat lain, bahwa hanya manusia bermoral yang baik yang akan mampu memimpin masyarakat politik dan dengan sendirinya hal itu lalu berarti kalau agama diberi tempat amat tinggi secara legal formal.

Betapa liarnya perpindahan dari satu medan ke medan yang lain, dan betapa nalar itu melompat dari bidang budaya, ke politik, lalu ke agama dan akhirnya juga ke ekonomi, yang kemudian membentuk lingkaran masalah yang teramat sangat ruwet, hal itu terjadi ketika kebijakan konglome-

rasi dijalankan atas nama kesahihan konstitusi, yang juga mengenali tiga jenis ranah ekonomi. Konglomerat adalah pengusaha yang baik, sadar akan keadilan dan berbakti kepada bangsa. Ketika dalam kenyataan mereka semua hancur serta menjadi drakula penghisap darah seluruh ekonomi, mulut itu tetap saja mengucap kelas menengah, kelas menengah, akhlak yang baik serta moral.

Artinya karena masyarakat kita yang majemuk dan kompleks itu dianggap sekedar sebagai sebuah sajian karedok atau nasi rames, maka disiplin berpikir yang mutlak diperlukan untuk mengenali masyarakat semakin redup, dan semua orang semakin lama semakin nyaman dengan kesemrawutan yang amat berbahaya dan membungkam seluruh kemungkinan akan lahirnya akal sehat. Atau lebih tepat lagi, akal sehat sudah dimusnahkan. Dan hasil akhir dari ideologi kelas menengah seperti inilah yang mematikan dan menjadikan semua upaya untuk membangun ruang negara dan kebersamaan itu selalu gugur di tengah jalan.

Hal yang selanjutnya harus menjadi pertanyaan adalah mengapa ideologi kelas menengah yang akar sejarahnya dapat ditelusuri dari jaman kolonial, yang akar ilmunya tidak sukar ditemukan dalam khasanah ilmu sosial yang diajarkan di sekolah kita, dan akar politik secara sosialnya tampak jelas

diwakili oleh para tokoh panutan ataupun selebriti kita, mengapa meski akibatnya sudah jelas amat merusak dan mengunci semua kemungkinan perubahan masyarakat ke arah yang lebih demokratis, mengapa hal semacam ini tidak pernah dianggap sebagai masalah untuk kita semua?

Dan sampai hari ini dengan merasa tak melakukan kesalahan apapun, masih banyak pihak yang menyebut jaman kita sekarang sebagai jaman "peralihan menuju demokrasi" dalam pengertian seperti terjadi di Amerika Latin, dimana ideologi kelas menengah itu berkembang dengan suburnya.

Karena itu, sebelum secara langsung kita memiliki kemampuan untuk mengurai dan membuang cara pandang pemecahan masalah tersebut, ada baiknya dikenali ideologi politik lokal yang dijalankan oleh penguasa tradisional yang ada seperti di Jawa. Ada tiga gagasan dasar yang dapat ditemukan dalam ideologi lokal yang menjadi latar belakang ideologi kelas menengah itu. Ideologi dalam arti yang penuh selalu memusat pada cacah, wangsa dan tlatah. Artinya sebuah negara Jawa, misalnya kraton Yogyakarta yang dibangun oleh Hamengku Buwana, tidak pernah terbersit dalam benak bahwa politik, pemerintahan dan negara adalah sebuah proses tarik menarik antara rakyat dan penguasa, dan karena itu perlu dokumen konsensus yang di

sebut konstitusi. Raja tidak bisa sewenang-wenang, tetapi semua keputusan harus selalu dikonsultasi dengan rakyat lewat perwakilan. Gagasan kontrak sosial tidak pernah tumbuh dan berkembang, tetapi langsung saja melompat ke sasaran akhir, yang bunyinya "tahta untuk rakyat" atau ideologi maksud baik politik yang paling tegas, yang memang dalam paham itu sudah mendapat warna sejak jaman kolonial dimana pegawai kraton adalah pengayom untuk rakyat, bak gusti manunggal dengan kawula.

Di lain pihak pula, sementara di bagian dunia yang lain justru kekuatan monarki itu sudah diletakkan sebagai penghambat kemajuan, sehingga kota harus berpindah dari sekitar istana dan dibangun di pusat-pusat jaringan dagang dan industri, yang dalam proses itu sebutan kota adalah *burg*, penduduk kota adalah *burger*, dan wataknya adalah *burgerlijk*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis menjadi *bourgeois*, yang asalnya adalah dari bahasa Inggris yakni *civil society*, dan kemudian diabadikan dalam Marxisme menjadi *bourgeois* berhadapan dengan proletar, antara pemilik/penguasa dan pekerja/hamba sahaya. Semua cerita gagasan semacam itu tidak pernah terjadi dalam gagasan bernegara di alam asli kita, sehingga hak mutlak rakyat atas *civil liberty* tidak pernah

masuk di ruang otak, tugas negara untuk menjaga *civil liberty* tidak pernah terbayangkan, dan pada akhirnya demokrasi yang dimengerti sebagai *necessary evil* juga lewat begitu saja, sehingga akhirnya demokrasi hanyalah gumam setiap orang yang asing satu sama lain, tidak kenal satu dengan lain.

Jadi karena sejarah kita adalah sejarah kolonial, maka gerak maju pemikiran mengenai masyarakat dan negara itu tidak pernah terjadi, yang kemudian semua ini dibalut dengan temuan para pendiri bangsa Indonesia modern seperti Hatta, Soekarno dan Soepomo dengan temuan koperasi dan semangat holobis kuntul baris.

Dengan kata lain, karena trias politika kraton (cacah, wangsa dan tlatah) tidak pernah mendapat tantangan dan renungan yang mengantarkannya ke jaman modern, tetapi langsung saja melompat secara verbal ke tahta untuk rakyat, sedangkan proses pemikiran yang terjadi di negeri lain amat sangat dinisbikan dan jaman kemerdekaan diwarnai dengan semangat demokrasi yang tidak jelas asal usulnya, maka begitu mudahnya setiap penguasa memberi sebutan rezimnya dengan nama demokrasi, kemudian diralat dengan terpimpin atau pancasila atau apa saja.

Apakah demokrasi itu sebuah *necessary evil* atau sesuatu yang paradoksal, penuh dilematik, ataukah

sebuah kontrak sosial yang dengan tegas menggariskan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang bertikai, hal semacam itu tidak pernah dan tidak akan pernah dipersoalkan di Indonesia, karena negeri ini sungguh-sungguh unik dan istimewa. Negeri yang lupa akan roh dari masa silamnya, dan gemar melompat-lompat tak jelas ujung pangkalnya.

Soekarno yang dibesarkan secara intelektual di paruh abad XX tentu mengenal gagasan *volksgeist*, yang kemudian dia carikan padanan pada nasionalisme yang didasarkan pada pengertian adat kebiasaan kita, yang disebut hak ulayat dalam hubungan dengan tanah dan gotong royong dalam hubungan dengan sesama. Sementara Soeharto yang dibesarkan jaman Jepang tentu secara langsung hidup dalam alam politik korporatik yang dipraktekkan di Jepang, dimana pengertian sipil dengan sendirinya berarti warga kelas dua, dan perusahaan negara serta *keiretsu* adalah bentuk ekonominya.

Mencari padanan dalam negeri dari konsep yang ditumbuhkan dari tradisi politik yang lain bukan hal yang buruk. Tetapi jika pekerjaan itu dilakukan lebih teliti, misal membandingkan *trias* politika Montesquieu dengan yang dari *kráton*, kita akan melihat perbedaan yang sesungguhnya

menjadi jebakan mematikan yang hanya nalar yang paling dasar yang akan dapat menyimaknya. Kesalahan pandang tidak disebabkan oleh tujuan dan alasan yang disengaja tetapi lebih disebabkan oleh kecerobohan berpikir karena disiplin memang bukan hal yang biasa di tempat kita.

Pemisahan kekuasaan negara dalam tiga lembaga yang secara lumrah dijalankan dengan seluruh kegiatannya itu untuk menjalankan demokrasi sesungguhnya adalah wujud prosesual dari substansi kedaulatan yang dipersoalkan oleh kaum liberal dan kontrak sosial. Padahal paham kedaulatan dalam tradisi kita yang berbentuk cacah, wangsa dan tlatah sepenuhnya meletakkan kedaulatan bukan pada kedua wawasan barat itu, yang liberal dan kontrak sosial, tetapi pada inti negara pada wangsa dan dinasti. Kedaulatan tidak terletak pada pengertian dan pergulatan hukum serta politik, tetapi tetap tinggal pada garis darah yang memegang kekuasaan, dan wangsa atau dinasti ini adalah pemilik, penguasa dan berdaulat penuh pada cacah atau warga, pada tlatah atau wilayah. Naluri wangsa inilah yang dalam politik sehari-hari muncul sejenis darah biru di panggung politik nasional sekarang, dimana anak Soeharto meneruskan wangasanya, anak Soekarno merebut kembali cacah warisan bapaknya.

Dan sejarah mencatat dengan baik bahwa dalam sejarah Jawa, perang suksesi selalu dapat diselesaikan hanya jika campur tangan Belanda itu disertakan dalam konflik dinasti. Wangsa di Jawa tidak pernah wangsa yang berdaulat sebagai inti negara, tetapi dia berdaulat atas warga dan wilayah yang keamanannya secara militer dan ekonomi dijamin oleh penjajah. Artinya, bagi kaum berkuasa di Jawa kolonialisme adalah darah mati hidupnya, sedangkan bagi para hamba sahaya, kolonialisme adalah proses pemiskinan mereka terus menerus tanpa henti. Melalui sewa tanah dan pembangunan benteng Belanda keamanan ekonomi dan ketentraman umum dijaga, sebuah proses simbiosis mutualis; sedangkan rakyat harus bersimbah peluh dalam upeti dan kerja paksa yang disebut sebagai *exploitation de l'homme par l'homme*.

Ini semua, masa silam itu, jelas tidak sama dengan gerak pemikiran dan praktek kenegaraan di tempat lain, yang ujungnya adalah demokrasi itu.

Keadaan semacam ini menjadi lebih kusut lagi ketika dimaklumkan bahwa penegak demokrasi adalah kelas menengah kita. Ketika roda ekonomi digerakkan oleh konglomerat dan keiretsu pemerintah seperti industri strategis. Dan dengan sendirinya wajah coreng moreng itu semakin sempurna dan kehancuran rezim salah bentuk seperti itu

seperti telah berhasil menghantarkan 220 juta warga itu dalam pusaran kemuskilan yang tidak bisa dimengerti lagi. Nalar hancur bukan karena dihancurkan, tetapi sekedar disapu oleh sejarah, praktek politik ekonomi dan militer.

Di atas nalar yang sudah tanpa bentuk seperti itulah baru tampak jelas munculnya demokrasi dan kelas menengah sebagai inti ideologi yang menecik. Dan ketika demokrasi serta kelas menengah itu berubah seperti dalam proses kimiawi, artinya menjadi mutan, semakin kita tidak tahu lagi mana unsur yang sehat untuk tubuh bangsa dan mana yang mematikan serta menimbulkan penyakit.

Inilah yang dimaksudkan dengan ikon yang berwujud dalam istilah *minderwaardigheids-complex* yang mengalami mutan menjadi demokrasi yang ditokohi oleh kelas menengah nasional kita, ditopang oleh privatisasi yang menguntungkan mereka, dan diramaikan dengan kebebasan sipil untuk membentuk partai politik, menerbitkan media massa dan berpesta pora tanpa henti, dan tidak tahu malu.

Mereka lupa peringatan kaum revolusioner Perancis, *après nous, la deluge*, artinya setelah pagi tiba dan kita rampung bermabuk-mabukan, malapetaka itu akan tiba. Malapetaka untuk rakyat, dan *hang over* untuk kelas menengah.

2. Pragmatisme

Sosiologi mengenai kelas menengah banyak didatangkan dari universitas Amerika Serikat. Agar supaya pengertian itu dimengerti dalam asal usulnya, ada baiknya jika dimengerti masyarakat jenis apa yang telah begitu gencar memajukan gagasan mengenai kelas menengah itu.

Amerika Serikat adalah negeri imigran dari segala rupa warna kulit, ras dan agama. Tidak seperti kaum transmigran di negeri kita yang selalu merasa dijeblaskan ke hutan belukar dan rimba penuh binatang liar, kaum transmigran di Amerika ini datang dari seluruh penjuru dunia dan menghadapi benua yang luas itu sebagai *wild west*, daerah terbuka, kaya dan luas. Karena mereka yang datang ke tempat baru umumnya sudah merasa sumpek dengan perang dan kesulitan hidup di tempat asal, dan di Amerika mereka menemukan alam yang terbuka, dengan sendirinya dua watak dasar yang muncul. Pertama, mutlak dan tak bisa ditawarnya *civil liberty*, artinya kebebasan warga dari sebuah negara. Dan kedua, selalu terdapat prasangka yang kuat untuk menolak campur tangan negara dalam urusan masyarakat. Istilah umum yang dipakai untuk melukiskan keadaan masyarakat yang aneka warna, cair dan bergairah itu adalah *melting pot*, artinya sebuah pundi-pundi dengan aneka macam

ramuan dan isi. Meski sejarah negeri ini penuh dengan pembantaian dan pembunuhan atas warga Indian, dan selalu belum bisa merampungkan hubungan rasial hitam/putih, tetapi masyarakat dengan jenis seperti itu tidak pernah berubah menjadi masyarakat rasial yang majemuk, atau masyarakat dualistik seperti terjadi di negeri kita.

Begitulah hidup mereka selama lebih dari dua abad ini, dan baru sekarang ketenteraman *melting pot* itu terganggu oleh pertumbuhan demografis seperti ini. Dari jumlah penduduk yang mungkin 200 juta itu ada dua kelompok yang khusus, yang pertama orang hitam yang sudah lama diimpor dari Afrika, dan kemudian sejak tiga tahun yang silam jumlah orang Amerika Latin yang berkelompok sebagai kaum Hispanik alias berbau Spanyol sudah melewati jumlah orang Negro. Jumlahnya sudah 40 juta, dimana 22 juta berasal dari Mexico. Kemungkinan konflik setara Anglo-Hispano dengan bahasa Inggris dan Spanyol inilah yang lalu mendesak seorang sarjana yang bernama Samuel P Huntington yang dalam dunia akademik Amerika nyaris sudah menjadi sejenis ikon, dan anehnya mereka lalu memberi gelar dalam bahasa non Inggris, sebagai *guru* politik dalam segala seginya. Untuk masalah strategis dalam negeri dia menuliskan risalah terbarunya berjudul "*Who are we? The*

Challenges to America's National Identity' (2004). Kisah yang disajikan berkisar pada persoalan yang muncul dari perkembangan demografis. Yakni sementara imigran Irlandia, Polandia, Italia atau Yahudi sudah menjadi bagian dari arus utama masyarakat, mulai dari presiden sampai dengan *capo di tutti capi*, maka kelompok baru yang dari Asia seperti Cina, Vietnam atau Korea juga mudah membaaur dalam masyarakat luas, maka kelompok Spanyol tetap berada di pinggiran, karena mayoritas mereka berasal dari negeri seberang batas yang bernama Mexico, negeri yang jauh asap dari api. Warga Mexico yang didera kemiskinan dan kekejaman di negerinya, dengan mudah lompat pagar dan mencari makan di Amerika Serikat di bawah nama imigran gelap.

Jika seandainya buku soal identitas nasional itu ditulis oleh seorang dari Zimbabwe atau Rwanda, tidak akan ada orang yang harus cemas, sekalipun penulis itu seorang pemenang hadiah Nobel. Tetapi karena risalah itu dikeluarkan oleh seorang profesor Harvard, masalah risalah tidak lagi semata dapat diterima sebagai risalah akademik biasa. Seperti pengalaman selama ini memperlihatkan, ketika Amerika amat bangga dengan keunggulan teknologinya, maka negara yang tidak mengenal agama negara memperlihatkan semangat dakwah yang luar biasa dahsyatnya. Seorang

Toeffler, misalnya, menggerakkan seluruh pikiran dan pena di seluruh dunia dengan futurologi lengkap dengan megatrend. Atau seorang Kuznetz tetap menjadi acuan siapa saja di dunia, termasuk di Indonesia, untuk mengimani pembangunan melalui jalur modernisasi, karena di masa sehabis perang dunia II Amerika berhasil membangun kembali Eropa lewat program Marshall, dan keberhasilan itu lalu sedemikian memukaunya, yang kemudian kita mendapatkan akibat jauh dari gelombang awalnya.

Di Amerika Serikat, apa yang dikenal sebagai dunia akademi bukanlah sebuah menara gading, tetapi merupakan salah satu dari mata rantai mesin hegemoni Amerika yang dewasa ini dikenal sebagai konservatisme baru, yang bukti kebrutalan mereka muncul secara amat jelas dan tuntas di Irak dan Afganistan. Sejenis manifesto neo konservatisme bagi politik luar negeri Amerika sudah disusun oleh orang yang sama yang menulis kegusaran kelas dominan menghadapi semakin membesarnya kelas bawah dalam masyarakatnya. Untuk konflik Amerika/Timur Tengah manifesto perang itu dibukukan dalam sebuah terbitan *The Clash Of Civilizations and The Remaking of World Order* (1996). Konflik peradaban yang ditulis itu sesungguhnya tak semata kajian akademik, tetapi adalah sesusun gagasan pembenar yang menjadi pedoman kerja,

arahan kebijakan dan serangkaian tindakan yang dijalankan oleh mesin departemen luar negeri bersama dengan kementerian pertahanan, dan dikepalai oleh seorang presiden. Diplomasi, militer dan riset akademik bermuara pada sebuah sungai raksasa yang disebut jalur konservatisme yang lebih keras, yang tak lain adalah penataan ulang sistem ekonomi dan politik dunia lewat ideologi yang khas Amerika, yakni ideologi paling asli dan primitif dari peradaban manusia yang telah dirumuskan oleh Darwin sebagai *survival of the fittest*, yang terjemahan politik-ekonominya adalah pasar bebas dan dalam rumusan gagasan disebut pragmatis!

Siapa saja akan mudah terkecoh oleh ideologi buatan Amerika ini karena dalam praktek diplomasi dan hubungan internasional, ideologi itu tidak saja diserukan lewat saluran politik dan infiltrasi, tetapi justru akan lebih deras disalurkan melalui jalur yang manis dan naif secara moral, yakni kaum muda yang terpukau oleh pesona wacana masyarakat sipil, hak asasi manusia atau feminisme, yang dalam bentuk kelembagaan di Indonesia sudah menemukan bentuk dalam banyak ragam komisi nasional dan lembaga swadaya masyarakat, yang artinya bukan swadaya tetapi adalah sejumlah yayasan yang dukungan hidupnya bersumber dari kebaikan hati donor, yang

kesemuanya berasal dari luar negeri. Artinya mereka tidak lagi semata dalam ruang antara masyarakat dan negara yang disebut sebagai organisasi non pemerintah (ornop), tetapi sudah mendapatkan kehormatan dalam tata pergaulan lembaga politik di Indonesia, sebagai sejenis pembawa suara kepentingan universal.

Padahal akibat dari kiprah Amerika dengan pragmatismenya seperti inilah yang telah menciptakan *brain drain* dalam skala nasional, sehingga orang muda kita terkesima dengan cara berpikir, berorganisasi dan beraspirasi politik model Amerika. *Brain drain* tidak terjadi secara fisik dengan keluarnya mereka dari tanah air, tetapi justru dengan tetap hadirnya mereka di tanah sendiri, tetapi mereka lebih Amerika dari orang Amerika di Amerika. Kelas menengah kita adalah makhluk ciptaan ilmu sosial yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat lain.

Jika dilihat dalam skala Asia, Amerikanisme itu akan lebih jelas. Sebab di India dan Cina yang sejak tahun 90-an yang silam diputuskan agar untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks, arah pertumbuhan tidak boleh lagi autarkik, tetapi 100% membuka. Artinya kalau Jepang di tahun 70-an telah berhasil untuk menggedor Amerika dalam industri *consumer goods*, khususnya elektronik dan automotif, maka di akhir abad XX diyakini

oleh pemimpin India dan Cina bahwa informatik akan berada di depan.

Hari-hari ini di kedua negeri raksasa ini sedang terjadi proses sebaliknya dari *brain drain*, karena kaum muda dan cerdas pandai itu dibuat untuk krasan tinggal di tanah air, tetapi aspirasi dan kreativitas diberi ruang global yang sepenuh-penuhnya. Hasil kerja otak mereka dalam dunia komputer atau informatika masuk pasar global, sambil mereka tetap main mahjong di Beijing atau menikmati kisah Mahabharata di Mumbai. Proses ini disebut *brain gain*, karena yang masuk pasar global bukan tenaga kerja yang putra nasional itu, tetapi produk pikiran mereka yang bertemu dengan kebutuhan pasar global. Dan di bidang seperti ini akhirnya Amerika harus menerima masalah yang muncul daripadanya karena untuk Amerika yang industri dan ekonominya sudah berada pada taraf *post industrial*, *outsourcing* seperti ini mengancam pasar kerja terdidik yang paling handal dalam alam persaingan sekarang ini.

Hal yang amat tragis bagi kaum cendekiawan kita adalah kenyataan bahwa orang muda Cina dan India meletakkan pertaruhan itu dalam pertarungan, sementara kita di sini semua sibuk dengan menengadahkan tangan, mengemis dana pada penyangandak dana, semisal USAID, Asia atau Ford

Foundation, agar mereka dapat melakukan kegiatan sambungan dari misi Amerikanisme, yang umum sebutkan sebagai kegiatan *advocacy*, pelatihan atau sejenis itu.

Jika untuk kepeningkepalaan Amerika setelah Uni Sovyet jatuh, orang-orang muda kita ramai dengan masyarakat madani yang memang menjadi slogan masyarakat baru paska komunis yang di-ekspor habis-habisan di Indonesia sejak tahun 80-an, lengkap dengan arahan *good governance*. Dan kemudian ketika Amerika menghadapi masalah Afganistan paska pendudukan Uni Sovyet, di akhir tahun 90-an, terorisme menjadi kata kunci dan semua orang membuka buku Huntington mengenai konflik peradaban sampai dengan hari ini, lalu bisa dibayangkan apa gerakan ekspor model intelektual yang akan datang setelah masalah identitas nasional ini dilantunkan?

Sebaiknya dimengerti bahwa ekspor model intelektual dari Amerika itu tak lain dan tak bukan dari usaha sebuah imperium untuk menutupi wajah hegemoni militer dan kesulitan ekonominya, dengan tameng moral dan intelektual yang netral, artinya baik untuk semua orang di semua tempat. Amerika sedang memproklamlirkan universalisme baru yang sepenuhnya lokal Amerikal. Karena pemalsuan seperti itu, Amerikanisme yang sedang berjalan

sekarang haruslah diterima sebagai amuba dan bakteri, dan bukan sebagai vitamin atau obat kuat.

Dalam sebuah riset pendapat umum yang dilakukan oleh *Pew Research Center*, yang hasilnya bisa kita simak di media massa Amerika, tengah Maret 2004, sudah jelas bahwa dunia non Amerika semakin melihat negeri ini tidak dapat lagi dan tidak boleh lagi dijadikan acuan, karena watak semau sendiri atau *unilateralist*, semakin tidak bisa diterima akal sehat lagi. Seperti Al Qaeda tidak bisa hidup tanpa musuh abadi, jadi bukan semata musuh politik, maka fundamentalisme konservatif yang lahir dari pragmatisme model Amerika juga selalu membutuhkan musuh. Pada langkah awal musuh diletakkan di luar, di negeri lain, di ideologi lain, lalu ketika musuh itu tak juga musnah, letak musuh digeser ke tempat lain, ke dalam kalangan sendiri. Amerika atau terorisme mengambil pola gerakan yang sama, Al Qaeda juga membasmi sesama muslim, dan Amerika juga mempersoalkan kehadiran sesama warga kulit putih yang kali ini disebut konflik Anglo/Hispano. Selain menolak barat, Al-Qaeda juga berniat untuk memurnikan ulang dunia muslim yang sudah tercemar, sehingga ruang perjuangan mereka juga internal dan eksternal. Seperti Amerika yang awalnya mulai dengan menduduki dan menguasai Timur Tengah, kemudian disusul dengan musuh baru dalam batas negeri,

yang bukan Negro atau imigran Asia, tetapi adalah kaum Hispanik yang sama-sama kristen dan berkulit putih. Terhadap dunia luar Amerika menyatakan sebuah "clash" dan terhadap kelompok bawah dalam masyarakatnya sendiri mulai diper-solakan "identitas" nasional mereka.

Pada akhirnya haruslah dimengerti bahwa tata dunia yang dikehendaki oleh titah pragmatisme Amerika sesungguhnya tak lain dari upaya untuk mengukuhkan keadaan sekarang sebagai yang terbaik. Perubahan dianggap sebagai musuh selama hal itu merugikan kepentingan Amerika sebagai penguasa tunggal dunia. Aneka macam hal dilakukan militer, ekonomi-politik dan kebudayaan-, tetapi tujuan tunggal adalah semata menjaga status quo, karena keadaan sekarang adalah yang terbaik untuk Amerika. Sedangkan sudah juga jelas bahwa pergeseran tata dunia sekarang ini dalam amat banyak hal justru menjerumuskan banyak negeri—termasuk Indonesia—tersuruk dalam kesulitan yang semakin tidak mampu diatasi.

3. Dalam Mitologi

Dalam keadaan yang semacam itu, dapatlah dibayangkan bahwa pertarungan di tingkat global akan semakin mengeras, karena fundamentalisme

bukan saja terjadi di tempat-tempat yang terbelakang dan kurang terpelajar. Fundamentalisme juga subur dalam masyarakat super modern, berjalan seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi

Dan sementara itu orang muda dan kaum cendekiawan kita, yang disebut kelas menengah, tetap terpana pada mitologi bangau yang membawa bayi atau kapal misterius yang membawa hadiah. Dalam antropologi disebut *cargo cult*, dan dalam keseharian muncul dalam keriangannya akan produk luar negeri, dimana setiap *new arrival* dipajang di toko. Baik itu berupa buku atau produk konsumsi lain, seakan hidup baru sedang dimulai. Artinya, dalam tata dunia sekarang, mereka yang masih terkait dengan pola mitologis bukan saja mereka yang tinggal di udik dan pedalaman.

Justru mereka yang sudah modern, mengenal kolonialisme plus kemerdekaan, adalah mereka yang bergelimang dalam pola *cargo cult* yang diduga sudah semakin lenyap dari kepulauan Polinesia dan hanya tinggal dalam catatan para ahli antropologi. Tetapi ternyata pemujaan akan dunia "luar negeri" itu tetaplah amat kuat di kalangan orang terdidik dan kaya raya. Ketika mereka mendapatkan ijazahnya dari universitas terkemuka di luar negeri, bukannya mereka semakin menemukan diri sendiri di rumah ibu pertiwi, tetapi semakin bersahabat

saja dengan almamater dan fasih dalam tata pergaulan dunia. Ketika secara lugas *parity purchasing power* dari negerinya meluncur ke tengah comberan dan kertas uang negeri semakin tak ada harganya di luar negeri, semakin mantab dan yakinlah bahwa hukum mitologi bangau yang membawa bayi itu masih tetap berlaku. Terhadap pepatah lama yang berbunyi "hujan emas di negeri orang, tetap lebih nyaman hujan batu di negeri sendiri" sudah tidak diakui lagi. Negeri orang adalah negeri Midas, negeri sinderela, sedang negeri sendiri adalah negeri nenek sihir dan thuyul yang gemar mencuri harta tetangga.

Sebuah keadaan yang amat memalukan karena imperialisme versi baru diterima sebagai upaya yang membawa berkah. Tidak ada harga diri bangsa karena dalam keadaan rasa kebangsaan itu amat tipis, justru kaum terdidik dan mempunyai semakin mendekatkan diri pada kekuatan asing yang datang untuk tetap meletakkan bangsa kita di tangga paling bawah dari peradaban umat manusia, sebagai bangsa yang hanya bisa melakukan konsumsi tanpa mampu memajukan produksi, sebagai bangsa yang semakin tenggelam dalam mitologi dan tak mampu meraih derajat modernitas yang setia dan memanfaatkan akal, sebagai bangsa yang lembek karena tidak ada kemampuan untuk melihat, merasakan dan merancang hari depan yang lebih

terhormat, dan lebih nikmat menempatkan diri sebagai budak dan suruhan orang lain.

Secara politik, dalam tata dunia seperti itu, kegiatan untuk memperbaiki nasib bersama diturunkan derajatnya menjadi sekedar usaha menempati jabatan negeri, mengadu nasib lewat proses "demokratis" untuk meraih jabatan yang pada akhirnya dianggap sebagai bukan saja sumber kekuasaan, tetapi juga sumur harta yang tak akan habis dikuras sebelum negeri itu bangkrut dan lenyap.

Dalam keadaan di mana bangsa itu semakin kabur, dengan sendirinya negara juga semakin keropos karena alat dan unsur utama negara terus menerus melakukan proses burni hangus yang mematikan. Polisi dan seluruh aparat penegak hukum tenggelam dalam proses manipulasi kekuasaan tanpa henti, tentara semakin sibuk dengan urusan yang dirumuskan secara salah karena beban sejarah yang tak mereka pahami lagi, sedangkan birokrasi sipil meneruskan pengurangan harta negara lewat korupsi yang semakin meruyak.

Dengan negara dan bangsa yang semakin kabur dan lemah, dengan sendirinya masyarakat harus bergerak menuju kekelaman dan kesengsaraan yang tak dapat diduga bagaimana bentuk akhirnya nanti. Di tengah tata dunia yang semakin keras dan

semakin cepat menumbangkan semua tata peratur-an lama, negara, bangsa dan masyarakat kita se-makin rapuh dan semakin tertinggal dalam mimpi dan mitologi bahwa jaman bangau membawa bayi masih berlaku sampai dengan hari ini. Menenga-dahkan tangan, berutang, menunggu investasi asing atau menempuh aneka macam kursus untuk meni-ru *life style* asing, baik yang akademik, komersial maupun yang konsumtif, adalah sejumlah tindakan yang dianggap wajar dan memberi rasa makna yang mendalam.

Struktur tubuh dan kejiwaan seperti itulah yang merupakan wujud nyata dari tata dunia yang sekarang sedang dibangun dan dikendalikan oleh aneka macam kekuatan baik pada tataran negara, sektor finansial, pengembangan ilmu dan tek-nologi, industri maupun cara berpikir dan berkon-sumsi yang langsung atau tidak langsung selalu me-nempatkan kita pada dataran paling rendah dalam jenjang peradaban dunia. Sebuah bangsa tanpa harga diri, sebuah negara yang kejam tetapi lembek dan keropos yang memayungi masyarakat yang tenggelam dalam alam mimpi dan ingatan yang me-nelikung, memutar dan mematikan semua usaha akal sehat.

Tata dunia atau *world order* bukanlah sesuatu yang jauh, tetapi suatu yang amat dekat dan nyata

sedekat kulit yang membalut tubuh kita! Tata dunia itu sedang berubah bentuk, di tempat kita berubah menjadi dunia seolah-olah. Seakan dunia akan sejahtera dan adil kalau di mana-mana mall dan ruko dibangun dan pabrik gulung tikar atau pindah ke tempat lain. Seakan perjuangan politik akan berjalan kalau prosedur demokrasi sudah dijalankan. Seakan kemakmuran sudah tiba kalau dunia mimpi semakin nyata menggantikan dunia yang nyata dan berpeluh.

Bab IV

Makna Politik

1. Model Politik

Setelah kita mengamati sosok politik yang merentang antara rezim eufemistik dan metaforik sebagai sebuah proses pembusukan, dan juga dalam tatanan dunia, dalam kompleksitasnya kaitan lokal dan dunia internasional, serta hadirnya sebuah kelompok yang disebut kelas menengah, maka agar pemahaman kita tentang politik itu lengkap dan menyeluruh perlulah dicatat dua acuan berikut ini:

- (1) Acuan pertama didapatkan dari *political science* yang berkembang sejak dari Plato, Aristoteles sampai dengan Lenin atau Habermas, atau sejak dari Sun Tzu sampai dengan Giap dan Mao Tse Tung. Unsur pertama adalah bahwa politik adalah sebuah kegiatan yang khusus dilakukan dalam salah satu medan dalam masyarakat, di mana hukum permainan itu haruslah selalu hukum pertarungan yang mengenal pemenang

dan yang terkalahkan. Pemain dalam politik selalu kelompok dan karena itu modal utama adalah kecerdasan, kecerdikan dan disiplin kelompok. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai tidak saja kekayaan, harta dan kepuasan, tetapi tak lain adalah hak berdaulat, atau hak untuk merdeka memberikan arah masa depan, memberi makna pada hari ini dan menjadi warga penuh dalam kelompok. Pada jaman pramodern, yakni abad tengah di Eropa, shogun di Jepang, dinasti di Cina atau Mataram di Nusantara, ketiga hal yang disebutkan itu mengkristal dalam sebuah rezim yang intinya adalah kekuatan militer, ekonomi, dan juga agama atau tingkat peradaban. Pada jaman modern, kelompok diganti dengan bangsa dan kristalisasi seluruh unsur kekuatan itu dijinakkan dalam bentuk negara yang menerima bahwa hak, kedudukan dan tugas semua warga bangsa adalah sama. Karena setiap negara modern selalu menyebut tujuan akhirnya adalah masyarakat demokratis dan adil, dan bentuk umumnya disebut *welfare state*. Ketika jaman modern itu sudah semakin aus, muncul dua penyakit utama dalam politik, di satu pihak rakyat banyak semakin tidak mengerti proses rumit dalam mekanisme politik, sehingga kewargaan itu hanya timbul secara berkala dalam pemilihan wakil, presiden atau

yang lain. Dan kedua, karena politik sudah menjadi salah satu kegiatan profesional, maka berpolitik artinya adalah upaya untuk mencari jabatan publik dan dengan jabatan itu melakukan kendali atas jalannya masyarakat melalui kebijakan yang dihasilkan secara bersama dalam model pemerintah yang diambil. Warga dari sebuah negara sedang berubah menjadi konsumen dari jasa pemerintahan yang diberikan oleh kaum politikus!

- (2) Acuan kedua didapatkan dari sejarah pendek negara kesatuan RI. Di bawah rezim simbolik, hak, kewajiban dan martabat warga itu dihormati, tetapi tidak dalam struktur kenegaraan, tetapi dalam sebuah kelompok yang bercita rasa, berpengalaman dan bernasib kurang lebih sama. Kekuatan militer, agama dan ekonomi tidak pernah mampu mengkristal dalam sebuah model pemerintah atau rezim, sehingga dalam setiap pertarungan yang terjadi, hampir tidak ada gerak maju. Pertarungan dalam pemaknaannya menjadi estetik, tetapi akibat nyata di medan politik adalah sama kejam dan kelamnya bagi yang terkalahkan. Tidak ada yang dapat dicapai untuk mengarah pada negara yang menjamin dan menjaga peri kehidupan orang banyak. Negara, pemerintah dan nalar bersama dari hari

ke hari semakin berwatak kisah yang besar, seperti epos Mahabharata, tetapi seperti yang terjadi bagi penonton wayang, begitu matahari terbit, hidup nyata harus dijalani, ternyata raja, dewa dan puteri yang cantik jelita hanya ada dalam ucapan, khayal, dan bukan suatu hal yang berdarah daging. Ketika selanjutnya kita jatuh di bawah rezim eufemistik, kadar mimpi dan aroma dunia pewayangan yang kaya, lebar dan menjulang tinggi ke angkasa itu ditarik lekat ke bumi. Kristalisasi kekuatan militer, ekonomi, ideologi dan kecerdasan bersama diusahakan secara penuh. Penertiban dan pertahanan batas negara dilakukan. Masyarakat diawasi secara ketat agar tidak melakukan apa saja yang dapat mengganggu rasa nyaman penguasa. Dan untuk menyeimbangkan hubungan amat tak seimbang antara yang berkuasa dengan yang dikuasai itu muncullah langgam halus dan eufemistik itu. Secara formal dan prosedural ada kegiatan demokratis; secara politis dan kebijakan ada upaya untuk meretas keadilan. Tetapi formalisme yang kaku - dan dianggap sebagai disiplin - hanya mematikan seluruh daya tahan rakyat banyak, sehingga dalam bahasa, dalam nalar dan bertindak akhirnya terjadi proses yang mengecoh. Memang kita saling berbungkuk dan mengucapkan bahasa halus, tetapi terhadap kekuatan

asing yang memegang kekuatan daya pikir, uang, organisasi dan modal pada tingkat dunia, hampir tak seorangpun yang waspada. Dan seluruh bangunan megah negara kesatuan RI itu sedetik roboh seperti bangunan kertas oleh ulah mekanisme pasar finansial dunia. Kekuatan militer, ekonomi, bahkan agama dan peradaban semua mengalami devaluasi yang amat hebat. Sementara peralihan dari rezim eufemistik ke rezim metaforik, seperti sudah dijelaskan, tak lain adalah sebuah proses pembusukan dalam seluruh segi hidup berbangsa dan bernegara.

Lalu apakah makna politik dalam bentangan ruang masalah seperti itu?

Ketika negara kita dilahirkan ke tengah dunia internasional lewat sebuah pengumuman yang disebut proklamasi, hal paling dasar dari pokok masalah mengenai politik negara republik adalah disepakatinya satuan terkecil dari negara dan bangsa yang diberi nama subjek, manusia tunggal atau warga dari sebuah negara. Hubungan kawula-gusti yang diberlakukan selama masa kolonial dan bahkan sebelumnya dalam kerajaan lokal yang ada di Nusantara sepenuhnya sudah ditolak dan tidak berlaku. Republik adalah bentuk negara yang dijalankan sesuai asas demokrasi. Sehingga dalam hubungan ini juga ikatan kita dengan suku, atau

agama, profesi atau kelompok swasta lain haruslah tunduk takluk pada hubungan paling asasi antara negara dan warganya tersebut. Hubungan antara negara dan warga ini adalah sumbu dan dasar dari jatuh bangunnya republik!

Dalam sejarah politik dunia, termasuk kita, hubungan fundamental ini selalu bergerak dalam dua arus yang saling berlawanan: di satu pihak, manakala kebebasan individual, kreativitas pribadi dan hak asasi yang harus dikedepankan, maka bentuk pemerintahan akan bergerak ke arah model *liberal*. Bentuknya adalah campur tangan negara sekecil dan sesempit mungkin, karena kekuasaan sifatnya jahat, korup dan menindas. Di lain pihak, karena dalam setiap masyarakat bangsa mereka yang mampu, bermodal dan cerdik selalu tak merata ditemukan dalam masyarakat, maka jika keadaan diserahkan pada hukum sosial dan alam semata, seterusnya mereka yang tertinggal akan tetap tertinggal. Karena itu campur tangan negara diperlukan, karena negara dalam pengertian di sini tidak dimaknai sebagai jahat, korup dan menindas. Jika keadilan yang menjadi pokok keprihatinan bangsa, bentuk pemerintahannya akan sedikit banyak berwatak *welfare state*.

Model pokok *liberal/welfare* akan bertumbuh dengan ratusan keaneka ragamannya. Tetapi kita

sudah mengalami watak dasar kekuasaan di tempat kita atau dari tempat lain untuk mampu secara lebih cermat menjawab apakah watak dasar kekuasaan itu jahat atau melindungi kepentingan banyak orang yang adalah warganya?

Untuk bergerak keluar dari pertanyaan normatif seperti itu, dalam aneka macam pemikiran politik kontemporer orang dapat menemukan model pemikiran yang meletakkan satuan terkecil politik tidak lagi pada subjek, individu atau "aku", tetapi pada pola hubungan yang lebih primer yang disebut dengan hubungan orang satu dengan lainnya, yang disebut komunikasi. Cara berpikir semacam ini, di negeri industrial, dapat menyelesaikan masalah mendasar mereka karena dengan pengandaian bahwa komunikasi adalah bidang lain yang menempatkan hubungan antar manusia itu tetap dalam hubungan konfliktual, tetapi hasil akhirnya akan selalu mendasarkan diri para perundingan, rembug dan bukan kekerasan.

Sebelum cara berpikir komunikasi itu, sudah dicobakan model berpikir yang lain yang disebut dengan cara fungsional, yang meletakkan satuan terkecil politik dalam *kepentingan* (interest) yang mengelompok dalam fungsi sosial seperti ekonomi, budaya, agama atau kepentingan apa saja yang lain yang selalu harus dapat diterjemahkan dalam per-

caturan politik. Jadi satuan kecil tidak pada komunikasi atau subjek, tapi pada kepentingan. Dalam perspektip ini politik dimengerti sebagai upaya untuk menggerakkan fungsi dasar dalam setiap masyarakat agar supaya sumberdaya yang terbatas dapat didistribusikan secara adil melalui pengendalian kebijakan publik. Artinya fungsi itu adalah gabungan antara kepentingan nyata setiap warga yang ditimbulkan oleh akumulasi sumberdaya yang dapat berupa apa saja, seperti uang, kepandaian, kehalusan atau juga kekerasan.

Dalam sejarah kita, ketiga model politik itu - yakni individualis, kepentingan dan komunikasi - selalu menghasilkan tindakan politik yang terbalik:

- (1) Ketika model komunikasi dikembangkan secara penuh sehingga untuk jenis pemikiran ini segala daya dikerahkan oleh mereka yang ingin menghidupkan ulang *community* di tengah negara yang sudah super rumit, maka wacana atau *discourse* yang di tempat lain duduk di tempat terhormat, karena dipahami sebagai sarana dan tujuan dari setiap bentuk pertarungan politik, maka di Indonesia begitu diucapkan kata "wacana" maksudnya tak lain adalah omong besar, *ngalor ngidul* dan dianggap sebagai sekedar membual. Rakyat dibiarkan hanyut dan menderita dalam kekerasan dalam segala seginya, fisik, ekonomi, kultur-

al, sementara pimpinan politik berestetika dalam pidato, perjamuan, seminar atau khotbah yang sarat dengan pesan agama.

(2) Ketika model politik yang muncul dari pemikiran kepentingan itu dicobakan pada masyarakat kita selama jaman modernisasi dengan korporatisme sebagai bentuk negara, maka sementara sejumlah amat banyak sarjana luar menyarankan sangat mungkin tujuan akhir masyarakat yang demokratis dan adil dicapai, maka di negeri kita kepentingan itu amat sangat mengeras dalam *vested interest* atau kepentingan bercokol yang tidak bisa dirombak oleh mekanisme politik. Politik justru memperkeras hal tersebut itu dalam bentuk fasilitas, saling suap, perkoncoan atau korupsi atau tindak kejahatan yang lain.

(3) Ketika model politik liberal dipraktekkan dalam kancah nasional tahun 50-an, memang pemilu dapat dijalankan dengan baik dan kehidupan partai awalnya sehat walafiat. Tetapi begitu negara dalam sistem dunia waktu itu mengalami kesulitan, antara lain karena tekanan anggaran, hubungan ekonomi dan dagang internasional dan juga masalah keamanan, serta merta para penggerak paham liberal ini ramai-ramai mengadakan pemberontakan yang tak kurang dan tak lebih adalah bentuk campur tangan asing dalam

sistem kenegaraan kita. Kaum liberal melakukan pengkhianatan dengan menggeser kesetiaan dari nasib bersama menjadi nasib golongan, dan memang nasib golongan liberal dan modernis lebih seirama dengan garis politik dan ekonomi dari Amerika. Artinya, demokrasi hendak diselesaikan dengan kekerasan, justru oleh para penggagas awalnya sendiri!

Dengan pengalaman politik seperti yang diuraikan tersebut, dan menyimak banyak pengertian dalam ilmu politik, menjadi jelas bahwa justru dalam bidang terpenting seperti masalah pemaknaan politik di sini dan sekarang tidak pernah ada usaha pemikiran ulang mengenai medan politik secara mendasar dan menyeluruh lalu diarahkan untuk dapat menjaga perjalanan negara menjadi negara yang demokratis dan bangsa yang adil sejahtera.

Sejarah sudah berteriak amat keras ke arah kuping kita bahwa segala rupa teori, model, kerangka berpikir dalam bidang politik yang dikembangkan dan dapat menjadi acuan paradigmatis di tempat lain, di tanah subur khatulistiwa, semua itu tiba-tiba berjalan terbalik. Semuanya —secara struktural— bergerak ke belakang, menjadi retrograde dan kejam. Sukuisme yang membasmi suku yang lain, agamisme yang menajiskan agama yang

lain, rasialisme yang merendahkan ras yang lain dengan memberi cap stigma pada kelompok Cina berupa segala rupa prosedur legal dan ekstra legal, profesionalisme yang bergaya jagoan dapat merampungkan masalah yang kompleks dan berakhir dengan perampokan legal, atau premanisme yang bergerak ekstra legal dalam bentuk segala rupa organisasi para militer dan segala rupa radikalisme yang dipelihara, dibina dan dibingkai demi kepentingan kekuasaan bagi para pembina.

Negeri kita sekarang sudah tidak dapat lagi disebut sederhana sebagai negeri dunia ketiga. Sebutan tidak terhormat dalam sistem dunia karena negeri dunia pertama adalah negeri kaya dan demokratik, negeri dunia kedua adalah negeri maju teknologi, tapi komunis atau sosialis, dan dunia ketiga adalah sebutan untuk sisa negeri yang tidak masuk dalam kedua kategori karena mereka adalah hanya hasil sisa dari sistem dunia, yakni negeri yang lahir dalam gelombang kebangkitan nasionalisme setelah perang imperialis terakhir di awal dan tengah abad XX. Keadaan kita sekarang seakan sedang berada dalam keadaan yang tidak bisa dimengerti lagi. Tidak terlalu sukar kita akan mempelajari negeri lain, tetapi menyimak apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi, yang kita saksikan adalah sejumlah gagasan, tindakan dan arah

penanganan yang tidak pernah jelas struktur dan bentuk yang hendak dibangun demi masa depan. Misalnya saja, sementara bumi sudah sampai pada struktur ekologis yang sedemikian tali temali, sehingga habisnya hutan di daerah tropis akan segera berarti berubahnya musim di seluruh dunia, maka kelakuan dan sikap kita terhadap alam lingkungan tidak pernah berubah sejak jaman batu. Sumber alam dikuras secara semena-mena dan hutan ditebang tanpa perhitungan akan daur ulang, sehingga daerah yang dikuras untuk penduduknya semakin berubah menjadi neraka, dan bagi kepentingan eko sistem dunia, semakin Indonesia menampilkan diri sebagai bangsa yang tak bertanggung-jawab. Dalam bidang ekonomi, sudah menjadi semakin jelas bahwa ekonomi akan terus menerus semakin global, artinya arus barang, uang dan jasa akan semakin bergerak penuh dalam waktu dan ruang. Faktor kecepatan dan keserentakan adalah yang paling utama, dan dengan sendirinya pula kesiapan nasional menjadi mutlak seperti juga kemampuan dunia usaha untuk menemukan peluang dan kesempatan. Tetapi apa yang terjadi adalah sedemikian banyaknya tenaga kerja yang terlempar dari pasar kerja, industri mengalami proses turun terus menerus, sektor pertanian dilepaskan dalam tekanan pasar dunia hasil pertanian, dan akhirnya ekonomi nasional membentuk

lingkaran setan menurun dimana kemiskinan dicerminkan dalam meluaskan sektor jasa dan setengah pengangguran, sehingga dalam pola ekonomi global tidak ada yang dapat dipetik oleh kalangan usaha dan masyarakat luas, selain kita hanya menjadi pasar barang produksi dan setengah jadi mereka. Begitu juga dalam bidang politik, maka amat jelas terlihat dari hasil proses politik selama lima tahun terakhir ini, semakin tidak bisa dipungkiri bahwa tindak tanduk kaum politikus itu tak lain dari usaha mencari jabatan yang akan memungkinkan mereka mendapatkan upah dari jabatan itu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan usaha merombak seluruh bangunan struktural bangsa agar lebih mampu bertarung di dunia internasional serta melindungi kepentingan warga dari gerak naik turunnya ekonomi dunia. Politik sebagai *office seeking activities* semakin mengingatkan orang akan perilaku para pegawai jaman kolonial yang memang mereka adalah petugas dalam sebuah *beamtenstaat*, yang adalah negara pegawai untuk menopang ekonomi liberal yang sedang tumbuh. Negara kolonial semakin diperkokoh sehingga kolonialisme internal juga semakin mengeras.

Dalam bidang sosial dan kebudayaan, tidak seperti jaman kolonial dimana gaya hidup penjajah memang dimaksudkan untuk meletakkan jarak antara bumi-putra dan kaum penjajah dengan

ikatan dan konsumsi kaum penjajah atas produk seni eropa dan diteruskan dengan lingkaran-lingkaran kajian atas budaya lokal yang primitif, sekarang ini bertumbuh pesat kebudayaan populer yang ditopang oleh teknologi informasi, yang pada ujung akhirnya tak lain dari sekedar perpanjangan pemasaran barang konsumsi dan terlebih lagi media massa menjadi toko dan pajangan dunia mimpi yang tak habis-habisnya ditampilkan sehingga semakin banyak orang yang semakin tercabut dan kenyataan dan terus menerus hidup di alam mimpi. Dunia maya yang ditempat lain adalah akibat dari teknologi dan pertumbuhan ekonomi, di tempat kita dunia semacam itu sepenuh-penuhnya setali tiga uang dengan dunia mimpi, dunia ilusi. Dunia yang bertengger jauh di atas kenyataan itu tak ubahnya dengan narkotik sosial yang semakin menjauhkan banyak orang dari kenyataan dan menerima kenyataan sebagai kenyataan.

Kesemua hal ini mengantarkan kita pada sebuah tingkat kesadaran dan pengertian yang justru amat mematikan, karena kita melihat bahwa dunia lain sedang bergerak ke depan, sementara kita semakin bergerak mundur. Jika di masa lain perbedaan kita dengan negeri lain adalah sekedar perbedaan kecepatan dalam perubahan, maka sekarang ini perbedaan terletak pada negeri lain yang bergerak

ke depan dan semakin maju, sementara kita terus bergerak ke belakang dan semakin anarkhis. Dan kenyataan seperti ini selalu ditolak oleh pimpinan nasional dan kebanyakan orang, karena semua memang sedang mabuk dan hidup dalam dunia mimpi. Khayal dianggap sebagai kenyataan dan kenyataan dianggap sebagai obrolan ringan. Sekali lagi, terciptalah lingkaran epitomelogi sosial yang sepenuh-penuhnya mengunci diri. Sementara seluruh kenyataan sedang bergerak membentuk sebuah sistem yang memang *virtual*, dalam hal ekonomi disebut ekonomi global, dalam hal politik disebut sistem dunia, dalam informasi disebut sebagai revolusi informasi yang menghancurkan seluruh hirarki budaya yang dikenal selama ini dengan semakin padatnya hiburan dan semakin tipisnya cita rasa dan dalam bidang fisik disebut sebagai ekosistem dunia, dalam saat yang sama kita terus menerus melaju dan melayang dalam dunia mimpi, sedangkan infrastruktur yang menopangnya semuanya keropos dan salah bentuk. Gaya hidup yang beterbangan di alam mimpi itu tak lain adalah kelanjutan dari gaya hidup foya foya, yang tidak ada hubungannya dengan retakan baru dalam sejarah peradaban dunia yang terjadi karena revolusi informasi. Gaya hidup para epigon, gaya hidup *inlander* yang lebih belanda dari belanda: kulitnya kaum perempuan (maunya) lebih punih dari

ras Caucasus yang putihnya sudah seputih cat tembok yang putih itu, sementara kaum lelakinya (maunya) akan lebih *macho* dari kaum matador yang untuk membina kejantanannya harus bersedia mandi darah ditanduk banteng, sementara kejantanan di sini menemukan daya topangnya pada simbol konsumsi yang paling boros serta salah tempat, tapi dikira amat prestigious dan penuh keagungan.

Dalam gelombang nasionalisme yang diikuti oleh masa pembangunan yang diramaikan oleh bantuan, utang dan investasi asing serta konsolidasi sektor pertanian dan penataan politik dalam negeri itu, sejumlah negeri memang berhasil keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan kebodohan. Sementara negara kesatuan RI, setelah juga beberapa tahun ini bertekad untuk membangun hari depan yang lebih baik, dari detik ke detik, dari jam, hari, bulan dan tahun akhirnya semakin tak bisa disangkal bahwa proses menuju keterbelakangan semakin menguat, dorongan afrikanisasi semakin tak terbendung.

Kecuali anda adalah anggota penuh dari *leisure class* yang tidak akan mati kelaparan dalam tujuh turunan, anda akan ditakdirkan oleh sejarah untuk tidak mungkin berpangku tangan dan membiarkan gelombang penghancuran dan kesia-siaan ini terus berlanjut.

2. Globalisasi Ganda

Akan tetapi, tindakan apapun yang akan dilakukan, di punggung dan masa silam kita hal yang sama juga telah dilakukan, dan ternyata hasilnya adalah keadaan yang memburuk dan membusuk pada tingkat bangsa, negara dan masyarakat itu. Pengalaman selama ini telah terbukti bahwa langkah awal selalu dengan baik diayunkan, tetapi pada langkah berikutnya begitu banyak sandungan dan hambatan yang muncul, dan terhadap sandungan dan hambatan inilah kewaspadaan nyaris lenyap, dan akhirnya kita semua terperangkap dalam keadaan yang tidak jelas *juntrungnya*, tidak tahu lagi arah yang benar dan semua orang menunggu datangnya sang pembebas yang dalam sosok manusia disebut orang kuat, atau dalam sosok mitologi disebut ratu adil atau Erucakara.

Semuanya akan terpulang bukan pada mimpi atau norma apa yang diharuskan dalam politik, atau pula model dan kerangka perubahan apa yang dijalankan dalam praktek, tetapi segalanya harus mulai dari bagaimana sesungguhnya tindakan yang disebut politik itu senyatanya dijalankan dalam masyarakat. Dalam kaitan tersebut, sekali lagi, sejarah menjadi amat penting untuk disimak ulang, sambil menyimak apa yang sedang atau sudah terjadi di tempat lain pada keadaan yang tidak ter-

lalu berbeda dengan kita dan juga pada akhirnya, karena ilmu pengetahuan mengenai tindakan politik itu juga terus bertumbuh, bahan pemikiran yang digali dari khazanah tersebut adalah juga penting diperhatikan. Artinya jika politik itu diletakkan dalam ruang, waktu dan gagasan, maka baru tindakan tersebut akan mampu menemukan kembali martabatnya yang pokok, yakni seluruh usaha untuk memperbaiki keadaan kita bersama dalam sebuah satuan bangsa! Keadaan tidak dapat diperbaiki semata dengan perbaikan nasib sendiri-sendiri, tetapi perbaikan harus terjadi pada tingkat struktural, sehingga perbaikan pada satuan terkecil baik individu atau keluarga adalah hasil dan buah dari perbaikan struktural itu, tepat persis seperti kita mampu membuat puisi yang baik adalah berkat semakin bertumbuhnya bahasa nasional kita.

Gerak politik memang tak ubahnya dengan gerak bahasa, tetapi di lain segi juga harus diperhatikan bahwa urusan bahasa adalah urusan komunikasi atau penyampaian makna di antara sesama, sementara dalam politik urusan pokoknya adalah masalah keadaan yang selalu dalam keadaan tak seimbang dalam hal kekuasaan yang pada dasarnya bersandar bukan saja pada pemilikan harta, tetapi juga pada pemilikan modal yang lain, yang jika hal itu diserahkan pada hukum alam, selalu akan terjadi keadaan yang buruk, dimana

sedikit orang berpesta pora dan begitu banyak orang lain terhina dan nista dalam kebodohan, kemiskinan dan hidup tanpa harkat. Karena itu, politik dalam gerak dasarnya adalah selalu desakan akan ditegakkannya keadaan yang lebih adil, dan pada tahap berikutnya keadaan yang adil itu memungkinkan aneka masalah dapat dirampungkan dengan cara yang terhormat, tidak perlu selalu menggunakan bahasa kekerasan, baik kekerasan fisik yang bersumber pada otot, maupun bentuk kekerasan lain yang lebih halus karena bersumber pada norma, nilai atau bahkan gaya hidup yang menekan pihak yang lain sehingga pihak tertekan justru terkecoh dengan keadaan yang objektif dan hidup dalam lamunan bahwa kelak kemudian hari akan datang ratu adil yang memperbaiki keadaan, atau mungkin malah hanya di dunia akhirat saja keadilan akan datang, atau juga hubungan penindasan itu dimengerti sebagai hubungan kekeluargaan atau belum datangnya kesempatan.

Bahwa kekuasaan selalu ada sangkut pautnya dengan hubungan-hubungan dalam masyarakat yang tidak adil dan tak seimbang itulah hal pertama yang dapat dijadikan patokan keadaan politik sejauh keadaan itu disadari atau tidak oleh seluruh warga. Karena itu, meski politik bergerak selalu melewati jalur struktural seperti bahasa, tetapi karena urusan politik adalah tak semata urusan

makna yang dianut bersama, tapi juga selalu bersentuh dengan hubungan yang tak seimbang, maka dengan sendirinya konflik adalah hal yang melekat pada segala urusan politik, dan baru mencapai tingkat politik yang beradab kalau justru api konflik itu selalu dapat ditemukan jalan keluarnya melalui jalur struktural dan bukan jalur kekerasan yang tegak lurus berbanding terbalik dengan peradaban.

Politik sebagai pertarungan tidak pernah dijalankan demi pertarungan itu sendiri, tetapi selalu pertarungan yang dijalankan demi sebuah pertarungan bersama, sehingga tidak mirip dengan perjudian atau perkelahian di dunia binatang. Pertarungan dalam judi ditentukan oleh bandar, sedangkan pertarungan dalam politik akan selalu dalam proses disepakati ulang secara bersama, begitu juga pertarungan dalam dunia binatang akan ditentukan oleh kekuatan naluri untuk bertarung itu sendiri, sementara pertarungan dalam peradaban manusia adalah pertarungan untuk terus menerus mengangkat hidup sehari-hari ke arah tingkat peradaban yang lebih tinggi, lebih longgar dan sedapat mungkin lebih merdeka dan bermakna.

Karena hal hal itulah maka dapat dikatakan bahwa kesadaran yang dimaksudkan dalam politik bukan semata kesadaran yang bertolak belakang dengan ketaksadaran, tetapi kesadaran itu adalah

pengetahuan dan keyakinan yang tumbuh setelah dengan cermat sejarah perjuangan diperhatikan, jeli pada pengalaman negeri lain dan pada akhirnya semakin halus menangkap dan memanfaatkan dunia ilmu pengetahuan yang semakin membudayakan pertarungan politik itu sendiri.

Sebagai bahan rujukan untuk memahami mengapa sekarang ini tingkat kesadaran berpolitik itu amat rendah atau yang sudah disebutkan sebagai ausnya *civic mentality*, hal pertama yang dialami oleh sejarah politik kita adalah lahirnya sebuah rezim politik awal republik yang saling bertabrakan seperti ini. Di satu pihak Bung Karno memimpikan sebuah bangsa yang merupakan *samenbundelling van alle revolutionaire krachten*, yang lalu dilembagakan dalam format Nasakom, sedangkan di lain pihak pilar utama negara yang adalah tentara, dari awalnya sudah menggeliat sendiri dan segera mencapai wujud nyatanya dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa 17 Oktober 1952, dimana mulai bertumbuh persaingan dan konsep dikhotomis sipil/militer. Militer menempatkan diri sebagai alat negara yang netral dan rational demi menjaga kepentingan nasional yang selalu keruh dipertarungan politik sipil, sehingga pada akhirnya tentara Indonesia semakin menempatkan diri sebagai negara dalam negara, yang rumusan resminya selama rezim Soeharto adalah *fungsi ganda*.

Penyakit megalomania seperti inilah yang akhirnya meruntuhkan rezim Soekarno, dan meletakkan dasar-dasar untuk sebuah negara yang tidak lagi setia pada perjuangan negeri bekas jajahan, tetapi merumuskan diri sebagai sebuah "developmental state", yang pada gilirannya, sekarang ini baru menjadi jelas, terjebak dalam sebuah rangkaian kebijakan strategis yang bermuara pada bunuh diri total: kebijakan konglomerasi merubah masalah Cina menjadi masalah penjajahan ekonomi, masalah politik penuh sesak dengan salah paham sipil/militer dan masalah sosial berikut politik selalu keruh dengan soal agama Islam dan non Islam.

Tiga masalah pokok (konglomerasi/Cina, sipil/militer dan Islam/non Islam) ini sudah sedemikian menggerus seluruh kemungkinan berpolitik secara waras, karena ketiga masalah ini akar masalahnya sedikitpun tak pernah disentuh dan dimengerti. Secara ringkas dan sederhana dapat dikatakan bahwa salah paham paling mendasar adalah ambisi dan nafsu kekuasaan yang dibingkai dalam sebuah nasionalisme garis lurus. Kesalahan itu terjadi karena jika kita memandang negeri lain, memang hanya jenis nasionalisme garis lurus seperti itulah yang ada. Amerika menikmati nasionalisme para kapitalis kulit putih, sehingga tidak

ada masalah radikal di negeri itu, karena semuanya tinggal dijalankan saja, dan hal ini dibingkai dalam pikiran yang disebut pragmatis dalam filsafat dan konsep *melting pot* dalam masyarakat. Atau Cina, sudah dari ribuan tahun yang silam nasionalismenya adalah warna kental dari dinasti suku Han (dari Tang abad VII sampai Qing abad XX), lalu dibingkai dalam konfusianisme yang berbentuk kekaisaran yang tradisinya diteruskan oleh organisasi modern partai komunis Cina. Sementara di Eropa, nasionalisme atau rasa kebersamaan itu bertopang pada runtuhnya hegemoni gereja, yang lalu memecah dalam tubuh gereja itu sendiri dan terjadi transformasi menjadi negara sekuler. Atau bangsa Jepang yang dari abad XVII awal sudah menutup diri dalam tatanan rezim samurai, ditopang oleh budhisme dan diteruskan dengan radikalisme militer yang akhirnya dilanjutkan transformasi “perang dagang” yang melahirkan model pembangunan yang khas bagi negeri itu.

Kita akan selalu terkecoh dan tertipu jika ambisi politik yang dianut didasarkan pada sebuah nasionalisme garis lurus dan tunggal seperti itu, karena dalam praktek politik, dalam keadaan sekarang, karena ekonomi kita jatuh di bawah cengkeraman konglomerasi yang salah bentuk dan watak, politik hanya menjadi panggung dan toko

berjualan issue dan komoditas emosi dan kedangkalan pikiran. Padahal sudah sejak dari awal kelahiran negara dan bangsa kita, sudah disadari bahwa sejarah panjang Nusantara yang kepulauan ini memang adalah warisan dari sebuah *Pax Nederlandica*, tetapi dalam kenyataan sosial dan politiknya tak lain adalah sebuah titik persinggungan antara sejarah gerak panjang yang mulai dengan endapan Hindhu/Budha (sampai abad XV), lalu endapan Islam (sejak Demak abad XVI) dan akhirnya juga endapan kapitalisme dagang VOC (sejak abad XVII). Tidak ada garis lurus dan sejarah panjang kita, seperti juga tidak ada warna seragam dalam arus-arus kebangsaan itu, karena terdapat begitu banyak bahasa, kebudayaan dan suku. Sehingga saling terkaitnya arus sejarah panjang dan arus kelompok suku itulah yang sepenuhnya membedakan kita dari nasionalisme yang dikenal di tempat lain. Nasionalisme atau kesadaran politik kita tidak dapat lahir dari kesadaran tunggal dan lurus, serta seragam, tetapi hanya akan lahir dari titik singgung silang peradaban itu, yang aneka warna, turun naik dan memerlukan kemampuan melihat, berpikir dan bertindak yang jauh lebih berat untuk ditanggung, atau jika kita tidak mampu bangsa itu akan tenggelam dalam anarkhi dan kemusnahan.

Nalar politik yang tumbuh subur dikalangan inti pimpinan nasional yang didorong oleh ambisi tunggal inilah yang telah menghantarkan kita semua pada keadaan sekarang ini. Teknokrasi, norma agama dan negara integralistik bersatu padu untuk membangun sebuah fatamorgana yang ujungnya adalah kegagalan dan kenistaan. Ketiga warna dasar inti pimpinan nasional inilah yang sepenuhnya telah membutakan kesadaran politik akan tuntutan globalisasi internal yang disebabkan oleh sejarah panjang dan aneka warna suku, agama, ras dan rentang kawasan. Dan ketika struktur yang rapuh itu berhadapan dengan globalisasi dunia, segera terbukti bahwa ilusi dan ambisi itu adalah sebab utama dari ketidak mampuan kita untuk tegak berdiri dalam kedaulatan dan harga diri bangsa.

Kesadaran politik yang mengakar dan tumbuh dari posisi titik singgung peradaban itulah yang selama ini tidak berkembang karena terkalahkan oleh ambisi tunggal dan megalomaniak yang ber-sumber pada paham garis lurus nasionalisme kita. Demi penghentian dan pembasmian usaha keras dan berdarah yang selama ini dijalankan dalam perburuan fatamorgana, sebuah nalar nasionalisme yang lain dan yang lebih kompleks serta menyeluruh diperlukan. Kebiasaan untuk meletakkan konflik

politik dalam usaha pemburuan dan pen"ciduk"an sesama anak bangsa harus dihentikan, karena semua kebiasaan tersebut hanya menghantarkan kita pada ketidak mampuan bangsa untuk merekat globalisasi internal dan mencari peluang dalam globalisasi dunia.

Dengan semua hal yang telah diuraikan, dapatlah pada akhirnya kita mengerti keadaan centang perenang dunia politik sekarang ini:

1. Disebabkan oleh ketidakmampuan inti pimpinan nasional dan pelaku politik yang ada untuk memahami dan menjalankan tantangan ganda globalisasi itulah yang ujungnya melahirkan sebuah blok kelompok dalam masyarakat yang disebut dengan *leisure class*. Tidak mampu beranjak pada dataran pemikiran yang lain, mereka tetap berkutat dalam fatamorgana.
2. Karena sifat fatamorgana dalam politik sesungguhnya selalu lahir dari kesakitan, penghinaan dan penderitaan yang panjang tanpa mampu mengatasi pengalaman pahit itu, pada gilirannya menjadi terang benderang bahwa ambisi dan rasionalisme tunggal dan lurus, apapun bentuk, isi dan kiprahnya, sepenuhnya adalah akan tetap menjadi sebuah kutukan bagi peradaban kita dan harga diri bangsa. Sebuah usaha yang keras dan berdarah-darah, tetapi selalu berujung pada

kekecewaan kegagalan dan kepahitan menghadapi kenyataan yang majemuk dan kompleks.

3. Karena watak sejarah, kawasan dan kemajemukan masyarakat kita, dengan sendirinya setiap usaha untuk sekedar mencontoh dan mengambil alih model pembangunan politik yang diimpor dari negeri lain—apapun bentuk dan versinya sepenuhnya adalah sebuah petunjuk akan kebelum-dewasaan politik yang harus dikembangkan di tanah air.

Realisme politik dan setiap pertimbangan strategis yang manapun, sejauh hal itu berkaitan dengan masalah kekuasaan dari dan untuk masyarakat yang disebut kegiatan politik, mengharuskan kita untuk melihat dan mengerti bahwa seluruh tradisi substansialis dari barat maupun tradisi budaya besar dari timur jauh atau timur tengah yang hegemonik dan monolitik tidaklah akan memadai untuk menjawab seluruh persoalan mendasar yang selama ini seperti selalu terlupa dan tersingkir, yakni kenyataan bahwa identitas kita sebagai bangsa yang disebut dengan nasionalisme adalah sebuah hubungan yang tali temali, titik singgung yang selalu bergerak dan usaha tak kenal henti untuk melangkah sambil belajar dari kesalahan yang silam. Kesalahan dan kealpaan bukan hanya perlu diadili, dinista atau dilupakan, tetapi harus

diletakkan dalam kerangka pertalian, jaringan dan titik singgung serta silang peradaban, sehingga nafsu membalas dendam luruh dan kesadaran sejarah tumbuh dan bertindak sebagai satu-satunya penjaga akal waras dalam pertarungan kekuasaan. Kesalahan dalam politik tidak pernah bersifat pribadi, tetapi sepenuhnya selalu berwatak struktural. Seperti kalau kita menemukan sebegitu banyak karya sastra yang buruk bukan semata disebabkan tidak ada bakat seni pada para sastrawan, tetapi hal semacam itu terjadi karena tatanan ekonomi, pergaulan politik atau pola konsumsi dalam masyarakat memang sedang berada dalam sebuah tahap yang tidak memungkinkan lahir sebuah karya sastra yang baik, yang mampu menarik kita keluar dari comberan dan rawa-rawa kepentingan pribadi yang jika tidak dijaga dengan baik justru akan memperkokoh keadaan yang membutuhkan kesadaran bahwa kita hidup selalu bersama dan orang lain itu selalu berbeda, dan tidak mungkin pindah ke planet yang lain, ke sejarah yang silam atau menemukan keadaan yang tata tentrem semata dengan orang-orang yang sekepercayaan, sewarna kulit atau sebidang pekerjaan!!

Sekali lagi, Indonesia dan nasionalisme kita adalah rangkaian titik singgung, persilangan dan keaneka ragaman yang harus terus menerus

dikembangkan, diatur dan ditampung agar tenaga yang terkumpul pada gilirannya mampu menjadi gumpalan daya dan kekuatan pendorong untuk bergerak ke depan, dan tidak tenggelam dalam politik berebut kuasa yang selama ini sudah terbukti hanya membawa bencana.

Handwritten signature



Bab V

Jeda Pengetahuan

1. Paradoxa

Dalam dunia cerita dan periwayatan yang kita kenal lajimnya kita akan menemui dua pola yang berjalan bersama. Di awal yang lama dikenal bentuk kakawin yang berkisah mengenai cerita moral dan perjuangan yang disadur dari epos India, di samping juga selalu ada cerita rakyat. Di dalam penulisan mengenai politik kerajaan selalu dapat dijumpai baik babad yang tak lain adalah hagiographi dan juga serat yang berisi kisah kerajaan dan politik tetapi lebih mendekati cerita rakyat. Pararaton atau Nagarakertagama adalah jenis yang pertama, dan serat Damarwulan adalah contoh kedua. Di antara kedua jenis itu lalu lahir jenis tengah yang diarahkan pada uraian mengenai "ilmu", seperti Serat Hidayat Jati atau Centhini.

Ketika jaman semakin berubah, orang mulai mengenal ilmu sejarah yang memanfaatkan naskah

lama itu sebagai salah satu sumbernya. Dan jatuh dalam wilayah sejarah lalu muncul pula ilmu politik dan sosial lainnya, yang memberi arti pada kekuasaan seperti dikenal di wilayah kita. Ilmu sejarah dan politik yang banyak memanfaatkan pendekatan dari luar seperti hermeneutik dan tafsir naskah untuk sejarah, atau perspektif fungsional dan sistem untuk ilmu politik, dengan sendirinya dianggap sebagai usaha yang paling memungkinkan kita mengerti keadaan secara benar, karena telah memanfaatkan disiplin penelitian dan pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum di dunia akademik.

Tetapi sesungguhnya, gerak antara babad atau serat menuju sejarah, politik dan ilmu modern lain, sepenuhnya adalah sebuah lompatan epistemologis. Antara pengetahuan sebagai "kawruh" dan pengetahuan sebagai langkah awal untuk menguasai keadaan, terbentang sebuah *jeda epistemologis* yang selalu terlewat dari kesadaran.

Meletakkan jeda epistemologis seperti itu sebagai titik berangkat, kemudian meletakkan kita pada sebuah dataran yang lain, yakni pengetahuan yang tak semata "kawruh" atau "ilmiah", tetapi sebuah pengetahuan yang tak lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi semata sebuah jenis pengetahuan yang muncul dari kesadaran bahwa kita dapat

berbahasa secara lancar dan dapat dimengerti orang lain, tetapi begitu kita simak bahasa itu sebagai sebuah objek kesadaran, maka dari kesadaran itulah muncul sebuah bidang pengetahuan yang bersangkutan paut dengan bahasa sebagai bahasa. Bahasa dalam rona eksistensial artinya adalah pemikiran pada sejumlah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, tetapi memerlukan pemikiran terus menerus: *apa arti tata bahasa? Apa satuan terakhir dari bahasa? Apa makna kosa kata? Apakah ada makna yang lahir di samping rekaman kosa kata seperti kamus? Apa artinya seorang penutur mengucapkan sebuah bahasa? Bagaimana penutur membentuk saling pengertian dengan penutur yang lain? Apa hubungan bahasa dengan hal yang hendak diceritakan?*

Ketika bahasa tidak semata dijadikan objek, tetapi diterima sebagai hal paling nyata karena dapat dibaca atau didengar, artinya tertangkap oleh indera, tapi sekaligus juga paling tidak nyata karena bahasa dalam arti yang dasar adalah sekedar bunyi-bunyi yang keluar dari tenggorokan dan bunyi itu diatur menurut cara tertentu yang tidak kelihatan, tetapi berkat adanya keteraturan yang tidak pernah disadari itu, sejuta makna dapat dibentuk dan disampaikan kepada diri sendiri atau orang lain.

Politik atau masalah kekuasaan yang diletakkan dalam kawasan bahasa —sebagai salah satu hal

yang dapat disimpan dan disampaikan lewat bahasa- dengan sendirinya bukanlah politik seperti dikenal dalam babad atau serat yang disusun demi sebuah legitimasi kerajaan atau politik dalam *political science* yang diuraikan demi sebuah pemahaman yang memungkinkan lahirnya rekayasa sosial. Politik dalam dataran bahasa terletak di daerah jeda yang sifatnya adalah sebuah daerah peralihan. Peralihan dari tradisional ke modern, dari kawruh ke ilmu pengetahuan, yang sepenuhnya harus dilakukan demi meletakkan hal yang dijalani secara tak sadar, dan dengan cara ini lalu sepenuhnya menjadi sasaran dan arah kesadaran. Seperti mengurai lagi sisa sejarah atau sisa kesadaran, karena hal yang dianggap sudah lewat, sudah selesai dan dapat ditinggalkan begitu saja, ternyata tetap hadir dan mengikat, sehingga terjadi gerak terbalik: semakin kita dalam politik merasa bergerak maju dan modern, ternyata semakin kita bergerak ke belakang, ke dasar peradaban yang paling kurang beradab.

Gerak paradoksial seperti itu terjadi penuh seperti kalau kita berbahasa. Pada perasaan kita seakan kita bebas, merdeka dan bahkan dapat menuliskan puisi, tetapi sesungguhnya kemerdekaan dan kebebasan itu tidak pernah sampai dapat keluar dari batas yang secara tak sadar dipaksakan pada semua penutur dan pemakai bahasa. Atau juga

sebaliknya, dengan tanpa sadar kita mengenal dan menguasai satuan pokok (disebut fonem dalam bahasa) yang tidak terlalu banyak, mungkin hanya puluhan satuan pokok, penutur bahasa dapat menciptakan jutaan kemungkinan sesuai dengan hukum permutasi kombinasi. Artinya kehebatan berbahasa itupun, sekali lagi, tetap bergerak dalam kurungan hukum yang berlaku.

Paling tidak dengan menyadari atau melihat gerak paradoksal secara mendasar pada kemerdekaan dan kebebasan itu, sekaligus dimungkinkan melihat gerak paradoksal dalam politik, sehingga tabiat paling buruk dari kekuasaan untuk pongah dapat dimatikan, dan langkah yang lebih realistik dapat diharapkan akan lahir.

Jika saja pada titik ini, kepongahan akan kebebasan berbahasa selalu tunduk dan taat pada hukum permutasi kombinasai fonem dan serentak juga kemerdekaan dalam politik selalu tunduk dan takluk pada gerak paradoksal, maka pada titik seperti itulah akhir bacaan ini tercapai. Buku ditutup dan harus dilupakan, karena kesadaran kritis atas sejarah, kekuasaan dan jati diri sedang lahir. Atau bacaan ini adalah upaya yang sia-sia karena kesadaran sudah penuh sesak dengan sampah dan petunjuk pelaksanaan laksana sebuah disket komputer yang sudah habis ruang tampungnya, *overload...*

Arah dan maksud bacaan seperti ini tak lebih dari bahan menuju sebuah pintu masuk ke sebuah kawasan dalam masyarakat kita. Dan kawasan itu sepenuhnya dan semata sebuah kawasan yang disebut politik. Bacaan ini mirip sebuah pass-word untuk sebuah sistem. Dan tertulis : p a r a d o x a .

2. Reformasi

Berkaca pada pengalaman sejarah di tempat lain, akhirnya, kita dapat mengajukan pertanyaan yang arah jawabannya sudah disampaikan sepanjang uraian ini. Yakni mengapa reformasi (gereja) di Eropa Barat yang dilakukan oleh Martin Luther dan Calvin yang dimulai di abad XVI telah mampu melahirkan sejumlah negara nasional yang kokoh di sana, bertumbuh sebagai sejumlah negara imperialis dan kemudian hari-hari ini dipertautkan lagi menjadi sebuah "masyarakat" (ekonomi Eropa) yang justru karena nasionalisme politik telah usang oleh globalisasi, gerak melingkar menuju masyarakat dilakukan. Sementara kaisar Meiji di abad XIX yang lalu justru melakukan reformasi ketika Jepang dipaksa oleh kekuatan asing untuk membuka diri, dan kemudian menjadikan negara ini menjadi ancaman pokok di seluruh Asia dalam konsep Asia Timur Raya, yang sesungguhnya tak lain dari usaha imperialisme yang berkait rapat

dengan nasionalisme Jepang. Dan kemudian di tahun 80-an yang silam Uni Sovyet melakukan reformasi di bawah pimpinan Mikhail Gorbachev yang disebut perestroika, untuk kemudian menghancurkan negara Uni Sovyet dan menyisakan nasionalisme bangsa Rusia saja. Dan Cina yang bergerak cepat setelah revolusi kebudayaan (1966-1976) segera memasuki tahap reformasi yang disebut *gaige kaifang* di bawah pimpinan Deng Xiao Ping, yang hari-hari ini telah membuktikan keberhasilannya yang menggetarkan seluruh tatanan dunia yang disangka akan berat sebelah dan monolitik di bawah hegemoni Amerika. Kekalahan Cina dalam perang candu melawan Inggris di tengah abad XIX yang lalu ditebus dengan kemampuan menempatkan Cina sebagai pemain utama dalam sistem global sekarang ini dalam segala seginya.

Sementara reformasi di tanah air jelas menunjukkan gejala gerak mundur dalam tingkat negara dan bangsa, dimana proses pembusukan pada segala sudut kehidupan sedang berkecamuk sehingga negara dan bangsa sedang tenggelam di bawah dominasi pasar dan toko kelontong. *Leisure class* terus menerus pamer kekayaan dan konsumsi mewah, sedangkan rakyat banyak tenggelam dalam kesulitan hidup sehari-hari yang lalu amat memperpendek jarak pandang mereka akan wawasan nasional dan kehidupan politik.

Dalam keadaan reformasi setali tiga uang dengan beranak pinaknya anarkhi, bersikap angkat tangan terhadap proses yang berlangsung, secara moral sesungguhnya kita semua sedang melakukan sebuah pengkhianatan pada sejarah kita sendiri, pada diri kita sebagai warga sebuah negara dan bangsa. Secara ekonomi berarti memperkokoh ketidakmampuan kita untuk melawan doktrin Malthus yang berbunyi "pertumbuhan penduduk oleh nafsu birahi akan melesat secara deret ukur, sedangkan kemampuan kita memberi makan pada jutaan mulut manusia hanya akan berkembang dalam deret hitung", artinya hukum alam menuju kelaparan adalah sebuah keniscayaan. Dan secara politik hal itu tak lain dari sikap menyerah dan tak peduli sementara kita semua digiring ke lapangan pembantaian, karena tenaga kesetia-kawanan telah sedemikian pudar dan suram, sehingga nasib bersama diserahkan semata kepada nasib baik dan kemurah-hatian sebuah rezim yang intinya terdiri dari kaum perompak dan petualang yang mendapatkan jabatan publik demi jabatan dan kekuasaan yang melekat padanya.

Menolak Indonesia menuju anarkhi, artinya amat ringkas dan sederhana: kehidupan harus dinomorsatukan disamping kematian, kebungkaman dan keputus-asaan serta jalan buntu. Membela

kehidupan, menyuburkan kesetia-kawanan dan mencari jalan keluar dari kesulitan struktural bersama artinya adalah berpikir, berperasaan dan bertindak secara politik!

3. Meretas jalan

Untuk mampu memberi makna pada politik dalam seluruh seginya, salah satu jalan mudah adalah membagi pintu masuk ke pengertian lewat dua titik yang disebut kawruh atau *pengetahuan tradisional* dan kajian ilmiah yang dibangun oleh *disiplin ilmu pengetahuan modern*. Jika pengetahuan akan diletakkan sebagai dasar kesadaran, maka hal itu hendaknya tidak sekedar dianggap sebagai sebuah “kawruh” atau kajian “ilmiah” saja. Artinya, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah tidak meletakkan segala hal dalam hubungan sebab akibat semata, seperti juga tidak meletakkan semua dalam keselarasan dan pemaknaan belaka. Harus dimengerti bahwa antara dua cara berpengetahuan itu, terbentang sebuah jarak, sebuah jeda.

Lalu pada gilirannya, bergerak dari pengetahuan baru yang terletak dalam jeda epistemologis itulah kita harus mampu menguak ketaksadaran yang terjadi secara alamiah, yang pada dirinya sendiri tidak pernah mampu melihat jarak antara kedua

jenis pengetahuan itu. Seperti mata yang tidak mampu melihat mata sendiri.

Setiap orang selalu sudah terletak di daerah tersebut, sudah menjadi hal yang biasa dan tidak ada masalah. Jeda yang ibarat sebuah ruang kosong yang harus dilompati dianggap sebagai ruang yang penuh dengan sarana dan fasilitas yang tinggal dipakai dan dinikmati.

Kewajaran semu yang bersandar pada ketidakmampuan menyimak jeda, pada galibnya tetap berada dalam kekaburan karena dua jenis pengetahuan itu memang lain watak dan sifatnya, tetap seperti minyak dan air. Karena kawruh akan bergerak dalam pola hubungan simbolik atau lebih tepatnya semiotik yang selalu menghasilkan aneka macam kesimpulan dan pandangan, sementara ilmu pengetahuan akan selalu bergerak dalam aras analitik yang sifatnya adalah mencari pola keteraturan yang berujung, sejenis hukum dan aturan dasar, yang sedikit demi sedikit dikumpulkan sehingga pada akhirnya ilmu adalah sebuah bangunan berjenjang dalam hukum, yang kalau mungkin lalu disusun sebuah "teori untuk segala sesuatu", baik dunia alam maupun manusia. Ilmu pengetahuan akan memperlakukan khazanah kawruh yang terdapat dalam babad, serat, cerita rakyat, monumen atau tempat angker sebagai objek kajian yang harus

mampu memberikan data yang objektif dan masuk akal, sementara kawruh akan tetap saja memper-lakukan ilmu pengetahuan sebagai salah satu hasil peradaban dan usaha manusia yang bukan yang paling utama, tetapi sebagai sebuah proses penalar-an yang akan menutup dalam bidang masing-masing, seperti ekonomi, politik atau biologi dan seterusnya.

Dengan kata lain, karena kawruh dan ilmu pengetahuan tidak berada dalam hubungan konfliktual ataupun kontradiktif, melainkan selalu dalam hubungan sejajar, maka semakin lama bergerak dalam waktu dan semakin menyebar dalam kawasan semakin luas, maka dalam kesadaran masyarakat kedua jenis pengetahuan itu adalah satu dan satu saja, seperti sebuah rel kereta yang jelas berdampingan, tetapi pada kejauhan tertentu dia akan tampak sebagai rel tunggal. Ilusi seperti ini bukan hal yang buruk untuk masing-masing orang, karena jika hidup pribadi tidak dijalani dengan ilusi di sana sini, kompleksitas dunia luar akan sedemikian tingginya, dan jiwa yang waras menjadi mustahil. Tetapi jika ilusi itu diangkat ke wilayah politik dan masyarakat, maka serta merta kita saksikan keadaan yang disebut paradoks, karena hasil yang diharap selalu berbeda dengan hasil yang nyata, pemaknaan yang utuh selalu

tercabik-cabik dalam fanatisme dan pandangan sepihak. Masyarakat barat yang hidup dalam tradisi *judeo-greco-roman* sudah memutuskan memberikan tempat utama bagi ilmu pengetahuan sehingga gerak kemajuan dapat diukur, dan sekaligus mengukuhkan diri sebagai penguasa dunia sejak setengah millenium yang lalu, sambil mereka membangun lembaga negara yang diatur sesuai dengan hukum konstitusi dan diawasi dengan ketat oleh sekularisme, karena negara adalah wujud lanjutan dari gereja yang dibalik. Sementara masyarakat timur seperti Cina atau Jepang tidak pernah sepenuhnya memberikan tempat utama pada ilmu pengetahuan, tetapi tetap meletakkan kedua bidang itu dalam sebuah kesejajaran, dan hal yang memungkinkan kedua negeri ini mampu berpacu dengan barat timbul dari kemampuan membangun "kereta" yang melaju di atas rel ganda yang disebut sebagai negara! Masinis untuk Jepang disebut kelas samurai, dan sopir untuk Cina disebut kelas mandarin.

Kalau disadari bahwa di Indonesia kita bukan saja akan menemukan tradisi atau naluri yang disebut barat atau timur, tetapi juga timur tengah, maka dengan tiga jalur seperti itu, menjadi jelas mengapa membangun sebuah negara adalah sebuah usaha raksasa yang sungguh mustahil, kalau

semata kita menoleh pada model negara yang ada dan memang sudah terbukti berhasil. Bahkan berhasil membangun sebuah sistem dunia, dimana kita juga dipaksa untuk menjadi salah satu peserta dalam sistem itu, sementara negara selalu dalam keadaan setengah jadi atau lembek atau porak poranda. Karena itu pula jika dalam kosa kata politik modern dikenal istilah dan pengertian seperti demokrasi, konstitusi, hak asasi, kedaulatan atau bahwa hak menentukan nasib sendiri, semua itu menjadi amat sangat anakhronistik karena struktur tiga jalur yang menjadi naluri dan tradisi sejarah kita. Dalam arti itu jugalah, *post factum*, rezim Soekarno memang harus jatuh karena negara yang rapuh itu dilanda badai sistem dunia yang waktu itu mengambil asas dalam wujud perang dingin. Jebakan struktural itu memang mengharuskan rezim itu tumbang dan kalah menjadi korban. Sedangkan rezim Soeharto yang seakan mampu membangun negara yang kuat dengan militerisasi yang meluas, juga berdiri atas hal yang sama, meski ada tambal sulam di sana sini. Negara dan bangsa yang rapuh itu diterkam mati oleh badai yang bersumber pada pola permainan sistem ekonomi yang sudah berubah, karena kandungan ilmu dan teknologi yang sedemikian padat, yang terkenal dengan istilah globalisasi. Sama halnya dengan rezim kolonial dibangun sesaat setelah perang

Diponegoro, abad XIX yang silam, juga harus tumbang bukan semata karena berkecamuk sebuah revolusi di Indonesia, tetapi utamanya adalah karena tahun 30-an dunia dilanda depresi, harga hasil bumi khususnya gula juga jatuh, sehingga negara harus bersandar pada sebuah ekonomi yang rapuh, dan segera roboh oleh serangan Dai Nippon yang tak lain adalah pendatang baru dalam sistem kapitalis waktu itu. Upaya Belanda untuk membangun kembali negara kolonial mirip sebagai upaya menegakkan benang basah, dan setali tiga uang dengan usaha kedua orang kuat kita Soekarno dan Soeharto, masing-masing dengan caranya sendiri hendak menegakkan benang basah.

Para pendiri negara kita memang layak dan wajib tersinggung ketika di awal jaman pergerakan orang Belanda selalu mengatakan bahwa Indonesia tidak atau belum siap untuk merdeka dan untuk itu mereka diwajibkan masuk dalam komedi "Völkstraad", atau oleh Jepang diundang menjadi anggota "panitia" persiapan kemerdekaan. Memang ada muatan rasialis yang kuat dalam keadaan seperti itu yang bersesuaian dengan peta politik global saat pergerakan sedang dimulai. Karena jika kemerdekaan negara itu diberikan oleh penjajah, artinya dalam hukum internasional, adalah bahwa wilayah kita akan berada dalam yurisdiksi pemenang perang

yang tak lain adalah kekuatan sekutu. Dan ketika secara hukum internasional masalah kemerdekaan itu rampung dalam sebuah pertemuan yang terkenal dengan Konperensi Meja Bundar (KMB), segera negara yang lahir itu digerogeti oleh kekuatan nasionalis itu sendiri yang bertengkar tanpa henti dalam hal menuntut hak lebihnya dalam sumbangan proses peralihan dari kolonialisme ke kemerdekaan. Tiga titik api yang segera melumpuhkan negara yang akibatnya tetap dirasakan sampai hari ini adalah pertikaian soal sumbangan mana yang terbesar kekuatan militer atau upaya diplomasi, alias sipil/militer. Lalu pertikaian antara kaum yang dianggap sekuler dengan yang religious yang dianggap sebagai pertikaian ideologi. Dan akhirnya juga pertikaian mandul mengenai siapa yang paling asli dari antara para penduduk, untuk sekedar mengalihkan pandang dari masalah ekonomi yang paling mendasar, di mana kekuatan produksi, distribusi dan permodalan sebagian besar berada di tangan Cina. Ketiga titik api ini tidak menghasilkan apapun yang berharga, selain asap dendam dan kekejaman yang memalukan dan semakin meruntuhkan kekuatan negara dan bangsa itu sendiri.

Terus menerus hidup di bawah bayang-bayang asap tebal yang muncul dari ketiga titik api seperti

itulah kesadaran politik tidak pernah bisa dilahirkan di tengah masyarakat. Kesadaran politik semakin buram dan jarak pandang amat pendek, sehingga pada inti pimpinan yang kebetulan menguasai alat-alat negara mereka akan gemar mematut-matut diri dengan sejenis mantra yang dicomot dari kelas ningrat yang pernah hadir dalam sejarah, seperti gagasan asta brata, pemimpin yang mengayomi (pamong praja), bahkan diberi aroma moral seperti sepi ing pamrih, dan warna agama seperti jabatan adalah amanah. Kawruh yang diberi kemasan baru sebagai mantra-mantra itu lalu bergabung dengan nafsu modern yang ditanggung oleh orang-orang muda terdidik dalam sekolah barat, yang lebih fasih untuk menghafal dan meniru model yang diajarkan di buku teks (model Jepang, model NIC lalu Cina) dan tidak pernah jeli dengan alur tradisi, naluri dan sejarah sendiri yang sesungguhnya telah menjadikan kawruh dan ilmu pengetahuan itu sebagai saluran masuk arus dunia yang sepenuhnya di luar kemampuan siapapun untuk melawannya, kecuali kalau kita sekedar mau mengambil manfaat pribadi dengan bercengkrama dan bersanding dengan wakil-wakil kekuatan yang datang sebagai pembawa berkah.

Negara tidak pernah bertumbuh bersama struktur pengetahuan yang semakin jelas dan

terbuka dan berlandaskan bobot kesejarahan yang tetap mengendap dalam arahan tingkah laku, tetapi dari hari ke hari semakin menjauh dari kenyataan dan pergulatan yang harus diderita oleh bangsa, yang tak lain adalah rakyat yang berjuta itu. Politik lalu kehilangan makna peradaban dan sekedar tunduk takluk pada hukum nafsu dan naluri hendak berkuasa yang sama tua dan dalamnya melekat dalam setiap orang baik beradab atau tidak.

Jika ketaksadaran politik itu bukan semata harus dimengerti sebagai gejala kejiwaan tetapi lebih merupakan akibat dari struktur kenyataan dan sejarah yang mengungkung dan membelenggu, lalu bagaimana kita akan mampu meretasnya? Kenyataan itulah yang harus dibongkar dan bukan mengadakan perbaikan pada jiwa, akhlak atau moral.



Penutup

Gagasan yang hendak dipertahankan sebagai sebuah garis pemikiran dalam upaya memahami kemelut politik di tanah air secara ringkas berbunyi: jika kehidupan politik itu adalah gerak sekaligus dari negara, bangsa dan masyarakat, ketiga unsur itu sudah membentuk sebuah lingkaran yang sempurna, sehingga gerak apapun selalu hanya akan mengulang gerak yang sama. Kalau diibaratkan dengan lingkaran, keadaan politik kita sudah menyerupai ular yang semakin erat menggigit ekornya sendiri.

Dipilah dalam aneka ragamnya, dapat ditemukan hal-hal berikut:

- (1) Rezim politik boleh datang dan pergi, dan jenis rezim apapun perilaku dan tindakan dasar akan selalu menempuh jalur yang tidak akan terlalu berbeda. Jalur tindakan akan mengikuti sebuah pola yang tetap, dimana terjadi setiap rezim itu berhenti, gerak politik dari rezim yang baru akan semakin bergerak mundur.

(2) Gerak mundur terus menerus itu bukan disebabkan oleh para pelaku politik yang kurang cakap atau kurang berbakat, atau cenderung untuk KKN, tetapi sebab utamanya terletak pada tidak adanya kesadaran bahwa sebuah struktur akan ikut berkembang bersama tindakan politik, seperti bayang-bayang yang mengikuti orang kemanapun dia pergi, dan berperan sebagai alat pembasmi gerak maju dari politik tersebut. Rezim baru bisa lahir setelah rezim lama berhenti, tetapi setiap kali hanya lahir untuk menjadi korban dari struktur yang mematikan tersebut.

- (3) Struktur yang mematikan itu lahir dari persaingan antara dinamik kekuatan modal, teknologi dan kepentingan pada tingkat makro yang disebut sistem dunia yang setiap kali menemukan padanan dan begundalnya di dalam negeri sendiri, sehingga membentuk sebuah blok kekuasaan yang menyebar dalam seluruh sektor kehidupan, termasuk pada penguasa rezim sendiri. Beberapa titik simpul dari dinamik kekuasaan dalam negeri itu dapat ditemukan pada aneka masalah seperti pri/non pri, sipil/militer atau bahkan Islam/non Islam. Dikhotomi seperti itu membentuk sebuah bahasa, pengetahuan dan praktek politik yang semakin meregangkan rekatan masyarakat,

bangsa dan negara. Struktur tersebut berkadar semakin hegemonik, atau menjadi satu-satunya pola gerak dari politik. Dan ulah politik yang sesuka-suka sendiri itulah yang disebut dengan KKN.

Proses terus menerus memperlebar jarak antara masyarakat, bangsa dan negara inilah yang pada gilirannya juga semakin membutakan kesadaran politik, sehingga politik menjadi asing bagi warga negara, karena kekuatan politik memang semata hanya mirip kekuatan anjing berebut tulang. Dan keadaan semacam ini disakralkan atau diberi nama yang mewah, yakni neo liberalisme, masyarakat madani, pasar bebas atau sebutan lain yang sejenis, yang berkembang dalam kajian-kajian akademik di semua tempat..

Ketika tindak berpolitik tidak semakin mampu merekat masyarakat, bangsa dan negara, gerak mundur yang terus menerus diulang dalam pola yang sama itulah yang disebut dengan gerak menuju anarkhi atau justru anarkhi itu sendiri.

Dalam sebuah negara yang terkutuk masuk dalam struktur yang hegemonik seperti ini, gerak politik semakin menjauhkan semua orang dari peradaban, dan selalu kembali pada hukum dasar dunia satwa, "survival of the fittest", atau apa yang disebut sebagai Darwinisme sosial.

Indeks

A

Abu Ghraib 41
adequatio rei et
intellectus 17
afrikanisasi 27, 48, 98
Al Qaeda 42, 75
Amerika 22, 26, 40,
41, 42, 43, 53,
54, 60, 67, 68,
69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76,
92, 105, 119
Aristide 28
Aristoteles 83

B

Belanda 13, 20, 54,
55, 65, 126
black market 25
bolshevik 58
Bumi Putra 54
bourgeois 61

C

capo di tutti capi 69
Centhini 113
Cina 26, 35, 36, 69,
72, 73, 84, 93,
104, 105, 119,
124, 127, 128
civil liberty 61, 62, 67

D

Dai Nippon 126
demokrasi sentralistik
58
Deng Xiao Ping 119
Diponegoro 126

E

Epos 11
Eropa 26, 70, 84, 105,
118
ersatz capitalist 19, 34,
50

Negara Anarkhi

Erucakara 99
ethnic cleansing 27
exploitation de l'homme
par l'homme 65

H

Habermas 83
hagiographia 24
Haiti 28
heterodoxa 15
Hindhu 55, 106

I

ideologi kelas 59, 60
ideologi lokal 60
Idi Amin 28
IMF 46
India 11, 34, 68, 72,
73, 113
indirect rule 13
infant industry 23
Inggris 57, 61, 68, 119
Iran 30

J

Jepang 26, 38, 63, 72,
84, 105, 118, 119,
124, 126, 128
judeo-greco-roman 124

K

kaum Hispanik 68, 76
kolonialisme 13, 20,
56, 65, 77, 95,
127
komedi "Volksraad"
126
kromo 9
Kurawa 11
Kurusetra 11

L

leisure class 19, 34, 39,
47, 50, 98, 108
Lenin 45, 83

M

Mao Tse Tung 83
Marxisme 58, 61
Mataram 12, 13, 14,
25, 84
Mexico 68, 69
Mikhail Gorbachev 119
minderwardigheid-com-
plex 55, 66
mitologis 11, 77

N

Nagarakertagama 113
national interest 22, 33
Negro 68, 76

neo-liberalisme 48
New World Order 40, 41
ngoko 10
Nigeria 27

P

palihaan nagari 13
Pandawa 11
paradoxa 15
Pararaton 113
Pax Nederlandica 106
Perancis 57, 61, 66
perestroika 119
perjanjian Ganti 13
Plato 83
political goodwill 58
political science 83, 116
post colonial 1
post industrial 73
post modern 1
private security guard 41

R

ratu adil 99, 101
rezim eufemistik 13, 83,
86, 87
rezim metaforik 13, 14,
87
Robert Mugabe 28
Rusia 53, 58, 119
Rwanda 27, 69

S

sepi ing pamrih 11, 128
serat Damarwulan 113
Serat Hidayat Jati 113
Soeharto 22, 25, 27,
46, 63, 64, 104,
125, 126
Soekarno 22, 25, 27,
45, 62, 63, 64,
104, 125, 126
Spanyol 68, 69
sphere of influence 37
Sudan 27
suku Han 105
Sun Tzu 83
Suwardi Suryaningrat
54

T

terugval basis 28, 32,
50
the condition of possibi-
lities 18
the end of history 1
the end of ideology 1
the end of millenium 1
tributary system 36
trickle-down 23

U

Uganda 28
Uni Sovyet 74, 119
USAID 73

V

Velayat Al-faqih 30
VOC 106
vreemde Oosterlingen
55

W

welfare state 84, 88
Wilhelmina 54
wong cilik 12
world system 24, 26, 46
WTO 36

Z

Zimbabwe 28, 69

BIODATA PENULIS

Dr. Emmanuel Subangun, lahir di Kediri, Jawa Timur, 28 Oktober 1949. Menyelesaikan program doktor Sosiologi di EHESS Paris. Sekarang menjadi direktur Yayasan ALOCITA Yogyakarta. Sebelumnya ia belajar di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan Filsafat Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dia pernah menjadi wartawan Harian Umum KOMPAS Jakarta (1972-1992) dan menjadi konsultan lepas ILO bagian ketenagakerjaan (1987-1990). Sejak tahun 1990, menjadi dosen mata kuliah pemasaran di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Buku-bukunya yang telah dipublikasikan antara lain *Dari Saminisme ke Posmodernisme* (1994); *Syuga Derida* (1995); *Kapitalisme Gotong Royong* (1997); *Kaum Beriman di Tengah Krisis Nasional* (1999); dan *On the Half-hearted Decolonizing Process of the (Catholic) Church in Indonesia* (2003).

